

Media Politik dan Dakwah **al-wa'ie**

Membangun Kesadaran Umat

LIMA TAHUN KE DEPAN **INDONESIA MAKIN SURAM**

**Agar Anak Tak
Terpapar
Sekularisme**

**Benarkah
Khilafah
Sudah Basi?**

H. Ismail Yusanto:
**Indonesia Butuh Pemimpin
dan Sistem yang Baik**



AGENDA DAKWAH



Soloraya. Ahad [17/11] ratusan umat Islam se-Soloraya memenuhi Masjid Jami' MUI Surakarta guna menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad saw. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Kajian Islam Kaffah tersebut mengambil tema, "Meneladani Kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam Membumikan Islam".



Aceh. Ahad [17/11] Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimah Aceh (For UMMaH) mengadakan acara Maulid Nabi Besar Muhammad saw. Bertempat di Aula Museum Aceh, tidak kurang dari 500 peserta hadir dalam Perayaan Maulid Nabi tersebut. Maulid kali ini mengangkat tema, "Cinta Nabi Cinta Syariah".



Medan. Seorang alumnus pesantren Al Darul Muttaqien Kota Batu, Malang Jawa Timur menyebutkan hanya syariah Islam yang bisa menjamin dan menjaga rasa aman masyarakat. "Apakah hari ini bapak dan ibu sudah merasa aman?" tanya Ustadz Kusnadi Ar-Razi saat menyampaikan ceramah agama pada acara Maulid Nabi Besar Muhammad saw. di Masjid Al Amin, Medan, Ahad [7/11]. Pertanyaan itu langsung dijawab kompak jamaah, "Belum...!".



Kendari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. 1441 H dilaksanakan di Masjid Nurul Falah Puuwatu pada Ahad [17/11] dengan mengangkat tema, "Cinta Nabi Cinta Syariah". Ribuan peserta memadati masjid hingga membludak memadati halaman. Acara dikemas dalam bentuk Tabligh Akbar menghadirkan tiga pembicara, KH Amrin Amrullah, Dr. Fitriaman dan Ustadz Wildan Abdu, ME.



Palangkaraya. "Cinta Nabi Cinta Syariah" jadi tema besar dalam acara Maulid Nabi 1441 H yang diadakan di Gedung KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Cilik Riut Km. 1 Palangka Raya. Sebanyak 300 Peserta yang hadir khidmat membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad saw. "Cinta kita kepada Nabi harus di atas segalanya. Harus melebihi cinta kita kepada orangtua kita, kepada istri dan anak-anak kita," jelas pimpinan Majelis Ats-Tsaqafiah Palangka Raya, Ustadz. Haidar Roffi.



Malang. Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad saw., Forum Ukhuwah Umat Islam (FUUI) Singosari Kab. Malang menggelar acara tabligh akbar Maulid Nabi bertajuk, "Cinta Nabi Cinta Syariah", di Aula Restoran Pak Maning, Singosari, Sabtu [16/11]. Hadirkan Kiai Drs. Muhammad Arifin, Pengasuh Al-Andalusia Kota Batu yang dikenal di masyarakat dengan ceramahnya yang jenaka namun tegas.

Daftar Isi

Indonesia Butuh Pemimpin dan Sistem yang Baik

Lima tahun ke depan, di bawah rezim Jokowi, nasib Indonesia dipastikan akan makin suram. *Pertama*, karena terbukti di bawah Jokowi Indonesia gagal di segala bidang, terutama ekonomi. *Kedua*, sistem yang digunakan untuk mengelola negara tetap Kapitalisme-sekular yang terbukti rusak dan merusak. Karena itu Indonesia saat ini butuh tak hanya pemimpin yang baik, tetapi juga sistem yang baik.

Benarkah Khilafah Sudah Basi

Seorang tokoh Islam di Tanah Air dengan percaya diri menyatakan bahwa Khilafah sudah basi. Artinya, sistem pemerintahan Islam—yang notabene warisan Rasulullah saw. dan menjadi Sunnah Khulafaur Rasyidin—dianggap sudah tidak relevan. Jangankan diterapkan, bahkan untuk sekadar diperbincangkan. Karena itu dia setuju jika Kemenag akan merevisi (menghapus) materi Khilafah dari seluruh pelajaran agama Islam. Pertanyaannya: Benarkah Khilafah sudah basi?

Agar Anak Tak Terpapar Sekularisme

Hidup di tengah-tengah masyarakat sekular memang tidak mudah. Penuh tantangan. Apalagi bagi para orangtua yang berkepentingan agar anak-anaknya menjadi shalih dan shalihah. Perlu kesungguhan dan kerja keras dalam mendidik mereka agar mereka tidak terpapar sekularisme. Bagaimana caranya? Inilah yang dipaparkan dalam rubrik "*Baiti Jannati*" kali ini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Kebencian Terhadap Islam	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Dunia Terbalik, Dakwah <i>Must Go On</i>	7
<i>Fokus</i> : Lima Tahun Kedepan Indonesia Makin Suram	9
<i>Analisis</i> : Salah Urus Indonesia	14
<i>Tafsir</i> : Bukti Kepastian Hari Kiamat	18
<i>Iqtishadiyah</i> : Menangkal Resesi Secara Islami	22
<i>Siyasah Dakwah</i> : Dakwah Rasulullah saw. Era Makkah	26
<i>Soal Jawab</i> : Benarkah Khilafah sudah basi? ..	30
<i>Fikih</i> : Kepemimpinan Individual Dalam Islam ..	33
<i>Baiti Jannati</i> : Menjaga Anak Dari Paparan Sekularisme	36
<i>Atsar</i> : Warisan Islam di Amerika Yang Masih Diabaikan	39

<i>Lintas Dunia</i>	42
<i>Catatan Dakwah</i> : Strategi Rand	45
<i>Hiwar</i> : Ustadz H. Ismail Yusanto: Indonesia Butuh Pemimpin dan Sistem yang Baik ..	48
<i>Nafsiyyah</i> : Akhlak Sempurna Dengan Tegaknya Syariah	53
<i>Ibrah</i> : Cinta Nabi saw.	56
<i>Afkar</i> : 'Kabinet Baru' Dalam Sistem Khilafah ..	58
<i>Nisa</i> : Ilusi Kesenjangan Gender	63
<i>Telaah Kitab</i> : Problem Asasi Ekonomi	67
<i>Takrifat</i> : 'Illat Qiyâsiyah	71
<i>Hadis Pilihan</i> : Rikaz (Di Antara Sebab Kepemilikan Harta)	74
<i>Dunia Islam</i> : Nasib Tragis Masjid Babri Di India ..	76
<i>Tarikh</i> : Kaidah Islam Dalam Memilih Pejabat Publik (Bagian Ketiga - Habis)	79

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, rezim baru hasil Pemilu/Pilpres lalu telah terbentuk. Meski demikian, presidennya tetap Jokowi, dan sebagian anggota kabinetnya juga tetap muka lama.

Harapan publik terhadap rezim Jokowi di periode pertama pemerintahannya tentu berbeda dengan harapan publik terhadap rezim Jokowi di periode kedua ini. Di periode pertama, publik begitu antusias dan optimis. Pasalnya, pencitraan Jokowi sebagai presiden yang sederhana, merakyat dan bebas dari korupsi begitu kental. Boleh dikatakan, saat itu pencitraan Jokowi sukses besar. Membuat publik banyak yang terpukau. Tentu juga berharap besar kepada dia.

Namun, di periode kedua ini tentu kondisinya berbeda. Publik tak lagi antusias. Bahkan kebanyakan pesimis. *Pertama*, banyak pihak meyakini kemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu adalah hasil dari kecurangan yang massif dan terstruktur. Ini yang membuat sebagian masyarakat kecewa atas keterpilihan kembali Jokowi. *Kedua*, sepanjang pemerintahan Jokowi di periode pertama, sebagian besar janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres—jika tidak seluruhnya—tak ada yang terealisasi. Ekonomi, misalnya, bukan *meroket*. Malah *nyungsep*. Utang luar negeri bertambah secara gila-gilaan. Lapangan kerja banyak diberikan ke orang-orang China. Infrastruktur yang banyak dibangun dengan utang China tak berkorelasi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi terhadap pemerataan. Contohnya di Papua. Pabrik-pabrik banyak yang tutup. Impor makin tak terkendali. Pengangguran makin tinggi. Daya beli masyarakat makin menurun. Harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Tarif listrik, harga BBM dan gas, juga terus meningkat. Terakhir, iuran BPJS juga terus mengalami “penyesuaian”. Bahkan hingga dua kali lipat (100%). Semuanya makin membebani rakyat kebanyakan yang kehidupan ekonominya selama ini sudah susah.

Ironisnya, rezim Jokowi dan kabinet barunya malah sejak awal tak fokus ke persoalan utama, khususnya ekonomi. Rezim ini malah lebih banyak berwacana seputar radikalisme yang tak jelas wujudnya hingga kini. Parahnya, isu radikalisme ini terus dihidupkan dengan sasaran umat Islam. Terutama yang kritis kepada rezim Jokowi.

Alhasil, lima tahun ke depan, dipastikan masa depan Indonesia di tangan Jokowi makin suram.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Menara 165,

Lt-4, Jl. TB

Simatupang

Kav-1 Cilandak Timur,

Jakarta Selatan.. e-

mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

STOP ISLAMOPHOBIE

KEBENCIAN TERHADAP ISLAM

Setelah sebelumnya menghina kerudung dan azan, lagi Sukmawati menghina Islam. Dalam potongan video viral yang beredar, Sukmawati berkata, “Mana lebih bagus Pancasila atau al-Quran? Sekarang saya mau tanya *nih* semua. Yang berjuang di Abad 20, itu Nabi yang Mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?”

Saat itu Sukmawati sedang berbicara di forum dengan tema ‘Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme’.

Meskipun menyanggah telah menghina dan tak bermaksud membandingkan jasa Rasulullah saw. dan Soekarno, kalimat Sukmawati itu mengandung penghinaan. Apa perlunya membandingkan, kalau hanya yang dimaksud hanya perbandingan masalah waktu. Semua paham era Soekarno dan Rasulullah saw. berbeda. Tentu perbandingan ini dimaksudkan untuk bicara tentang peran. Sesuatu yang tak pantas dibandingkan; Soekarno manusia biasa, dengan kebaikan sekaligus banyak kelemahannya, dengan Rasulullah saw. Dialah *Sayyidul Mursalin*, pemimpin para nabi, yang

ma’shum dari segala kesalahan. Dialah utusan Allah SWT yang menyampaikan Islam sebagai risalah yang paripurna.

Apalagi konteks pembicaraan itu adalah saat Sukmawati bicara dalam forum radikalisme. Sudah sangat jelas, selama ini isu radikalisme digunakan untuk menyerang Islam.

Sukmawati lupa, yang berjuang untuk Indonesia, bukan hanya Soekarno, tetapi para ulama, politisi Islam dan mujahidin yang berada di garda terdepan untuk melawan penjajahan. Para ulama inilah yang menggerakkan semangat perlawanan terhadap penjajahan atas dasar jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah jelas ajaran Rasulullah saw. Tidaklah mengherankan kalau perjuangan negeri ini tidak bisa dipisahkan dari tetes keringat dan darah ulama dengan teriakan takbir.

Rasulullah saw. memang sudah wafat 14 abad lalu. Namun, ajaran Islam yang dibawa oleh beliau menjadi landasan dan pendorong utama umat Islam untuk berjuang melawan penjajahan. Sukmawati harus tahu ini! Perbandingan Sukmawati ini sesungguhnya merupakan pengkerdilan terhadap peran Islam dan umat Islam dalam perjuangan negeri ini.

Bukan kali ini saja Sukmawati mengeluarkan pernyataan yang alergi terhadap Islam. Sebelum kasus ini, Sukmawati pernah dilaporkan dalam puisi berjudul 'Ibu Indonesia' yang dibacakan dalam acara '29 Tahun Anne Avantie Berkarya' di Indonesia Fashion Week 2018. Dalam salah satu penggalan bait puisinya itu, Sukmawati menyinggung kidung dan azan. "*Aku tak tahu syariat Islam. Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu,*" demikian bait puisi Sukmawati itu.

Meskipun sudah dilaporkan, Sukmawati seolah tidak tersentuh hukum. Wajarlah kalau di tengah umat Islam semakin menguat anggapan bahwa kebencian rezim ini terhadap Islam benar-benar nyata. Berbeda halnya kalau yang dilaporkan itu para ulama yang menyinggung penguasa. Hukum seolah hanya tajam terhadap aktifis Islam, ulama dan pejuang Islam; tetapi tumpul terhadap penghina Islam.

Ngototnya elit-elit politik berkuasa untuk menjadikan Ahok sebagai pejabat BUMN strategis menambah luka umat ini. Ahok, yang jelas-jelas telah dihukum karena menghina al-Quran, dipromosikan. Padahal Ahok diduga masih memiliki persoalan hukum. Apakah tidak ada selain Ahok yang pantas untuk diangkat? Muncullah anggapan seolah rezim ini tidak memperhatikan perasaan umat Islam atau ingin mengokohkan Indonesia sebagai negara sekular, yang tidak memperhatikan perasaan umat Islam.

Belum lagi isu radikalisme yang jelas diarahkan pada ajaran Islam. Buktinya, yang dipersoalkan adalah cadar, celana di atas mati kaki, keinginan untuk menerapkan syariah Islam secara *kâffah* dan keinginan untuk mempersatukan umat seluruh dunia di bawah naungan Khilafah. Muncul pula surat Keputusan Bersama (SKB) 12 kementerian dan lembaga Penanganan Radikalisme ASN di Jakarta. Lagi-lagi yang dipersoalkan ajaran Islam. Menteri Agama akan mempersoalkan kalau ada

ASN yang mengangkat ayat-ayat yang menimbulkan perpecahan. Bukankah ini penghinaan terhadap al-Quran secara langsung? Menyebut ayat-ayat yang menimbulkan perpecahan. Ayat apa yang dimaksud?

Kita mengingatkan rezim Jokowi untuk menghentikan upaya menguatkan sikap anti Islam ini. Hal ini tidak akan pernah memberikan kebaikan pada negeri ini. Malah akan selalu menimbulkan permusuhan, bukan harmoni. Umat Islam bagaimanapun merupakan potensi besar yang harus dirangkul untuk kebaikan negeri ini. Ajaran Islam yang rahmat lil alamin tidak selayaknya dijadikan sebagai ancaman bagi negeri ini. Yang sejatinya dijadikan musuh negeri ini adalah ideologi Kapitalisme. Kapitalismelah yang nyata-nyata telah menghancurkan negeri ini, menyulitkan masyarakat dan memberikan jalan kepada pihak asing dan antek-anteknya untuk merampok kekayaan alam negeri ini. Kecuali memang rezim Jokowi secara sengaja memposisikan diri untuk memusuhi umat Islam. Kita akan menyaksikan ke depan permusuhan itu akan semakin meningkat.

Al-Quran telah mengingatkan umat Islam tentang karakter musuh-musuh Islam yang tidak akan berhenti menyerang umat Islam. Untuk itu umat Islam harus bersikap. Allah SWT berfirman (yang artinya): Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman kepercayaan kalian orang-orang di luar kalangan kalian (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadaraman bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat (Kami) jika saja kalian memahaminya (TQS Ali Imran [3]: 118). Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Barat Takut Khilafah Tegak Kembali

Fajar
Kurniawan
(Analisis senior
PKAD)



umat Islam mesti waspada. Monsterisasi Khilafah adalah agenda Barat sekular untuk meninabobokan

rakyat dalam keterpurukan, menjauhkan umat

Islam dari agamanya dan nyaman dalam kondisi terjajah.

Pada Desember 2004, Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Intelligent Council/ NIC) merilis laporan dalam bentuk dokumen yang berjudul *"Mapping The Global Future"*. Dokumen ini berisikan prediksi atau ramalan tentang masa depan dunia tahun 2020.

Dalam dokumen tersebut, NIC memperkirakan bahwa ada empat hal yang akan terjadi pada tahun 2020-an yakni: *Dovod World*: Kebangkitan ekonomi Asia; Cina dan India bakal menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia. *Pax Americana*: Dunia tetap dipimpin dan dikontrol oleh AS. *A New Chaliphate*: Kebangkitan kembali Khilafah Islam, yakni Pemerintahan Global Islam yang bakal mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat.

Dari dokumen tersebut jelas sekali bahwa negara-Negara Barat meyakini bahwa Khilafah Islam akan bangkit kembali. Menurut mereka, Khilafah Islam tersebut akan mampu menghadapi nilai-nilai peradaban Barat. Khilafah oleh Barat dianggap sebagai suatu ancaman yang menakutkan. Sebab, ketika tegak, Khilafah akan menghentikan hegemoni Kapitalisme Barat atas dunia, yang akan mengganggu kepentingan mereka, khususnya dalam masalah politik dan ekonomi.

Ketakutan Barat tersebut dibuktikan dengan terus membuat opini buruk tentang Khilafah secara berulang. Sebut saja sewaktu George Walker Bush masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat yang berkuasa dari Januari 2001 hingga Januari 2009. Sebagaimana transkrip pernyataan Bush yang dilansir oleh situs *washingtonpost.com* pada 5 September 2006, dikatakan, *"This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East and Southeast Asia"* (Khilafah ini akan menjadi Imperium Islam totaliter yang meliputi semua negeri-negeri Muslim saat ini dan yang dulunya adalah negeri-negeri Muslim, yang membentang dari Eropa hingga Afrika Utara, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara)."

Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada bulan November tahun 2002, saat dilakukan News Conference pada Pertemuan Tingkat Tinggi ke 10 antara Rusia-Uni Eropa (The 10th Russia-European Union Summit) di Brussels, menyatakan, *"By the way, I would like you to note that the creation of a caliphate on the territory of the Russian Federation is only the first part of their plan. Actually, if you follow the developments in that sphere, you ought to know that the radicals have much more ambitious goals. They speak about creating a world caliphate."*

Tony Blair, saat menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, pada pidato di depan Konferensi Partai Buruh, menyatakan, *"...They demand the elimination of Israel; the withdrawal of all Westerners from Muslim countries, irrespective of the wishes of people and government; the establishment of effectively*

Taleban states and Sharia law in the Arab world en route to one caliphate of all Muslim nations (...Mereka menuntut penghancuran Israel, penarikan mundur semua orang Barat dari negara-negara Islam, dengan mengabaikan kemauan rakyat dan pemerintahnya, pendirian negara-negara semacam Taliban dan hukum syariah di dunia Arab dan berujung yang sama pada Kekhalifahan untuk semua negara-negara Muslim)." □

Jangan Menindas Umat Islam

Eko Susanto
(Aktivis BARA)



i bawah sistem Kapitalisme yang sedang diterapkan saat ini secara global termasuk di negeri ini, ketidakadilan, eksploitasi, kezaliman

sporadik bahkan sistemik terjadi di tengah masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme gagal mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan. Yang terjadi justru ketimpangan yang sangat nyata.

Hukum dirasakan sebagian orang terasa tidak lagi bersifat adil dan gagal mewujudkan rasa keadilan. Hukum dijadikan alat kekuasaan dan mengabdikan pada kepentingan. Penerapan hukum pun ibarat pisau koki, tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penerapan hukum sangat cepat dan tegas terhadap rakyat kebanyakan, namun tumpul dan mandul jika berhadapan dengan penguasa atau orang yang dekat dengan kekuasaan dan penguasa; tumpul terhadap tokoh, elit, para pemilik modal dan orang-orang berpengaruh.

Di tengah ketidakadilan yang merajalela itu, slogan keberagaman atau kebhinekaan tak jarang hanya dijadikan alat demi kekuasaan dan kepentingan tertentu. Islam dan kaum Muslim menjadi pihak yang paling sering dirugikan. Islam dan kaum Muslim tak jarang disudutkan dengan isu keberagaman.

Saat Islam dan kaum Muslim menjadi pihak yang dizalimi, menjadi korban, isu keberagaman dimainkan untuk menghalangi kaum Muslim mendapatkan keadilan. Ketika kaum Muslim menuntut keadilan dan mendesak pelaku kezaliman ditindak tegas, termasuk melalui aksi, masalah keberagaman pun diperalat. Cap bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam itu bisa mengancam keberagaman pun dimunculkan. Dengan isu keberagaman umat Islam dipaksa menerima dan memaafkan ketidakadilan yang terjadi pada mereka.

Akhirnya, slogan keberagaman atau kebhinekaan dirasakan oleh umat sebagai alat untuk memaksa mereka menerima dan membiarkan begitu saja kristenisasi mengancam akidah umat Islam. Sebaliknya, seruan dakwah Islam dan penerapan syariah malah dikekang, juga dengan cap bisa mengancam keberagaman.

Walhasil, slogan keberagaman hanya diperalat untuk menyudutkan umat Islam. Dengan dalih keberagaman, umat dipaksa untuk menerima berbagai ketidakadilan. Dalih keberagaman juga digunakan untuk menghalangi umat Islam dari perjuangan untuk menegakkan Islam dan menerapkan syariah Islam.

Masalah keberagaman tidak boleh dipandang sebatas keberagaman itu sendiri, tetapi harus dipandang sebagai bagian dari pengaturan urusan masyarakat secara keseluruhan. Apakah keberagaman itu menjadi kebaikan dan berkah atau sebaliknya, menjadi keburukan dan bencana, sangat dipengaruhi oleh bagaimana interaksi dan berbagai urusan di masyarakat diatur.

Kunci mewujudkan semua itu ada dua: *Pertama*, aturan yang benar, adil dan berkeadilan yang digunakan untuk mengatur semua urusan dan interaksi di masyarakat. Sistem dan aturan yang seperti itu adalah sistem dan aturan Islam.

Kedua, penyelenggara negara (penguasa dan aparatur) yang menjalankan dan menerapkan sistem dan aturan di tengah masyarakat memiliki sifat amanah dan peduli terhadap rakyat. Kuncinya adalah karena faktor iman dan ketakwaan yang ada pada diri penguasa dan aparatur serta kontrol dari masyarakat. Itu juga hanya bisa diwujudkan seutuhnya oleh sistem dan aturan Islam. □



DUNIA TERBALIK, DAKWAH *MUST GO ON*

Muhammad Rahmat Kurnia

Benar-benar dunia terbalik,” ujar Pak Habib agak ketus.

“Memangnya kenapa, Pak? Kok kayak sewot begitu,” tanya saya.

“Iya, sekarang mah banyak yang aneh. Kagak masuk di akal sehat,” jawabnya.

“Maksudnya, tentang apa?” desak saya.

Ia pun segera mengutarakan isi hatinya. “Sesaat sesudah dilantik, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan ‘Saya kan bukan menteri agama Islam, saya menteri agama Republik Indonesia yang di dalamnya ada lima agama’,” lanjutnya. “Namun, yang ia lakukan selalu berkaitan dengan umat Islam,” tambahanya. “Dia akan merombak 155 buku pelajaran agama, padahal itu sudah dipakai belasan tahun. Waspada! *tuh*, nanti ajaran campur sari alias sinkretisme banyak masuk ke *sono*. Dengan alasan toleransi, umat Islam, khususnya kawula muda, didorong-dorong untuk partisipasi dalam ajaran agama lain. Contohnya, salam saja *kok* campur-campur. Salam Islam, Kristen, Hindu dan Budha campur jadi satu,” ujarnya penuh semangat.

Ustadz Deni turut nimbrung. “Saya kalau tidak salah pada tanggal 23 Oktober 2019 nonton di sebuah TV swasta, Menteri Agama mengancam untuk menindak tegas ustadz-ustadz yang isi ceramahnya dapat merusak keutuhan bangsa. Aneh, kok yang disebut cuma ustadz. Pendeta, rahib, romo, biksu atau sebutan lainnya tidak disebut-sebut akan diancam.” Segera ia tambahkan, “Sangat tendensius sekali.”

Pak Wawan tak tahan untuk bicara, “Iya, urusan cadar dan celana cingkrang akan dilarang. Itu kan arahnya jelas pada ajaran

Islam.”

“Memang benar, aneh-aneh sekarang *mah*. Katanya, bukan hanya menteri agama Islam, tapi yang terasa disakiti oleh omongan dan kebijakannya itu *kok* umat Islam melulu,” ungkapnya sambil geleng kepala.

Barangkali, banyak orang yang merasa terwakili perasaannya oleh perbincangan itu.

“Beberapa waktu lalu juga ada yang aneh,” Pak Wildan nimbrung. “*Kan* sudah menjadi kesepahaman rakyat, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa mantan koruptor tidak boleh menjadi pejabat. Bahkan ada yang dicabut hak politiknya. Eh, Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, mengatakan usul KPU yang melarang eks nabi koruptor maju Pilkada sebagai konsep kuno. Dia menyebut, saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep *restorative justice*, yakni beralih dari pemidanaan dengan teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi. Aneh, *toh?!*” tambahanya. “Kepentingan adalah raja,” ia mengakhiri ucapannya.

Kang Rani yang dari tadi menyimak turut berkomentar. Ia berkata, “Jaman sekarang *nih* jaman edan. Masa Sukmawati ingin membandingkan Pancasila dengan al-Quran?!” Segera ia susul dengan menyatakan, “Dengan bahasa tubuh dan intonasi yang menggambarkan pelecehan, Sukmawati mengatakan ‘Mana yang lebih bagus Pancasila sama al-Quran?’ Ini pertanyaan melecehkan. *Wong* al-Quran itu wahyu, Pancasila bukan. Al-Quran itu membacanya ibadah, Pancasila itu tidak. Al-Quran itu dibawa oleh Rasul, Pancasila itu hasil rembukan. Al-Quran itu mukjizat Rasulullah, Pancasila itu bukan

mukjizat Rasulullah. Al-Quran itu ada 30 juz dengan 114 surat, Pancasila terdiri dari 5 sila. Dan sebagainya. Tidak *apple to apple* pbandingannya. *Kok* minta dibandingkan. Pertanyaannya pun sangat tendensius!”

Pak Wawan tanya, “Katanya sudah klarifikasi bahwa tidak ada niat melecehkan?”

Kang Rani pun sigap menjawab dengan gaya millennialnya, “Omongannya beda dengan kelakuannya! Masa iya tidak sengaja, *wong* tahun lalu juga menghina jilbab, padahal jilbab itu ajaran Islam. Katanya konde lebih baik daripada jilbab. *Saiki* kok diulang.”

“Memang sekarang ini orang Islam makin berani melecehkan agamanya sendiri. Kalau orang Islam sudah bersikap seperti ini, jangan heran, orang-orang di luar Islam pun akan dengan berani melakukan hal serupa,” imbuh Pak Wawan.

Ya. Saat ini Islam dianggap asing. Persis seperti sabda Nabi saw., “*Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing.*” (HR Muslim).

Orang yang mencintai Islam dan mencintai Rasulullah saw. niscaya ia akan mentaatinya. Pepatah mengatakan, “*Ashlul hubbi tha’ah al-habib*. Pangkal cinta adalah mentaati yang dicintai.”

Bahkan Imam Syafi’i mengatakan, “*Innal muhibba liman yuhibbu muthi*. Sungguh orang yang mencintai terhadap yang dia cintai itu taat.”

Namun, lagi-lagi aneh, ketika seseorang berupaya untuk taat dan terikat dengan aturan Allah SWT, mencoba untuk ‘hijrah total’, *eh* ditakut-takuti dengan alasan anti-kebhinekaan, intoleran atau radikal. Dianggap asing. “Hijrah jangan berlebihan,” kata mereka. Mulut pun tak berhenti untuk membangun narasi yang memojokkan siapa pun yang mencintai Islam dan mencintai Rasul. Aneh, bukan?!

Namun, *don’t worry be happy*. Allah SWT

Dalam Tafsir al-Wajiz, Prof. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, “Inilah sifat untuk yang batil, yakni akan lenyap. Akan tetapi, kadang ia menjadi kuat dan laris di tengah-tengah manusia ketika tidak dilawan oleh yang *haq*. Namun, ketika yang *haq* datang, maka yang batil segera lenyap. Oleh karena itu, kebatilan tidaklah laris di tengah masyarakat kecuali ketika mereka berpaling dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.”

berfirman dalam al-Quran yang maknanya: *Katakanlah, “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”* (TQS al-Isra [17]: 81).

Dalam Tafsir al-Wajiz, Prof. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, “Inilah sifat untuk yang batil, yakni akan lenyap. Akan tetapi, kadang ia menjadi kuat dan laris di tengah-tengah manusia ketika tidak dilawan oleh yang *haq*. Namun, ketika yang *haq* datang, maka yang batil segera lenyap. Oleh karena itu, kebatilan tidaklah laris di tengah masyarakat kecuali ketika mereka berpaling dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.”

Artinya, bila umat Islam menyampaikan kebenaran maka kebatilan akan hancur dengan sendirinya. Namun, bila umat Islam diam tidak menyerukan kebenaran maka kebatilan itulah yang akan unggul. Karena itu dakwah *must go on*.

Wallahu a’lam. []

LIMA TAHUN KE DEPAN INDONESIA MAKIN SURAM

Menimbang rekam jejak Presiden Jokowi lima tahun sebelumnya, juga melihat personil menteri-menteri yang baru diangkat, tak berlebihan bila banyak pihak memperkirakan lima tahun ke depan Indonesia semakin suram.

Salah satunya seperti yang dinyatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Profesor Suteki. “Menurut saya lima tahun ke depan akan lebih suram,” ujarnya di hadapan sekira 250 peserta *Diskusi Tabloid Media Umat: Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan*, Kamis (31/10/2019) di Gedung Joang, Jakarta.

Tidak Kompeten

Selain kontroversi kemenangannya dari hasil Pemilu 2019, yang dinilai oleh anak penguasa Orde Baru Titiek Soeharto sebagai Pemilu yang lebih curang dari era Pak Harto, Jokowi kembali menuai kontroversi ketika pada 23 Oktober 2019 mengumumkan Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, sebagian orang yang dipilih dianggap tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebut saja Fachrul Razi. Ia ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dia dianggap kontroversi lantaran latar belakangnya yang berasal dari militer dan tidak memiliki riwayat tergabung dalam basis keagamaan.

Anggota Komisi VIII atau Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid, misalnya, menilai kompetensi Fachrul jauh dari ruang lingkup tugas Kementerian Agama.

Namun, Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk memilih dia. Menurut Jokowi, Fachrul memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah radikalisme.

Kontroversi semakin santer lantaran seusai dilantik, Fachrul menegaskan bahwa dirinya bukanlah menteri agama Islam yang hanya mengurus agama Islam saja. Kemudian tanpa angin tanpa hujan dia melakukan serangan narasi terhadap khilafah, cadar dan celana cingkrang.

Kontroversi semakin menjadi tatkala khutbah perdananya sebagai Menteri Agama pada 1 November 2019 itu disebut tak

menggunakan shalawat pada khutbah pertama dan tanpa wasiat takwa pada khutbah kedua, yang keduanya merupakan salah satu rukun khutbah Jumat. Rais Syuriah PWNJ Jakarta Zuhri Ya'qub, misalnya. Dia dengan tegas mengatakan khutbah Jumat Menag Fachrul Razi di Istiqlal tidak sah!

Berikutnya adalah Nadiem Makarim. Ia diangkat presiden sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sosok milenial liberal yang menikah dengan non-Muslim di gereja tersebut tidak memiliki latar belakang politisi ataupun di bidang pendidikan.

Jokowi menjelaskan, ia memilih Nadiem karena latar belakang Nadiem yang mendirikan perusahaan rintisan berbasis teknologi semacam Go-Jek. Ia yakin Nadiem bisa menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menerapkan standar pendidikan yang sama bagi 300 ribu sekolah dengan 50 juta pelajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Padaahal kalau tujuannya itu, orang yang

memiliki keahlian teknologi semacam Nadiem cukup saja dijadikan sebagai konsultan IT Kemendikbud. Enggak perlu jadi menteri, kan?

Rekam Jejak Buruk

Selain penempatan menteri yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Presiden juga menempatkan orang-orang bermasalah di kabinet sebelumnya untuk menjadi menteri lagi.

Sosok Tito Karnavian yang sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) ini ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penunjukan Tito menuai banyak pertanyaan publik. Salah satu alasannya, karena Tito dianggap belum bisa mengungkapkan kasus penyiraman air keras yang dilakukan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Tito juga tersangkut kasus suap impor daging yang tercatat dalam "Buku Merah". *Tempo.co* pada 8 Oktober 2018 memberitakan hasil temuan *Indonesialeaks* yang mengungkap dokumen pemeriksaan staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa (SLP) Kumala Dewi Sumartono tertanggal 9 Maret 2017. Dokumen itu terkait kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan impor daging sapi yang melibatkan CV Sumber Laut Perkasa (SLP) Basuki Hariman (pemilik) dan Ng Fenny (general manager).

Ternyata, buku bank warna merah yang berisi catatan aliran dana dari SLP kepada Tito sebagiannya dihapus dengan *type-ex* dan 15 halaman lainnya dirobek oleh penyidik KPK dari kepolisian, yakni Roland Ronaldy dan Harun.

Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan KPK yang diungkap *Indonesialeaks*, 15 halaman yang dirobek dan bagian lain yang di-*type ex* ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu, Tito tercatat paling banyak mendapat duit. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Berdasarkan hukum yang berlaku, Roland

Selain penempatan menteri yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Presiden juga menempatkan orang-orang bermasalah di kabinet sebelumnya untuk menjadi menteri lagi.

dan Harun seharusnya dijerat UU Tipikor dengan ancaman 3-12 tahun penjara karena telah menghilangkan barang bukti penyuapan. Namun, oleh Tito, Roland malah diangkat jadi Kapolres Cirebon, sedangkan Harun diberi 'tiket' sekolah di Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen) ke-57 tahun ajaran 2017 bersama 257 perwira menengah Polri lainnya untuk meningkatkan jenjang karir.

Kepada wartawan, Jokowi menegaskan, alasannya memilih Tito masuk ke kabinet lantaran Tito memiliki banyak pengalaman. "Ya kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah, pengalaman yang baik di lapangan," ujar Jokowi.

Selanjutnya adalah Yasonna Laoly. Kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi e-KTP ketika menjadi anggota DPR (2009-2014) tersebut kembali menjadi Menkumham. Padahal di bawah kepemimpinannya, Menkumham pernah dikritik, salah satunya oleh KPK, karena memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada 400 narapidana kasus korupsi pada Agustus 2017.

Kontroversi Yasonna lainnya terkait dengan UU KPK yang tercipta pada akhir periode Jokowi-JK. UU yang semakin memperlemah peran KPK tersebut menurut penyidik senior KPK Novel Baswedan kepada *penulis* merupakan hasil persekongkolan untuk membunuh KPK.

Jokowi menyebut, penugasan kembali Yasonna salah satu alasannya untuk memperbaiki RUU yang dianggap bermasalah. Karena memang masih tersisa beberapa RUU yang sudah dibahas Pemerintah dan DPR karena protes masyarakat.

Menteri bermasalah lainnya adalah Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, banyak kebijakan yang dirasa cukup kontroversial selama Kemendagri berada

di bawah pimpinan Tjahjo.

"Yang kontroversial itu adalah pemberian akses kependudukan terhadap pihak di luar Pemerintah. Belum lagi kontroversi pencabutan perda bernuansa agama dan penunjukan perwira polisi aktif sebagai pelaksana tugas kepala daerah," ucap Hendri.

Hal lain yang menurut Hendri masih kontroversial, Mendagri memberikan pernyataan untuk memilih Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 di depan kepala desa. Tindakan Tjahjo tersebut tak hanya melanggar aturan undang-undang, tetapi juga norma-norma masyarakat bernegara.

Dibawa ke Mana?

Untuk mengetahui ke mana lima tahun ke depan rakyat akan dibawa maka kita harus memperhatikan kata pertama (*first words*) yang keluar dari pemimpin tertinggi di negeri ini, karena ini adalah kata yang mencerminkan isi otak secara keseluruhan.

"Kita tidak mendapati di dalam *first words* presiden soal korupsi, keadilan, HAM, pemerataan. Itu tidak ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Padahal kita tahu bahwa negeri ini sedang menghadapi persoalan yang luar biasa terkait korupsi, ratusan orang meninggal dalam Pilpres 2019, kerusuhan di Papua, soal ketidakadilan ekonomi, soal ketidakadilan hukum," ujar Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto.

Seperti publik tahu, *first words* yang muncul adalah radikalisme. Setidaknya itu muncul di Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum), juga Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Entah apa definisi radikalisme yang dimaksud rezim, tetapi dalam praktiknya di hari-hari pertama menjabat malah menyerang sebagian ajaran Islam. Dengan kompak dan sahut-menyahut hampir setiap hari mereka

melakukan serangan verbal terhadap khilafah, cadar, celana cingkrang.

Bahkan selain berulang menyerang khilafah, Menkopolkham Mahfud MD sempat sekali menyebut bahwa mengajarkan pemisahan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan *mahram* kepada anak kelas 5 SD sebagai “virus-virus jahat” dan tindakan “radikalisme”.

Dengan mengklaim mencegah radikalisme, Kemenag pun mengumumkan tengah merombak 155 buku pelajaran Agama Islam baik untuk madrasah maupun sekolah dari kelas 1 hingga kelas 12 salah satunya terkait khilafah. Bila tak ada aral melintang, buku-buku penggantinya diluncurkan pada Januari 2020.

Mendengar rencana Kemenag tersebut, Mendikbud langsung mengaminkannya. “Saya selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Walhasil, bila hanya mengandalkan pelajaran sekolah/madrasah, sangat dimungkinkan generasi Muslim ke depan tidak akan mengenal lagi sebagian ajaran Islam, termasuk yang merupakan mahkota kewajiban (*tajul furudh*) tersebut.

Kalangan aparat sipil negara pun tak luput dari serangan rezim sekular radikal intoleran. Pada 12 November 2019 Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerjasama dengan 10 kementerian dan lembaga meluncurkan situs pelaporan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Situs *aduanasn.id* diklaim untuk memastikan Pancasila dipegang teguh ASN.

Pembuatan situs tersebut dinilai berpotensi besar menimbulkan saling curiga, saling lapor antar anak bangsa. Dikhawatirkan tidak hanya saling curiga dan lapor, malah berpotensi saling stigma, persekusi dan tindakan fisik. “Apabila ini terjadi, dikhawatirkan negara telah mensponsori kebencian antar anak bangsa,”

ujar Sekjen LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan dalam rilis pendapat hukumnya yang diterima *Alwaie*, Rabu (13/11/2019).

Klaim Pemerintah, situs tersebut untuk memastikan “Pancasila dipegang teguh” ASN juga sangat berpotensi membuat Pemerintah menjadi diktator bila tidak ada definisi yang konkret. “Wajib ada definisi dan batasan konkret terkait apa saja yang dapat dinilai sebagai ‘Pancasila dipegang teguh’,” tegas Chandra.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), kebijakan dan tindakan Pemerintah harusnya dibatasi oleh undang-undang. Jika tidak maka akan terjerumus ke dalam negara kekuasaan (*machstaat*) yang berpotensi menjadi diktator.

Chandra juga menyeru Pemerintah untuk tidak melakukan stigmatisasi dan tindakan persekusi terhadap seseorang dan kelompok dengan tuduhan sebagai “anti Pancasila, anti kebhinekaan, mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila”. Apabila hal ini dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi persekusi di akar rumput rakyat.

Belum lagi definisi radikal tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*). Padahal semestinya setiap tindakan Pemerintah itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*).

Jelaslah bagi rezim, memerangi radikalisme yang sejatinya adalah memerangi Islam, sebagai fokus utama. Ketidakadilan bukan persoalan. Maraknya korupsi bukan persoalan.

“Dari sana kita bisa meraba ke mana kita akan dibawa dan bagaimana hal tadi itu mau diselesaikan,” beber Ismail memandu publik memprediksikan cara rezim ini bertindak untuk lima tahun ke depan.

Ini sangat ironis, bagaimana bisa di negeri mayoritas Muslim, persoalan praktik dan paham Islam itu ditempatkan sebagai masalah yang paling besar dan dijadikan prioritas yang

paling tinggi. Menurut Ismail, hal itu hanya mungkin terjadi jika otak para pemimpin negeri ini dan para kroninya mengidap fobia Islam (*Islamophobia*) dan sekularisme radikal.

Semakin Liberal

Di satu sisi ajaran Islam semakin diberangus, di sisi lain liberalisme semakin disuburkan. Di bidang ekonomi, misalnya, kembali 'si ratu utang renten dan tukang menaikkan pajak' Sri Mulyani dipilih sebagai Menteri Keuangan sebagai salah satu indikasinya. Dapat diprediksikan utang riba negara semakin membesar, pajak semakin membengkak. Sudah pasti itu akan semakin mengekang rakyat.

Dengan kembali Luhut Binsar Panjaitan dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dapat diprediksikan investasi asing semakin terbuka terutama dari Cina. Pasalnya, ketika nomenklatur kementeriannya sebelum ditambah kata "dan Investasi" saja, Luhut sudah penuh semangat mendukung masuknya investasi Cina.

Investasi tersebut sebenarnya sangat merugikan Indonesia. Bukan hanya keharaman pinjaman uangnya yang berbunga, investasi Cina juga mensyaratkan material pembangunan dan tenaga kerja dari Cina. Selain berdampak dosa besar, minimnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri karena sebagian besar tenaga kerja diambil dari Cina, juga akan membangkrutkan pabrik-pabrik material pembangunan infrastruktur dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran rakyat Indonesia sendiri.

Kebijakan rezim yang membebani rakyat juga semakin meningkat. Salah satunya dengan kenaikan seratus persen premi BPJS serta kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya.

Sektor pendidikan juga diprediksikan semakin liberal dan disorientasi keimanan dan ketakwaan. Selain pemisahan mata pelajaran

Jelaslah bagi rezim, memerangi radikalisme yang sejatinya adalah memerangi Islam, sebagai fokus utama. Ketidakadilan bukan persoalan. Maraknya korupsi bukan persoalan. "Dari sana kita bisa meraba ke mana kita akan dibawa dan bagaimana hal tadi itu mau diselesaikan," beber Ismail memandu publik memprediksikan cara rezim ini bertindak untuk lima tahun ke depan.

dari keimanan (sekularisasi) yang selama ini terjadi, pelajaran agama Islam pun semakin dibeiri dengan dihapusnya berbagai materi pelajaran yang diklaim rezim sebagai radikal.

Orientasi pendidikan lebih diarahkan pada keterampilan agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan para kapitalis, juga memberikan jalan lebar kepada asing untuk menguasai pendidikan, salah satunya dengan semakin bertambahnya rektor asing.

Di sektor politik, seperti yang tampak menguat sejak enggannya rezim menindak secara hukum penistaan agama yang dilakukan Ahok pada 2016, rezim dan para penjiwatnya akan semakin sekuar radikal intoleran, represif, pragmatis dan gemar mengadu domba.

Bila rezim ini tak berputar haluan dan tak ada pula yang dapat menghentikan, maka prediksi lima tahun ke depan Indonesia akan lebih suram bisa jadi kenyataan. *Na'udzubillahi min dzalik.* [Joko Prasetyo].

SALAH URUS INDONESIA

Adi Victoria

(Penulis & Aktivist Dakwah)

7 ujuh puluh empat tahun lebih telah negeri ini berdiri sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selama itu pula, telah silih berganti sebanyak 7 kali Kepala Negara yang memimpin negeri ini. Sistem Pemerintahan yang adopsi pun mengalami pergantian. Dari awalnya menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial (1945-1949), Quasy Parlementer (1949-1950, Parlementer (1950-1959), kemudian sejak tahun 1959 sampai sekarang kembali mengadopsi sistem Pemerintahan Presidensial dengan bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional.

Walaupun negeri ini mendapatkan sebutan negeri yang *gemah ripah loh jinawi* (kekayaan alam yang berlimpah), faktanya kita menyaksikan kehidupan yang jauh dari kesejahteraan. Bahkan kesejahteraan itu tidak terjadi pada provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah di dalamnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Papua menjadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2019 dengan 27,53%. Ironisnya, tambang emas Grasberg di Papua adalah termasuk tambang dengan cadangan emas terbesar di dunia. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan bahwa setiap

harinya Freeport memproduksi 240 kg!

Oleh karena itu, jika sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang negeri ini belum sejahtera, tentu ada yang salah dalam pengelolaan negeri ini. Pertanyaannya, apakah yang salah? Kesalahan pihak yang diberi amanah untuk mengelola (pemimpinnya) atau kesalahan sistem yang digunakan untuk mengelola? Atau malah bisa jadi dua-duanya, yakni orang yang diberi kepercayaan tersebut tidak amanah dan sistem yang digunakan pun sistem yang salah.

Untuk itulah kiranya perlu kajian secara mendalam terkait konsep pengelolaan yang tengah berlangsung di negeri ini. Baik kajian terhadap sistem yang digunakan, juga kajian terhadap karakter manusia yang memimpin negeri ini.

Asas Kapitalisme

"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal. Itulah Indonesia hari ini," sebut Surya Paloh pada saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, yang bertajuk "Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan" pada 14 Agustus 2019 yang lalu.

Benar. Negeri ini berdiri atas asas ideologi



Kapitalisme. Ide-ide Kapitalisme seperti demokrasi, HAM dan sakulerisme kemudian menjadi *mafahim (konsep)*, *maqayis (standart)* dan *qana'ah (keyakinan)*. Semuanya ditanamkan oleh negara kepada masyarakat. Padahal semua ide-ide tadi jelas adalah sumber kerusakan.

Al-'Allamah as-Syaikh Abdul Qadim Zallum di dalam bukunya, *Demokrasi Sistem Kufur*, mengatakan: *"Di antara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia ialah ide kebebasan individu yang dibawa oleh demokrasi. Ide ini telah mengakibatkan berbagai malapetaka secara universal serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negeri-negeri demokrasi sampai ke derajat yang lebih hina daripada derajat segerombolan binatang!"*

Sebagaimana yang telah jamak diketahui, dalam demokrasi, ada 4 kebebasan (*al-hurriyat, freedom*) yang dijamin: (1) kebebasan beragama (*hurriyah al-'aqidah*); (2) kebebasan berpendapat (*hurriyah ar-ra'y*); (3) kebebasan kepemilikan (*hurriyah ar-tamalluk*); dan (4) kebebasan berperilaku (*al-hurriyah asy-syakhshiyyah*).

Kebebasan berperilaku, misalnya, telah menjadikan perempuan sebagai ajang eksploitasi Kapitalisme melalui perhelatan Miss Universe, Miss World dan sejenisnya. Perempuan hanya dianggap sebagai komoditas dagang dan pemuas nafsu laki-laki semata. Kebebasan semacam ini sama artinya dengan meligitimasi kemaksiatan. Pacaran, misalnya, merupakan kebebasan berperilaku yang harus dilindungi.

Kebebasan ini juga melahirkan perilaku seks menyimpang. Sekarang manusia sudah tidak malu lagi memperkenalkan dirinya di hadapan umum sebagai pasangan homo/lesbi dan juga waria yang merupakan perilaku lebih rendah dari binatang.

Demikian pula kerusakan akibat dari

kebebasan kepemilikan. Hal ini memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki dan mengembangkan harta (modal) dengan sarana dan cara apapun. Di Indonesia, pihak asing bahkan diberi kebebasan untuk menguasai sumberdaya alam milik rakyat. *"Sudah lama kita tak pernah jaya dengan hasil alam sendiri. Padahal kita kaya sumberdaya alam (SDA). Sedikitnya 69 persen SDA kita dikuasai oleh asing selama puluhan tahun. SDA itu seluruhnya berakhir dalam surat-surat kontrak (konsensus) dengan pihak asing. Itu sebabnya kita tetap miskin."* Demikian dikatakan Aktivis HAM Usman Hamid, ketika diwawancarai di USU, Sabtu (12/1/13).

Begitu pula dengan paham sekularisme. Saat menjabat sebagai presiden, SBY pernah berkata, *"Indonesia adalah negara sekular dan itu merupakan warisan kita yang penting dari Soekarno dan para bapak pendiri Indonesia lainnya,"* katanya dalam pidato penerimaannya di Soekarno Centre di Bali.

Inti dari paham sekularisme menurut Al-'Allamah as-Syaikh Taqiuddin An-Nabhani (1953) adalah pemisahan agama dari kehidupan (*fa'ulud-din 'anil-hayah*). Juga bisa disebut dengan istilah memisahkan agama dari negara (*fashlud-din 'anid-dawlah*).

Akibatnya, di tengah-tengah sistem sekularistik itu lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama: tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku para politikus yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik, serta sistem pendidikan yang penuh dengan materialistik.

Pemimpin Tidak Amanah

Sebaik apapun sistem yang digunakan dalam memimpin, jika yang menjadi pemimpin adalah sosok yang tidak amanah, yang orientasinya hanya jabatan untuk mendapatkan manfaat



keduniaan semata, maka hal tersebut meniscayakan terjadinya kerusakan. Inilah yang juga sedang menimpa negeri ini.

Kini masyarakat seolah sudah terbiasa dengan adanya berita Pejabat yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini salah satunya disebabkan oleh mahalanya ongkos politik dalam sistem demokrasi.

Secara tidak langsung, munculnya para pemimpin yang tidak amanah tersebut tidak lain dikarenakan sistem yang diterapkan, yakni demokrasi. Korupsi dan demokrasi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena praktik demokrasi yang mengagungkan *popular vote* membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu caranya dengan melakukan korupsi.

Faktor lain adalah kurangnya ketakwaan. Seorang yang benar-benar bertakwa, *insya Allah* akan amanah dalam menjalankan tugasnya. Tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang bisa mengkhianati amanah yang ia pegang. Dengan adanya ketakwaan, seseorang akan merasa takut untuk melakukan suatu kemaksiatan karena merasa diawasi oleh Allah SWT.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik mutlak diperlukan dua hal: sistem yang baik dan pemimpin yang baik (amanah). Inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini ke depan. Jika benar-benar ingin memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara, maka harus ada perubahan secara mendasar. Sistem yang telah jelas-jelas merusak harus diganti dengan sistem yang telah terbukti pernah memberikan kesejahteraan. Harus juga ditempatkan para pemimpin yang terbukti amanah dalam menjalankan fungsi jabatannya.

Asas Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem hidup dan sistem hukum meliputi segala

perkara. Allah SWT berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan nikmat-Ku kepada kalian dan telah Kuridhai Islam menjadi agama bagi kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan kepada kamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu (QS an-Nahl [16]: 89).

Ini berarti, problematika apa saja, atau apapun tantangan yang dihadapi, akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Dinul Islam. Termasuk dalam hal kenegaraan. Sebabnya, Islam dirumuskan dengan kalimat, *"Al-Islam din wa minhu ad-dawlah* (Islam adalah agama, termasuk di antaranya adalah ajaran tentang bernegara). Ini berbeda dengan konsep sekularisme dari Barat yang memisahkan agama dan negara (*fashlud-din 'an ad-dawlah*).

Oleh karena itu, jelas agama tidak bisa dipisahkan dari negara, sebagai pemilik kekuasaan. Imam al-Ghazali mengungkapkan pentingnya agama dan negara. Beliau mengungkapkan:

[الْدِّينُ وَالسُّلْطَانُ تَوْأَمَانِ، الدِّينُ أَسُّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَسَّ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ]

Agama dan kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi niscaya runtuh dan sesuatu tanpa penjaga niscaya lenyap (Al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd).



Syariah dan Khilafah

Sistem yang baik tentu harus bersumber dari Zat Yang Mahabaiik, yakni Allah SWT. Itulah sistem Islam: syariah dan khilafah.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. untuk seluruh manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya dalam masalah akidah dan ibadah. Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam masalah akhlak, pakaian, makanan dan minuman. Islam pun mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah muamalah dan 'uqubat. Inilah ruang lingkup syariah Islam.

Syariah Islam tidak akan bisa diterapkan secara *kaffah* (menyeluruh) tanpa adanya institusi pelaksanaannya. Itulah yang disebut dengan Khilafah. Sebuah sistem Pemerintahan di dalam Islam. Warisan dari Rasulullah saw.

Sistem ini bukan sekadar teori, namun telah terbukti pernah ada. Bahkan keberadaannya diakui oleh Barat sendiri.

Sebagaimana pengakuan Will Durrant:

Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad (Will Durant – The Story of Civilization).

Ia juga menambahkan:

Pada masa pemerintahan Abdurrahman III diperoleh pendapatan sebesar 12,045,000 dinar emas. Diduga kuat bahwa jumlah tersebut melebihi pendapatan pemerintahan negeri-negeri Masehi Latin jika digabungkan. Sumber pendapatan yang besar tersebut bukan berasal dari pajak yang tinggi, melainkan salah satu pengaruh dari pemerintahan yang baik serta kemajuan pertanian, industri dan pesatnya aktivitas perdagangan (Will Durant – The Story of Civilization).

Pemimpin Amanah

Selain sistem yang baik, diperlukan sosok pemimpin yang baik. Dialah sosok yang sadar dan paham bahwa jabatan adalah amanah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ia paham sabda Rasulullah saw., “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ia juga paham bahwa hakikat kepemimpinannya adalah sebagai pelayan, bukan pemimpin yang merasa punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu terhadap yang ia pimpin. Hakikat kepemimpinan tercermin seperti ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., “*Sayyid al-qawm khadimuhum* (Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka).” (HR Abu Nu'aim).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan terciptanya kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan, haruslah menggunakan sistem yang baik. Itulah sistem Islam dengan syariah dan khilafahnya, yang dipimpin oleh seorang yang memang amanah dan bertakwa, yang disebut sebagai Imam atau Khalifah.

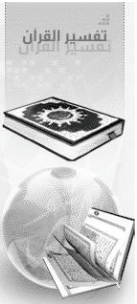
Wallahu a'lam. □



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



BUKTI KEPASTIAN HARI KIAMAT

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿١﴾ أَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مِثْلِ يَمْنَى ﴿٢﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ ﴿٣﴾ فَسَوَّى ﴿٤﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٥﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴿٦﴾

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Kemudian Allah menjadikan darinya sepasang: laki-laki dan perempuan? Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? (QS al-Qiyamah [75]: 36-40)

Di awal surat ini disebutkan tentang adanya manusia yang mengira tidak akan dikumpulkan kembali oleh Allah SWT dalam firman-Nya: *A yahsabu al-insân allan najma'u 'izhâmahu* (Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan [kembali] tulang-belulangnya?). Kemudian diulangi di akhir surat ini dengan firman-Nya: *A yahsabu al-insân an yutraka sudâ* (Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja).

Ayat-ayat selanjutnya pun memberikan jawaban berupa *hujjah* tentang kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan kembali manusia yang sudah mati.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *A yahsabu al-insân an yutraka suda[n]* (Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja). Kata *yahsabu* bermakna *yazhunnu* (menyangka, mengira, menduga). Menurut al-Qurthubi, makna

yahsabu al-insân adalah *yazhunnu ibnu Âdam* (manusia mengira atau menyangka).¹

As-Sud[an] secara bahasa berarti *al-muhmal* (diabaikan dan dilalaikan).² Dikatakan: *Asdaytu ibilîs dâ'* (Aku benar-benar membiarkan untaku). Artinya: *Ahmaltuhâ* (Aku membiarkan atau mengabaikannya).³

Dalam konteks ayat ini, ada beberapa penjelasan dari para ulama. Sebagian mengatakan bahwa *suda[n]* di sini adalah manusia dibiarkan begitu saja tanpa diberi taklif hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Di antara yang mengatakan demikian adalah Mujahid, Imam Syafi'i dan Ibnu Zaid bin Aslam. Maknanya, "Apakah manusia mengira bahwa dia tidak akan dikenai perintah dan larangan?"⁴

Menjelaskan ayat ini, Mujahid berkata, "Dia tidak diperintah dan tidak dilarang."

As-Sudi berkata, "Yang tidak diwajibkan atas dirinya satu amal dan yang tidak dikerjakan."⁵

Sebagian ahli tafsir lain mengatakan bahwa

pengertian *suda[n]* di sini adalah tidak akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, dihisab, dan diberi balasan. Begitu manusia mati, mereka dibiarkan begitu saja dan urusannya pun selesai.

Di antara yang berpendapat demikian adalah as-Sudi. Ahli tafsir itu mengatakan, maksud ayat ini adalah, “Apakah manusia mengira bahwa dirinya tidak dibangkitkan hidup kembali?”⁶

Ada pula yang mengambil semua makna itu. Ibnu Katsir berkata, “Makna lahiriah ayat ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup kedua keadaan tersebut. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa dia tidak dibiarkan begitu saja di dunia ini tanpa dikenai perintah dan larangan. Tidak dibiarkan pula di dalam kuburnya dengan sia-sia tanpa dibangkitkan kembali. Sebaliknya, dia diberi perintah dan larangan di dunia ini, lalu digiring kembali kepada Allah pada Hari Akhir setelah dibangkitkan.”⁷

Ibnu Jarir ath-Thabari juga berkata, “Apakah orang kafir itu mengira bahwa Allah akan membiarkan mereka tidak diperintah, tidak dilarang dan tidak diperintah beribadah dengan suatu ibadah?”⁸

Asy-Syaukani juga berkata, “Dibiarkan begitu saja. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak dihisab dan tidak dihukum.”⁹

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini dimaksudkan untuk menguatkan adanya Hari Kebangkitan dan sekaligus menyanggah pendapat orang yang mengingkarinya dari kalangan orang-orang yang sesat, bodoh dan pengingkar kebenaran. Karena itulah dalam firman Allah selanjutnya disebutkan bukti yang menunjukkan adanya Hari Kebangkitan, dengan menyebutkan penciptaan manusia dari permulaannya.¹⁰

Kemudian Allah SWT berfirman: *Alam yaku nuthfat[an] min maniyy yumnâ* (Bukankah dia dulu setetes mani yang ditumpahkan). Ayat ini menegaskan bahwa manusia sebelumnya benar-benar merupakan *nuthfah*. Ayat ini mengingatkan manusia tentang asal-usulnya. *Istifhâm* atau kalimat tanya dalam ayat ini bermakna *at-taqrîr*

(menetapkan). Artinya, manusia sebelumnya benar-benar adalah setetes mani yang ditumpahkan.

Secara bahasa, kata *an-nuthfah* awalnya bermakna *al-mâ' al-qalîl* (air yang sedikit). Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut air mani yang sedikit dari tulang sulbi laki-laki.¹¹

Disebutkan bahwa tetesan air mani itu *yumnâ* (ditumpahkan), yakni ditumpahkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Itulah asal-usul manusia. Ibnu Katsir berkata, “Tidakkah manusia ingat bahwa asal dirinya adalah *nuthfah* yang lemah dari air yang hina, yang dipancarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita.”¹²

Tentang air mani dipancarkan atau ditumpahkan juga disebutkan dalam beberapa ayat lainnya, seperti dalam QS an-Najm [53]: 46 dan al-Waqi'ah [56]: 58.

Kemudian dilanjutkan: *Tsumma kâna 'alaqah fakhalaqa fasawwâ* (Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya).

Setelah sebelumnya hanya berupa air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim wanita, kemudian air mani itu berubah menjadi *'alaqah* (gumpalan darah). Lalu Allah SWT menciptakan dan menyempurnakannya. Pengertian *fakhalaqa* (Lalu Dia menciptakan) adalah meniupkan ruh. *Fasawwâ* (dan menyempurnakannya), berarti menyempurnakan organ-organ tubuhnya. Menurut Fakhruddin ar-Razi, ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Muqatil.¹³

Kemudian Allah SWT berfirman: *Faja'ala minhu al-zawjayni adz-dzakara wa al-untsâ* (Lalu Allah menjadikan darinya sepasang: laki-laki dan perempuan). *Dhamîr al-hâ'* pada kata *minhu* (darinya) kembali kepada *al-insân* (manusia). Artinya, dari manusia.¹⁴ Dengan demikian ayat ini memberitahukan bahwa dari manusia itu dijadikan dua jenis yang berpasangan. Dua jenis itu adalah *adz-dzakara wa al-untsâ*, yang berarti *ar-rajul wa al-mar'ah* (laki-laki dan manusia).¹⁵

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Allah menjadikan dari manusia itu—setelah Dia sempurnakan—makhluk sempurna yang memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan.”¹⁶

Realitas itu merupakan bukti tak terbantahkan tentang kekuasaan Allah SWT. Bukti itu pun dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan manusia kembali sesudah kematiannya sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya: *Alaysa dzâlika biqâdir[fin] an yuhyiya al-mawtâ* (Bukankah [Allah yang berbuat] demikian berkuasa [pula] menghidupkan orang mati). Huruf *hamzah* di awal ayat ini merupakan *istifhâm* (kalimat tanya). Susunan pertanyaan demikian menggiring pihak yang ditanya untuk membenarkan dan menetapkan kalimat yang disebutkan sesudahnya.

Menurut al-Qurthubi, firman-Nya: *Alaysaa dzâlika biqâdir[fin]* maksudnya: Bukankan Zat Yang berkuasa menciptakan gumpalan darah dari tetesan air itu, *biqâdir[fin] an yuhyiya al-mawtâ*, maksudnya: berkuasa pula mengembalikan tubuh tubuh ini seperti semula pada Hari Kebangkitan setelah hancur.¹⁷

Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Maksudnya, bukankah yang bisa melaksanakan hal itu—yang telah menciptakan manusia dari air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, hingga berubah menjadi manusia yang memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan—memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dari kematian mereka; membuat mereka sebagaimana mereka sebelum kematian mereka.”¹⁸

Ditegaskan juga, “Telah dipahami bahwa yang mampu menciptakan manusia dari air mani yang dipancarkan, hingga mengubahnya menjadi manusia yang sempurna, tidak akan kesulitan untuk menghidupkan yang sudah mati.”¹⁹

Ibnu Katsir berkata, “Artinya, bukankah Tuhan yang menciptakan makhluk yang sempurna ini dari *nutfah* yang lemah berkuasa pula untuk mengembalikannya hidup seperti semula ketika

Dia menciptakannya?”²⁰

Bahkan Allah SWT berfirman:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

*Dialah Yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)-nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Dia (QS ar-Rum [30]: 27).*²¹



Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran penting. Di antaranya: *Pertama*, manusia tidak dibiarkan sia-sia begitu saja. Sebagaimana telah dijelaskan, ayat ini merupakan bantahan dan celaan bagi orang yang menganggap manusia dibiarkan terabaikan. Maksudnya, manusia tidak diberi taklif hukum ketika di dunia serta tidak dimintai pertanggungjawaban dan diberikan balasan di akhirat. Mahasuci Allah SWT dari segala kesia-siaan (Lihat juga QS al-Mukminun

[23]: 115).

Yang terjadi justru sebaliknya. Setelah diciptakan, manusia diberi taklif hukum yang wajib ditaati selama hidup di dunia. Setelah mati, manusia akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi pada Hari Kiamat untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban serta diberi balasan atas keterikatan dengan hukum yang ditaklifkan ketika hidup di dunia.

Kedua, ayat ini mengingatkan asal-muasal



Setelah diciptakan, manusia diberi taklif hukum yang wajib ditaati selama hidup di dunia. Setelah mati, manusia akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi pada Hari Kiamat untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban serta diberi balasan atas keterikatan dengan hukum yang ditaklifkan ketika hidup di dunia.

manusia. Sebelumnya manusia hanyalah tetesan air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian dijadikan segumpal darah. Lalu diciptakan dan disempurnakan menjadi manusia yang memiliki nyawa. Juga, bisa mendengar, melihat, berbicara dan memiliki akal. Semua itu tidak terjadi dengan sendiri. Juga bukan atas kehendak dan kekuasaan dia atau orangtuanya. Semuanya itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah SWT. Karena itu sungguh keterlaluhan jika ada manusia yang mengingkari Allah, apalagi

menjadi musuh-Nya (Lihat: QS Yasin [36]: 77).

Ketiga, jenis manusia: laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa ayat lainnya (Lihat, misalnya, QS al-Lail [92]: 3; QS al-Naba [78]: 8).

Dengan demikian jelas, manusia yang diciptakan Allah SWT hanya terdiri dari dua jenis. Tidak ada jenis yang lain.

Keempat, bukti kekuasaan Allah SWT dalam menghidupkan manusia kembali sesudah mati. Jika Allah SWT mampu menciptakan manusia dan menghidupkan manusia dari tetesan air mani, maka untuk menghidupkannya kembali tentu jauh lebih mampu (Lihat: QS ar-Rum [30]: 27).

Ini adalah sesuatu yang amat diterima oleh akal sehat. Karena itu tidak ada alasan sama sekali bagi manusia menolak dan mengingkari adanya Hari Kebangkitan dan Hari Kiamat.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: al-Maktabah al-Mishriyyah, 1992), 116
- ² Abu Bakar al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 145; Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arab*, 14 (Beirut: Dar Shadir, 1994), 374; al-Syaukani, *Fat-ha al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1994), 411; al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 737
- ³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 737
- ⁴ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 116
- ⁵ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 83
- ⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 283
- ⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283
- ⁸ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 82
- ⁹ al-Syaukani, *Fat-ha al-Qadîr*, vol. 5, 411
- ¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283
- ¹¹ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 83
- ¹² Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283
- ¹³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 737
- ¹⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 117
- ¹⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 117
- ¹⁶ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 83
- ¹⁷ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 117
- ¹⁸ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 83
- ¹⁹ al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 84
- ²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283
- ²¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 8, 283

MENANGKAL RESESI SECARA ISLAMI

Kekhawatiran terhadap resesi di AS meningkat dalam beberapa bulan terakhir akibat perang perdagangan AS-Cina yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang meyakinkan. Beberapa negara yang memiliki keterkaitan dengan kedua negara itu juga mulai merasakan dampaknya. Pembicaraan antara Washington dan Beijing memang telah menunjukkan kemajuan meskipun, sebagaimana sebelumnya, hal itu bukan jaminan akan mencapai akhir yang positif. Apalagi menjelang pemilihan presiden AS tahun 2020, isu ini akan menjadi bahan kampanye kesuksesan Trump—presiden pertama AS yang berani melawan kedigdayaan Cina di bidang perdagangan. Namun yang pasti, industri manufaktur AS kini telah mengalami pertumbuhan negatif selama tiga bulan berturut-turut.

Indikasi Resesi

NBER, sebuah organisasi riset ekonomi swasta berbasis di Amerika Serikat, mendefinisikan resesi ekonomi sebagai penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri serta

penjualan grosir dan eceran. Di Inggris dan negara-negara Uni Eropa, resesi didefinisikan dengan pertumbuhan negatif ekonomi dalam dua kuartal secara berturut-turut. Resesi yang parah seperti pertumbuhan ekonomi yang turun 10 persen atau lebih atau berkepanjangan selama tiga atau empat tahun dapat disebut sebagai depresi ekonomi.

Menurut IMF, resesi global merupakan siklus yang berlangsung setiap delapan hingga 10 tahun sekali. IMF menyatakan bahwa pertumbuhan PDB global sebesar tiga persen pertahun atau kurang dapat dikategorikan sebagai resesi global. Dengan demikian, sejak 1970 beberapa yang masuk kategori ini adalah: 1974–1975, 1980–1983, 1990–1993, 1998, 2001–2002 dan 2008–2009. Meskipun demikian, jumlah tersebut adalah yang berskala global, bukan resesi yang terjadi dalam skala negara. Di AS saja, sejak tahun 1929 hingga 2009, telah terjadi 14 kali resesi dengan magnitude yang bervariasi.

Adapun dampak resesi di antaranya pengangguran meningkat tajam, produktivitas bisnis turun, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang lemah, serta menurunnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemicu Resesi

Penyebab resesi sangat beragam. Di antaranya adalah turunnya kepercayaan investor dalam berinvestasi akibat risiko yang semakin tinggi. Merosotnya kepercayaan investasi tersebut mendorong turunnya kepercayaan konsumen dalam berbelanja. Mereka kemudian mengurangi porsi belanja mereka. Penjualan retail akhirnya ikut melambat. Pada akhirnya, pelaku bisnis mengurangi penyerapan tenaga kerja mereka.

Penyebab lainnya adalah suku bunga yang naik tinggi. Likuiditas atau uang yang tersedia untuk diinvestasikan menjadi semakin terbatas. Bank-bank sentral lazimnya menerapkan suku bunga tinggi untuk menjaga agar nilai tukar mata uang tidak melemah lebih dalam. Pada tahun 1980, misalnya, The Fed telah menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi yang tinggi dan mengungkit stagnasi ekonomi (stagflasi), serta menjaga nilai tukar dolar AS. Namun, kebijakan itu justru menyebabkan resesi bahkan dampak yang lebih buruk: depresi.

Gelembung aset finansial yang meledak juga menjadi penyebab terjadinya resesi. Bentuknya adalah harga aset yang menjadi objek spekulasi, seperti saham dan properti, naik berlipat-lipat. Contohnya adalah resesi yang terjadi akibat meledaknya saham-saham internet pada tahun 2000. Krisis 2008 yang kemudian menyebabkan resesi juga disebabkan oleh penurunan aset secara tajam, yakni turunnya harga surat-surat berharga terutama yang berasal dari kredit perumahan kelas bawah (*subprime mortgage*). Harga aset yang turun tajam tersebut membuat para investor merugi terutama perbankan, perusahaan asuransi, dan pihak-pihak yang menginvestasikan modal mereka pada aset tersebut. Dampaknya, perusahaan-perusahaan berguguran, pengangguran naik dan pendapatan masyarakat turun tajam.

Kerapuhan sektor finansial, yang rentan terkena krisis dan berujung resesi tersebut, juga diperburuk oleh perilaku curang para pengelola investasi di sektor tersebut. Krisis Tabungan dan Pinjaman yang menyebabkan resesi tahun 1990 disebabkan oleh pengelola investasi menanam dana yang mereka kelola pada aset-aset yang ilegal, pinjaman fiktif dan investasi yang melanggar hukum. Saat itu, lebih dari 1.000 bank, yang memiliki total aset \$ 500 miliar, rugi besar.

Peran pemerintah dan legislator juga mendukung terjadinya resesi dengan mencabut aturan yang membatasi para investor untuk berinvestasi. Salah satu contohnya adalah penghapusan *Glass-Steagall Act*. Undang-undang ini melarang penggabungan bank komersial dan bank investasi, yang dibuat untuk mencegah berulangnya depresi tahun 1929. Namun, tahun 2000 regulasi itu dicabut atas inisiatif para pelaku di sektor keuangan. Benar saja, investasi perbankan tumbuh tak terbendung. Hulunya adalah krisis keuangan yang menyebabkan resesi global tahun 2008.

Penyebab resesi lainnya adalah penciptaan uang besar-besaran dalam waktu singkat. Seperti diketahui, selain diproduksi oleh bank sentral, uang juga diciptakan oleh sektor perbankan. Jumlah yang diciptakan oleh sektor perbankan bahkan jumlahnya berlipat-lipat dari uang kertas dan giral yang diciptakan oleh bank sentral. Sebagai catatan, di Indonesia, jumlah uang kertas dan koin yang dicetak oleh Bank Indonesia hanya sekitar 13 persen dari total yang beredar (M2). Sisanya diciptakan oleh sektor perbankan melalui pemberian kredit (*credit money*). Penciptaan uang cepat tersebut, khususnya di saat *booming*, sebagian besar justru digunakan untuk berspekulasi di pasar keuangan termasuk di sektor properti. Pada periode tahun 2000-2007, bank-bank di AS berebutan memberikan kredit investasi di sektor properti.



Booming di sektor tersebut menyulut keserakahan investor untuk membeli surat-surat berharga yang berbasis perumahan (*subprime mortgage*) dan produk-produk turunannya hingga tinggi menjulang. Gelembung tersebut akhirnya meledak. Harga turun tajam. Bank-bank lalu memangkas pinjaman mereka secara drastis sehingga menyebabkan resesi ekonomi. Sementara itu, debitur tetap menanggung utang yang semakin berlipat nilainya. Uang kemudian dipompa oleh bank sentral dalam jumlah besar untuk mengatasi resesi. Celakanya, perbankan malah menggunakan likuiditas tersebut untuk berspekulasi di pasar komoditas. Harga minyak, pangan, hingga logam membumbung tinggi. Rakyat di negara-negara importir menjerit-jerit akibat harga naik tinggi.

Sebagai tambahan, meskipun sebagian besar resesi berhulu di sektor keuangan, sebagian resesi juga timbul dari kegiatan di sektor riil yang dipompa berlebihan. Contohnya adalah resesi setelah Perang Dunia II tahun 1945 dan resesi yang terjadi pasca Perang Korea tahun 1953. Resesi yang menimpa Hong Kong saat ini terjadi akibat demonstrasi yang berlarut-larut yang membekukan kegiatan ekonomi di negara itu, di samping dampak dari eskalasi perang dagang AS-Cina.

Mencegah Resesi

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa resesi merupakan persoalan tipikal dalam sistem kapitalisme, terutama yang berasal dari sistem keuangannya. Sistem keuangan tersebut telah menjadi sarana spekulasi untuk mengejar profit dari investasi pada deposito dan surat-surat berharga di pasar modal. Sistem tersebut juga ditopang oleh kemudahan dalam memproduksi mata uang, baik oleh bank sentral (*currency*) ataupun perbankan (*credit money*), yang dapat diciptakan dengan mudah, dengan jumlah

gigantik, dan dalam waktu singkat.

Fenomena tersebut tentu tidak akan dijumpai di dalam Islam. Pasalnya, karakter sistem ekonomi Islam sangat kontras dengan sistem kapitalisme. Dengan demikian, potensi resesi dalam negara yang menerapkan Islam secara paripurna akan sangat kecil.

Secara singkat, terdapat beberapa pilar ajaran Islam yang menutup celah munculnya resesi terutama yang bersumber dari sistem keuangan. Di antaranya:

- a. Islam mengharamkan transaksi riba. Riba merupakan transaksi yang tidak sehat secara ekonomi. Alasannya, antara lain terciptanya kezaliman dalam masyarakat. Pasalnya, pemilik modal baik individu, institusi seperti bank, dan negara, mendapatkan pendapatan secara pasti tanpa harus menanggung risiko. Sebaliknya, peminjam harus membayar bunga meskipun mengalami kerugian dari uang pinjamannya. Ini berarti terjadi hubungan yang tidak seimbang. Dalam Islam, pinjaman dikategorikan sebagai aktivitas sosial (*tabarru'at*), yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Islam mendorong pihak kreditor untuk memberikan tempo penundaan pembayaran dan bahkan penghapusan kredit jika debitur mengalami kesulitan. Pada level negara, Baitul Mal menyediakan pos khusus untuk memberikan bantuan modal bagi pihak yang membutuhkan, seperti para petani dan pedagang.
- b. Islam mengharamkan pasar modal, keuangan, komoditas berjangka yang dibangun atas transaksi-transaksi yang bertentangan dengan Islam. Di dalam Islam, misalnya, transaksi di pasar komoditas dilarang. Alasannya, transaksi penjualan komoditas dapat berpindah tangan dalam waktu singkat sebelum

dikuasai oleh penjualnya dan bahkan belum dimiliki oleh penjual tersebut. Selain itu, haram pula memperdagangkan surat-surat berharga yang melibatkan transaksi yang batil, seperti obligasi berbunga, produk keuangan multi akad, dan saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Islam juga mengharamkan semua sarana perjudian dan manipulasi keuangan.

- c. Islam menjadikan mata uang emas dan perak sebagai standar moneter. Mata uang yang beredar adalah emas dan perak atau mata uang kertas atau logam yang nilainya ditopang oleh emas dan perak. Dengan demikian kestabilan uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak yang sepanjang sejarahnya sangat stabil. Di tambah lagi, nilai tukar mata uang akan stabil karena basis transaksinya adalah emas dan perak yang nilainya stabil. Transaksi perdagangan, transfer modal dan biaya perjalanan lintas negara pun akan lebih lancar dan stabil. Saat yang sama, sistem mata uang tersebut menegaskan peran perbankan dalam menciptakan dan melipatgandakan uang (*deposit money*) melalui kredit dan pembelian surat-surat berharga, seperti pada perbankan yang tumbuh dalam sistem kapitalisme, baik yang konvensional ataupun yang bermerek syariah.
- d. Islam mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas (*free market*). Kebebasan memiliki dalam kapitalisme berarti tiap individu bebas untuk menguasai atau menjual komoditas apa saja yang dianggap sebagai barang ekonomi. Akibatnya, saham-saham perusahaan yang memproduksi migas dan mineral seperti emas dan tembaga, misalnya, dapat dengan mudah dikuasai

dan diperjualbelikan oleh para investor, termasuk asing. Dampak lainnya, indeks saham dan nilai tukar bergerak liar. Di dalam Islam, konsep kepemilikan diatur tegas. Secara ringkas, kepemilikan dibagi menjadi: kepemilikan swasta, publik dan negara. Barang-barang yang masuk kategori milik publik, seperti minyak, tambang, energi dan listrik hanya boleh dikuasai negara, yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, haram memperjualbelikan barang-barang milik umum kepada swasta.

- e. Islam mewajibkan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu pangan, pakaian dan perumahan; termasuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Termasuk pula menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Dengan demikian, ketika terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan, misalnya, oleh kekeringan yang berkepanjangan atau bencana dalam skala besar, pemerintah tetap wajib menjamin agar kebutuhan dasar masyarakat di atas tetap terpenuhi. Ini berbeda dengan sikap pemerintah dalam sistem kapitalisme yang membiarkan rakyat mereka menggelandang dan mengemis, termasuk di saat ekonomi mereka diterpa resesi.

Alhasil, negara-negara yang tetap kukuh menerapkan sistem kapitalisme mustahil selamat dari bencana ekonomi yang menyebabkan resesi. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menangkal terjadinya hal tersebut adalah menerapkan ajaran Islam secara paripurna dalam sebuah sistem pemerintahan, yaitu Khilafah Islam—konsep yang telah disepakati kewajibannya oleh para sahabat Nabi dan para ulama-ulama terdahulu.

Wallâhu a'lam bis-shawâb. [Muis]



DAKWAH RASULULLAH SAW. ERA MAKKAH

Dakwah menyeru manusia kepada Allah dengan *hujjah* yang nyata adalah jalan dan *minhâj* kehidupan Rasulullah saw. dan orang-orang yang mengikuti beliau.¹ Siapa saja yang memilih jalan ini seharusnya sadar sejak awal bahwa dia akan menghadapi berbagai gangguan. Sebagaimana kata Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, istri beliau:

[لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا غَوِي]

Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa melainkan akan disakiti.²

Tiga belas tahun sejak Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai rasul, beliau menjalankan dakwah di Makkah tanpa kekuasaan politik yang menerapkan Islam dan melindungi dakwah. Berbagai penentangan dihadapi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga hal: 1) penyiksaan fisik (*ta'dzîb*); 2) propaganda (*da'âwah*); dan 3) pemboikotan (*muqâtha'ah*). Berbagai bujukan dan rayuan juga ditebar untuk

membelokkan arah dakwah.

Abu Lahab melempari Rasulullah saw. dengan batu saat beliau menyampaikan dakwah di Pasar Dzul Majâz³. 'Uqbah bin Abi Mu'aith melemparkan kotoran unta ke punggung beliau saat beliau sedang sujud di Baitullah.⁴ Beliau juga pernah mau diinjak lehernya saat sedang sujud. Demikian juga berbagai siksaan lainnya.

Sahabat-sahabat beliau tidak luput dari siksaan. Bahkan ada yang dibunuh seperti Yasir dan Sumayyah. Bilal dijemur di bawah terik matahari dan diletakkan batu besar di atas dadanya.⁵ Begitu juga Khabbab bin al-Arrat, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, 'Ammar, Utsman bin Madh'un. Bahkan 'Umar *ra.* pernah mengalami penganiayaan di jalan dakwah ini.

Tidak cukup penganiayaan, propaganda pun mereka rancang. Sebelumnya Abu Lahab membuat propaganda mandiri, memprovokasi orang-orang setelah didakwahi Nabi saw. dengan mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوهُ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ

Wahai manusia, jangan taati dia, sungguh

*dia itu pendusta.*⁶

Agar propaganda lebih efektif, Al-Walid bin al-Mughirah, pembesar Bani Makhzum, mengumpulkan para tokoh Quraisy untuk menyatukan propaganda. Di antara ucapannya saat membuka diskusi, “*Bersepakatlah dalam satu pendapat (yakni tentang tuduhan buruk kepada Nabi Muhammad), janganlah kalian berselisih sehingga sebagian akan mendustakan sebagian yang lain, perkataan sebagian kalian akan menolak perkataan sebagian yang lain.*”⁷

Akhirnya, disepakatilah satu tuduhan yang dipaksakan untuk Nabi Muhammad: tukang sihir!

Pemboikotan total juga dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka menulis selembarnya kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abdil-Muththalib. Tidak boleh menolong mereka. Tidak boleh menikah dengan mereka atau menikahkan dari mereka. Juga tidak boleh menjual-beli dengan mereka.⁸ Pedagang luar yang datang ke Makkah pun mereka upayakan agar tidak menjual beli dengan kaum Muslim. Abu Lahab berkata, “*Wahai para pedagang! Naikkan harga barang kalian kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga mereka tidak bisa membeli apapun. Kalian semua sudah mengetahui kekayaanku. Kalian pun sudah tahu bahwa aku akan menepati jaminanku. Akulah penjamin kalian. Kalian tidak akan rugi.*”⁹

Mengapa penentangan tersebut terjadi, padahal beliau memiliki *track record* yang cemerlang, bahkan beliau digelari *al-amîn* (orang yang dapat dipercaya)? Tidak lain itu karena sifat dakwah yang beliau sampaikan. Di antara sifat dakwah beliau adalah:

1. Proaktif (*Sâfiran*).

Beliau tidak menyimpan risalah dari Tuhannya hanya untuk kalangan sendiri.

Sebaliknya, beliau sibuk mengunjungi tempat-tempat berkumpulnya manusia, baik itu pasar, tenda-tenda jamaah haji, maupun mengunjungi siapa saja dalam rangka mendakwahi dan mengajak mereka kepada ajaran Islam. Ini pula yang terjadi dengan Abu Bakar ra. Beliau diberi perlindungan oleh Ibnu Daghinah dengan syarat tidak menunjukkan aktivitas keislamannya di depan publik. Namun, beliau memilih menunjukkan aktivitas keislamannya di depan publik dan melepaskan perlindungan tersebut.¹⁰

2. Argumentatif (*Fikriyyah*).

Beliau juga menentang dan menantang semua keyakinan rusak yang saat itu sedang *trend* di tengah-tengah masyarakat. Dalam melakukan itu beliau mengedepankan bukti dan argumen bukan sentimen. Misalnya beliau menyampaikan firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاذْكُرُوا لَهُ﴾

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu (QS al-Hajj [22]: 73).

Allah SWT menggunakan kalimat pasif “telah dibuat perumpamaan (*dhuriba matsal[un]*)” seakan Dia ingin menyatakan, “jangan kalian perhatikan siapa yang bicara, tetapi pikirkan saja apa yang dibicarakan.” Ini adalah seruan agar manusia berpikir tanpa bias dan sentimen. Untuk sesaat tidak usah diperhatikan bahwa ini adalah al-Quran, ini Islam, atau ini dari Tuhannya Muhammad saw. Setelah itu objek berpikirnya disampaikan, yakni sesembahan kalian tidak akan bisa membuat walau seekor lalat, dan tidak bisa melawan seekor lalat. Layakkah yang seperti itu dipertuhankan?

3. Bersifat Politik (*Siyâsiyyah*).

Politik adalah pengaturan urusan umat di

dalam dan luar negeri. Negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut.¹¹

Dakwah yang dilakukan Nabi saw. bukanlah sekedar membahas apa yang terkait dengan hal privat seseorang dengan Tuhannya semata. Dakwah beliau juga bersifat politik, dalam arti meluruskan dan menentang kebijakan para penguasa (pemimpin masyarakat) saat itu yang bertentangan dengan Islam. Beliau juga membongkar persekongkolan para pemimpin Quraisy. Misalnya, terkait Al-Walid bin al-Mughirah Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾

Sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang dia tetapkan). Maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? (QS al-Muddatsir [74]: 18-19).

Begitu juga Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak luput dari celan Nabi saw.

4. Tanpa Kekerasan (La 'Unfiyyah).

Walaupun siksaan fisik diterima, bahkan ada yang dibunuh, selama era Makkah Rasulullah tidaklah melakukan kekerasan fisik. Beliau tidak menghancurkan berhala-berhala yang ada atau melakukan penyerangan balasan. Abdurrahman bin 'Auf dan para sahabatnya pernah datang menemui Rasulullah, lalu mengadu, *"Wahai Rasulullah, dulu kami kuat dan mulia saat kami musyrik, ketika kami beriman jadilah kami hina."* Rasulullah menjawab:

﴿إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا﴾

*Aku diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Karena iyu janganlah kalian berperang.*¹²

Refleksi Dakwah Rasulullah Saat Ini

Kesabaran, itulah di antara hal terpenting yang bisa kita contoh dari dakwah Nabi saw. Kesabaran tercermin dengan tidak berkeluh-kesah menghadapi berbagai penentangan. Semua itu adalah hal yang wajar bahkan bisa dibilang 'konsekuensi' dakwah yang lurus jika berada dalam masyarakat yang tidak islami. Justru aneh jika dakwah kita dalam masyarakat yang sistemnya rusak itu disukai oleh semua orang. Jika ini terjadi, bisa jadi ada yang keliru dalam dakwah atau diri pengembannya. Imam Sufyan ats-Tsauri (w. 161 H) berkata:

[إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِيَّ مُحِبًّا فِي حَيْرَانِهِ، مُحَمَّدًا عِنْدَ إِخْوَانِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُدَاهِنٌ.]

*Jika kamu melihat seseorang qâri ('ulama) disukai oleh (semua) tetangganya dan dipuji oleh (semua) teman-temannya, maka ketahuilah bahwa dia adalah penjiilat.*¹³

Kesabaran juga tercermin dengan menetapkan jalan (*tharîqah*) dakwah Nabi saw. Proaktif mendatangi masyarakat untuk menyampaikan dakwah ini. Mendiskusikan dengan mereka secara argumentatif. Menghindari akhlak yang buruk dalam berdiskusi. Namun demikian, tidak takut mengkritik kebijakan siapa saja yang bertentangan dengan Islam dan tidak ragu membongkar persekongkolan siapa saja yang menentang dakwah.

Kesabaran juga tercermin dengan senantiasa membersihkan diri dari kemaksiatan, baik maksiat fisik maupun hati. Menautkan setiap aktivitas dakwah dan menyandarkannya kepada Allah SWT semata. Dialah sebenarnya yang bisa membuka atau menutup hati manusia untuk menerima atau menolak dakwah ini.

Makar apapun yang dilakukan penentang dakwah tidak akan bisa menghentikan fajar kebangkitan Islam. Bahkan Allah bisa

mengubah penentang menjadi penopang. Ketika istri Amir bin Rabi'ah melihat Umar bin al-Khaththab dan mengharapkan keislaman Umar, maka Amir berkata kepada istrinya:

[فَلَا يُسْلِمُ الَّذِي رَأَيْتَ حَتَّى يُسْلِمَ جَمَارُ الْحَطَّابِ]

Tidak akan masuk Islam orang yang telah kau lihat sebelum keledainya memeluk Islam terlebih dulu!⁴

Amir berkata begitu karena melihat begitu keras dan kasarnya Umar dalam menentang Islam. Namun, Allah berkehendak lain. Justru pada akhirnya Umar menjadi tokoh besar dalam Islam.

Tiga belas tahun kafir Quraisy menganiaya, mencaci, menyiksa, menuduh, memboikot dan bahkan mengatur strategi untuk membunuh Rasulullah saw. Belasan kabilah menolak dakwah Rasulullah. Namun demikian, semua itu justru mengantarkan pada penemuan mutiara cemerlang, para Yatsrib yang cukup 'hanya' dijanjikan surga, tanpa janji duniawi lainnya, mereka siap sedia *all out*. Lenyapnya seluruh harta dan terbunuhnya para ksatria tidak akan membuat mereka mundur dari ikrar setia untuk menjaga keberlangsungan dakwah Nabi saw.¹⁵

Melihat geliat dakwah di Nusantara ini, sepertinya apa yang tergambar dalam sirah Nabi saw. sedang terulang. Tidakkah kita lihat bagaimana persekusi terhadap dakwah yang massif, bendera Rasulullah di-*framing* keji, Khilafah yang merupakan Ijmak Sahabat dan para ulama sepakat akan kewajibannya dianggap negatif dan diasosiasikan dengan radikal fundamentalis. Namun demikian, semakin hal tersebut diserang, makin muncul generasi umat yang siap membela. Bahkan segmen-segmen masyarakat yang dulunya menutup diri sekarang justru makin membuka diri dan siap berjuang bersama. Sebaliknya, orang-orang yang menentang sibuk mengurus

kepentingan duniawinya dan sebagian dipusingkan oleh KPK. Tidakkah ini cukup jadi pelajaran? Allah SWT berfirman:

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾

Sungguh mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Sungguh makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya (QS Ibrahim []: 46).

Oleh sebab itu, yang dibutuhkan dalam dakwah ini hanyalah keseriusan untuk terus mengkaji, dibarengi dengan keikhlasan dan kesabaran untuk tetap menyampaikan ajaran Islam itu apa adanya, serta berusaha istiqamah hingga akhir hayat. Masalah orang lain mau menerima atau menolak atau bahkan memusuhi, serahkan semuanya kepada Allah SWT.

Wallâhu a'lam bi ash-shawab. [Taufik NT]

Catatan kaki:

- ¹ Al Qurthuby, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'an* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1964), Juz 9, hlm 274.
- ² Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Dâr Tuq al-Najah, 1422), Juz 1, hlm. 7.
- ³ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1998), Juz 14, hlm. 518.
- ⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, hlm. 104.
- ⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim* (Dâr Thayyibah, 1999), Juz 4, hlm. 606.
- ⁶ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 14, hlm. 518.
- ⁷ Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah* (Mesir: Musthafa al-Bâbi, 1955), Juz 1, hlm. 270.
- ⁸ Ibid., Juz 1, hlm. 350.
- ⁹ Ibid., Juz 1, hlm. 377.
- ¹⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, hlm. 98.
- ¹¹ Taqiuddin al-Nabhani, *Mafâhîm Siyâsiyah Li Hizb Al-Tahrir*, Cet. III. (Jakarta: HTI-Press, 2009), hlm. 7.
- ¹² Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Nasa-i, *Sunan Al-Nasa-i*, Cet. II. (Halb: Maktab al-Mathbû'ât al-Islamiyyah, 1986), JUz 6, hlm. 2.
- ¹³ Abu Laits al-Samarkandi, *Tanbih Al-Ghâfilin*, Cet. III. (Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 2000), hlm. 95.
- ¹⁴ Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, Juz 1, hlm. 343.
- ¹⁵ Al-Baihaqi, *Dalâil Al-Nubuwwah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1405), Juz 2, hlm. 222.

BENARKAH KHILAFAH SUDAH BASI?

Soal:

Ada yang mengatakan bahwa Khilafah adalah sistem pemerintahan yang sudah basi. Sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam kehidupan modern. Benarkah demikian?

Jawab:

Khilafah basi atau tidak sebenarnya terkait dengan masalah keyakinan pada hukum Islam. Khilafah adalah bagian dari hukum Islam. Jika mengatakan Khilafah ini sudah basi artinya sama dengan mengatakan hukum Islam, atau hukum Allah ini basi. Mengatakan hukum Islam itu basi sama dengan mengatakan seolah-olah Allah Zat Yang Mahatahu dan Mahaadil itu bodoh. *Na'ûdzubillâh*.

Para ulama sepakat bahwa mencela Allah, ayat dan hukum-Nya, jika dinyatakan oleh seorang Muslim, dan lahir dari keyakinan, hukumnya kafir dan murtad. Allah berfirman:

﴿وَلَعِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

Jika kamu bertanya kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, "Sungguh kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?" Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman." (QS at-Taubah [9]: 65-66).



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

Imam Ishaq bin Rahawih *rahimahullâh* menyatakan, "Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang mencela Allah *‘Azza wa Jalla*, atau mencela Rasulullah saw., atau menolak apa yang diturunkan oleh Allah, atau membunuh salah seorang nabi Allah, meski dia masih mengakui apa yang Allah turunkan, maka dia kafir." (Pendapat ini dinukil Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya, *Ash-Sharim al-Maslul*, hlm. 9).

Jika ada yang mengatakan, bukankah Islam itu bersifat fleksibel (elastis) dan berjalan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau politik pada setiap waktu dan tempat? Artinya, Islam itu berkembang agar implementasi hukum-hukumnya sejalan dengan kejadian, kondisi dan tuntutan manusia yang telah menjadi tradisi dewasa ini. Mereka berdalih, anggapan itu didasarkan pada satu kaidah, yang menurut mereka merupakan kaidah syariah. Kaidah itu berbunyi:

[لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ]

Tidak bisa ditolak adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.

Berdasarkan kaidah yang keliru inilah mereka kemudian melakukan aktivitas berdasarkan realita yang ada. Mereka bertindak sesuai dengan tuntutan keadaan. Jika mereka diingatkan dengan hukum-hukum syariah, mereka mengatakan bahwa hukum-hukum itu hanya khusus untuk waktu tertentu, sedangkan Islam mengharuskan umatnya untuk terus menyesuaikan diri dengan zaman dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan zaman dan tempat.

Akibatnya, mereka membolehkan adanya bank-bank yang menjalankan sistem riba dan perseroan terbatas (PT). Mereka menyatakan,

Khilafah sudah usang. Saat ini yang lebih relevan adalah sistem demokrasi. Begitu seterusnya. Mereka juga mengatakan, hukum poligami kini tidak relevan lagi karena tidak lagi bisa diterima pada zaman ini. Hukum potong tangan, atau rajam, tidak perlu lagi dibahas dan dipelajari. Hukum-hukum itu sudah kedaluwarsa, dan tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman.

Demikianlah “kaidah-kaidah” ini terus didengungkan di tengah-tengah umat Islam ketika mereka mulai berpaling dari Islam, merobohkan pondasi dan sendi-sendinya, serta melenyapkan peraturan-peraturan dan simbol-simbolnya. Ide-ide seperti ini mulai muncul pada akhir abad kesembilan belas, pada saat pemikiran umat ini anjlok dari puncak kejayaannya. Kaum imperialis pun seperti mendapatkan santapan yang lezat hingga akhirnya pemahaman kaum Muslim sampai ke tingkat seperti ini.

Syariah Islam adalah tata-aturan dari Allah untuk memecahkan problem kehidupan umat manusia. Hukum-hukum itu telah diberikan oleh *Asy-Syâri'* melalui al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum syariah dalam Islam. Karena itu hukum Syariah didefinisikan sebagai seruan *Asy-Syâri'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian hukum syariah harus digali dan dipastikan bersumber dari seruan *Asy-Syâri'*. Berarti harus digali dari nas, yang tidak lain adalah al-Qur'an dan as-Sunnah atau sumber yang telah disahkan oleh keduanya, seperti Ijmak Sahabat dan Qiyas. Karena itulah sumber hukum syariah Islam itu hanya ada dua: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dari kedua sumber ini kemudian digali berbagai pemecahan atas berbagai problem yang dihadapi oleh manusia serta mengatasi berbagai perselisihan di antara sesama mereka.

Apakah zaman dan tempat itu bisa menjadi sumber hukum layaknya al-Kitab atau as-

Sunnah? Atas dasar apa seseorang dapat mengatur problemnya sendiri atau masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri? Padahal Allah SWT telah mewajibkan mereka untuk mengambil solusi problem kehidupan mereka dari hukum-hukum yang digali dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sesungguhnya syariah Islam diturunkan untuk menyelesaikan problem manusia. Syariah mengharuskan manusia untuk mempelajari fakta problem tersebut, kemudian mencari hukum Allah yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan cara menggantinya dari al-Quran dan as-Sunnah, atau dari sumber yang telah disahkan oleh keduanya.

Karena itu, ketika menerapkan syariah Islam di tengah masyarakat, setiap individu Muslim wajib mempelajari fakta masyarakat itu dengan teliti, kemudian dipecahkan dengan syariah Allah. Dia juga harus melakukan perubahan secara mendasar, berdasarkan ideologi Islam, tanpa memperhatikan lagi standar yang menyimpang dari Islam. Setiap perkara yang menyimpang dari Islam harus dihilangkan. Setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Islam wajib diupayakan dan diterapkan. Fakta masyarakat hendaknya selalu terikat dengan perintah dan larangan Allah. Kaum Muslim tidak boleh menyesuaikan tindakannya dengan waktu dan tempat, tetapi harus selalu merujuk pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Istilah “*Tsawâbit wa Mutaghayyirât*” (perkara baku dan berubah) saat ini telah berkembang di Dunia Islam. Ini dihembuskan oleh kaum kafir melalui antek-antek mereka, yang telah dicekoki dengan *tsaqâfah* kufur. Perlu dicatat, istilah ini tidak dikenal dalam Islam. Faktanya juga tidak ada dalam Islam. Mengapa? Alasannya karena:

- I - Islam adalah akidah dan hukum Syariah. Dengan itulah seluruh perbuatan manusia, baik individu, kelompok maupun negara berjalan.

- 2- Akidah merupakan perkara yang *qath'i*, yang tidak akan pernah berubah atau mengalami perkembangan sepanjang zaman.
- 3- Hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum Syariah. Karena itu tidak ada satu pun perbuatan manusia, kecuali terikat dengan hukum syariah.
- 4- Hukum syariah ada yang *qath'i*, tidak ada ruang ijtihad di dalamnya, seperti kewajiban shalat, zakat, haji, jihad, ber hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, adanya Khilafah, keharaman zina, khamer, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan hukum yang perkara yang *qath'i*, yang tidak akan pernah berubah atau mengalami perkembangan sepanjang zaman.
- 5- Hukum syariah ada yang dihasilkan oleh ijtihad yang benar, setelah mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan dalam menggali nash, dengan menggunakan *ghalabatu azh-zhann*. Meski begitu, apa yang dihasilkan oleh mujtahid dalam hal ini adalah hukum Allah, baik bagi dirinya maupun orang yang mengikutinya. Karena itu mereka tidak boleh menyalahinya. Bagi mereka hukum ini bersifat tetap. Tidak berubah dan mengalami perkembangan.
- 6- Jika seorang mujtahid atau *muqallid*, yang mengikutinya mengubah pendapatnya, karena melihat adanya kesalahan pada ijtihadnya, maka itu bukan perubahan hukum. Begitu juga, ketika mereka meninggalkan hasil ijtihadnya, kemudian mengikuti pendapat Khalifah [Imam], juga tidak bisa disebut perubahan hukum Syariah. Akan tetapi, itu merupakan bentuk ketaatan pada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk mentaati Ulil Amri.
- 7- Adapun perkara teknis, juga sarana-prasarana yang mubah dalam melaksanakan hukum syariah, seperti undang-undang *ijrâ'i*, yang bersifat administratif, atau teknis keilmuan tertentu, maka dalam konteks ini

diserahkan pada temuan manusia, atau perkembangan sains dan teknologi. Dalam hal ini tidak ada hubungannya hukum masalah perundang-undangan syariah (*tasyrî*).

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan, bahwa Islam tidak mengenal istilah "*Tsawâbit wa Mutaghayyirât*" (perkara baku dan berubah). Sebabnya, kebenaran itu bersifat tetap, tidak relatif, sebagaimana yang diyakini oleh orang Barat, sebagai akibat dari penggunaan metode ilmiah. Karena itu apa saja yang datang dari Allah bersifat baku, tetap dan tidak berubah.

Allah SWT berfirman:

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾

Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah sekali-kali kalian menjadi orang yang ragu (terhadap kebenaran yang datang dari Tuhanmu) (QS al-Baqarah [2]: 147).

Karena itu jika seorang Muslim yakin dengan Islam, hukum Islam serta apa saja yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah saw., maka dia tidak akan mengatakan bahwa apa yang datang dari Islam itu basi, kedaluwarsa, atau tidak relevan. Apalagi jika kata-kata itu keluar dari mulut orang yang mempunyai ilmu, bukan orang yang bodoh tentang Islam.

Memang ada perbedaan, jika kata-kata itu keluar dari mulut orang yang jahil tentang Islam. Ada kemungkinan, kata-kata itu lahir dari kebodohnya tentang Islam. Akan tetapi, jika orang yang menyatakan itu adalah orang yang mengerti Islam, berarti hanya satu kemungkinan: dia mengingkari kelayakan Islam sepanjang waktu dan tempat. Itu konsekuensinya berat karena bisa membawa dirinya dalam kemurtadan dan keluar dari Islam. *Fa al-'iyadzu billah!* []

KEPEMIMPINAN INDIVIDUAL DALAM ISLAM

Soal:

Di antara pemikiran yang diadopsi Hizb bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat individual. Artinya, di tangan Khalifahlah semua kewewenangan negara. Dengan demikian negara identik dengan Khalifah. Khalifah berhak menjadi penguasa, *qadhi* dan apa saja.

Ini bertentangan dengan ucapan yang disebutkan di dalam kitab *Ad-Dawlah* halaman 129: *Begitulah, Rasul saw. mendirikan sendiri struktur Dawlah Islam. Beliau menyempurnakan dawlah tersebut semasa hidup beliau. Beliau menjadi kepala negara. Beliau memiliki para mu'awin, wali (kepala daerah), qadhi, tentara, direktur berbagai direktorat dan majelis untuk merujuk pendapat dalam hal syura. Struktur ini dalam bentuk dan wewenangnya merupakan thariqah yang wajib diikuti. Itu bersifat global yang sudah terbukti secara mutawattir.*

Bagaimana penjelasannya?

Jawab:

Di dalam kitab *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Juz II dalam pembahasan *al-imârah* (kepemimpinan) memang dinyatakan:

Pemimpin (amîr) ini diharuskan oleh syariah hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Islam tidak mengenal komando kolektif dan tidak mengenal kepemimpinan kolektif. Dalam Islam komando dan kepemimpinan itu

bersifat individual (fardiyah). Kepala (ar-ra'îs), pemimpin (al-amîr) atau komandan (al-qâ'id) itu wajib satu. Tidak boleh lebih. Dalil atas hal itu tampak jelas dalam nas hadis-hadis terdahulu dan dalam perbuatan Rasul saw. Semua hadis terdahulu mengatakan "*aḥad*ahum (salah seorang dari mereka)" atau "*aḥad*kum (salah seorang dari kalian)". Kata *aḥad* bermakna satu. Itu menunjukkan jumlah, yakni satu, tidak lebih. Hal itu bisa dipahami dari mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah pada hitungan, sifat, tujuan dan syarat diamalkan tanpa membutuhkan nas. Mafhum mukhalafah itu tidak diabaikan kecuali dalam satu kondisi, yaitu jika dibatalkan oleh nas...

Berdasarkan hal itu, sabda Rasul saw. "*fal yuammirû aḥad*ahum (Hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin)," "*illâ ammarû aḥad*ahum (kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin)," "*fa ammirû aḥad*kum (maka angkatlah salah seorang dari kalian menjadi pemimpin)," mafhum mukhalafah dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengangkat lebih dari seorang menjadi pemimpin. Dari sini maka kepemimpinan itu hanya untuk satu orang. Tidak boleh untuk lebih dari satu orang sama sekali sesuai pernyataan teks hadis-hadis tersebut secara manthûq dan mafhum. Hal itu dikuatkan oleh perbuatan Rasul saw. Beliau dalam semua peristiwa pengangkatan

pemimpin, maka beliau mengangkat satu orang menjadi pemimpin, tidak lebih. Beliau sama sekali tidak mengangkat lebih dari satu orang di satu tempat.

Berdasarkan hal itu, tidak boleh, untuk satu perkara ada dua ketua, dan tidak boleh untuk satu tempat ada dua kepala. Sebaliknya, wajib kepala itu hanya satu saja dan haram lebih dari satu. Hanya saja harus diketahui bahwa kepemimpinan dan komando di dalam Islam itu bukan za'âmah, sebab za'âmah itu menuntut az-za'im (pemimpin) diikuti.

Adapun ar-ri'âsah (kepemimpinan) dalam Islam tidak lain menjadikan ra'is (ketua/kepala) memiliki hak memelihara berbagai urusan dan kekuasaan pada perkara di bawah kepemimpinannya, juga mengimplementasikan kepemimpinan itu dalam apa saja yang masuk di bawah

Adapun ar-ri'âsah (kepemimpinan) dalam Islam tidak lain menjadikan ra'is (ketua/kepala) memiliki hak memelihara berbagai urusan dan kekuasaan pada perkara di bawah kepemimpinannya, juga mengimplementasikan kepemimpinan itu dalam apa saja yang masuk di bawah kepemimpinannya sesuai wewenang yang disematkan kepada dirinya sebagai amîr (pemimpin). Tentu dalam batas-batas yang telah diberikan oleh syariah berkaitan untuk perkara yang untuk itu dia diangkat menjadi ra'is (kepala/pemimpin).

kepemimpinannya sesuai wewenang yang disematkan kepada dirinya sebagai amîr (pemimpin). Tentu dalam batas-batas yang telah diberikan oleh syariah berkaitan untuk perkara yang untuk itu dia diangkat menjadi ra'is (kepala/pemimpin).

Pernyataan di atas, yakni bahwa komando dan kepemimpinan dalam Islam bersifat individual, tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab *Ad-Dawlah al-Islâmiyah* di atas.

Kedua teks ini tidak bertentangan. Keduanya benar-benar selaras. Teks pertama dalam kitab *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Juz II berbicara tentang kepemimpinan dari sisi substansinya dalam Islam baik *imârah* (kepemimpinan) safar, jamaah atau kepemimpinan umum untuk kaum Muslim, yakni Khilafah. Jadi kepemimpinan dalam Islam bersifat individual dan tidak bersifat kolektif. Artinya, tidak boleh sekelompok orang menjadi pihak yang memegang wewenang dalam kepemimpinan. Wewenang kepemimpinan itu hanya milik satu orang saja. Dialah yang memiliki keputusan akhir. Perkara ini, meski merupakan hukum syariah, juga begitu dari sisi fakta. Fakta membuktikan, tidak akan lurus ketika wewenang dalam kepemimpinan dan pemerintahan bersifat kolektif. Wewenang kepemimpinan harus bersifat individual, yakni akhir keputusan dalam perkara itu kepada satu orang. Begitulah Khilafah, yakni kepemimpinan umum untuk seluruh kaum Muslim, adalah individual. Artinya, pemilik wewenang di dalam Khilafah hanya satu orang yang diba'iat dengan jabatan Khilafah. Dengan baiat itu dia memiliki semua wewenang pemerintahan, kekuasaan dan pengadopsian berbagai hukum tanpa pengecualian.

Namun demikian, wewenang kepemimpinan yang diberikan hanya kepada Khalifah tidak berarti menjadikan Khalifah

melakukan semua aktivitas pemerintahan dan kekuasaan. Yang benar, keberadaan wewenang itu milik Khalifah. Semua kewenangan dalam pemerintahan dan kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain bersandar pada Khalifah. Khalifahlah yang menunjuk orang yang mewakili dirinya. Jadi kewenangan semua penguasa di dalam Khilafah—baik para *mu'awin*, para wali, para qadhi, struktur administrasi dan pasukan, dsb—karena posisi mereka sebagai wakil khalifah. Karena itu pada dasarnya tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang-wewenang itu sedikitpun, kecuali dia menjadi wakil Khalifah.

Dengan demikian wewenang itu satu perkara, sementara pelaksanaannya adalah perkara yang lain. Rasul saw. memiliki semua wewenang pemerintahan dan kekuasaan. Namun, beliau tidak melakukan semua aktivitas pemerintahan dan kekuasaan. Dalam banyak urusan pemerintahan dan kekuasaan beliau menunjuk orang lain. Demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam *ad-Dawlah al-Islâmiyah* dan buku-buku Hizb lainnya. Selama hidup, Rasul saw. membentuk struktur negara yang lengkap. Perbuatan Rasul saw. menunjukkan bahwa struktur ini, dalam bentuk dan wewenangnya, merupakan *thariqah* (metode) yang wajib diikuti. Artinya, ia merupakan hukum syariah, dan bukan merupakan uslub yang bisa berubah sesuai perubahan situasi dan keadaan. Penegakan struktur negara tidak bertentangan dengan berbagai wewenang yang menjadi milik Khalifah. Sebab Rasul saw. pun memiliki semua wewenang itu. Namun, beliau menegakkan struktur negara dan mendelegasikan wewenang-wewenang tersebut. Dengan demikian perbuatan Rasul saw. itu merupakan dalil paling besar bahwa tidak bertentangan antara berbagai wewenang yang menjadi milik Khalifah dengan penegakan struktur negara

yang memiliki wewenang-wewenang karena semuanya bersandar pada wewenang khalifah. Struktur itu membantu Khalifah dalam mengatur urusan-urusan negara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Khalifah kepada mereka. Inilah juga yang berlangsung pada masa Rasul saw. Meski negara yang didirikan oleh Nabi saw. kecil, pengelolaannya membutuhkan pembentukan struktur yang membantu Nabi saw. dalam menegakkan pemerintahan dan memelihara urusan-urusan masyarakat. Lalu bagaimana lagi jika negara itu besar dan wilayahnya luas?!

Meskipun demikian, wewenang Khalifah dibatasi oleh hukum syariah. Jika dia menyimpang dari hukum syariah dan menzalimi rakyat atau tidak baik dalam menerapkan syariah, maka Mahkamah Mazhalim akan memeriksa perkaranya dan memiliki wewenang untuk mencopot Khalifah sesuai ketentuan hukum-hukum syariah. (Lihat: *Muqaddimah ad-Dustûr*, Pasal 78, Pasal 88, Pasal 90) Oleh karena itu, tidak ada kekebalan untuk Khalifah di depan peradilan. Jika Khalifah salah maka dia dimintai pertanggungjawaban. Jika ia layak dicopot maka ia harus dicopot.

Atas dasar itu, meskipun seluruh wewenang milik Khalifah, dia tetap terikat dengan hukum-hukum syariah di depan Mahkamah Mazhalim.

[Dari Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, Syaikh 'Atha bin Khalil Abu Rasyah- 14 Jumadul Akhirah 1440 H/19 Februari 2019 M]

<http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/58123.html>

<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1004449876418750/%D8%9Ftype=3&theater>

<https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/LkjDcHf4KCt>



AGAR ANAK TAK TERPAPAR SEKULARISME

Dedeh Wahidah Achmad

Mencermati perkembangan kehidupan internasional, terlebih di negeri ini, semakin tampak bahwa peran Islam kian dipinggirkan, bahkan terus digerus dengan berbagai upaya supaya hilang dari tataran praktis. Islam diperlakukan sebagai keyakinan mayoritas rakyat, namun dimandulkan dalam penerapan aturan. Ajaran Islam dikriminalkan, dibelokkan pemahamannya. Ulama dan aktivis pejuangnya dipersekusi dan diintimidasi.

Realitas ini tidak terpisahkan dari pandangan sekular yang banyak dianut masyarakat dunia. Pandangan ini memisahkan agama dari kehidupan. Dalam paradigma sekular, kehidupan harus diatur berasaskan pada rasio, ilmu dan sains. Menurut paham ini, wujud keberadaan segala sesuatu harus dibuktikan oleh pancaindera. Padahal realitasnya tidak semua bisa dijangkau oleh pancaindera. Misalnya keimanan terhadap perkara yang gaib seperti Malaikat, juga hakikat surga dan neraka. Sangat berbahaya jika keimanan anak hanya bergantung pada fakta-fakta yang terindera. Tidak mustahil mereka akan mengingkari adanya surga dan neraka. Bahkan boleh jadi keberadaan Allah pun akan dipertanyakan.

Prinsip sekular juga memandang bahwa nilai baik dan buruk ditentukan oleh akal manusia, bukan berdasarkan wahyu Allah SWT. Keberadaan Tuhan hanya hadir dalam proses

penciptaan semata. Layaknya pembuat jam yang tidak berhak mengatur putarannya manakala jam sudah keluar dari pabriknya, begitulah kehidupan manusia. Sudah tidak butuh lagi campur tangan Penciptanya. Mereka bersepakat membuat aturan berdasarkan akal dan hawa nafsunya. Jadilah demokrasi sebagai sistem politik pemerintahannya, kapitalisme dasar dari ekonominya dan liberalisme yang mengatur segala perilakunya. Bagi mereka, tidak penting membahas akhirat dan hari pembalasan karena mereka tidak mengimaninya. Keyakinan yang mereka ikrarkan hanya sebatas formalitas. Lebih parah lagi mereka beranggapan bahwa alam semesta ini terbentuk hanya karena fenomena alam. Bukan sengaja diciptakan Allah *Rabb al-'alamin*.

Sekularisme Melahirkan Karakter Pembangkang

Anak-anak yang terpapar paham sekular ini bisa menampilkan sikap bebas dan sulit diatur. Bahkan terkesan liar dan membangkang. Andai sudah disepakati keharusan menerapkan aturan semisal SOP bermain, SOP belajar, dll, mereka cenderung abai dan merasa tidak berkewajiban untuk mengikutinya. Terhadap kesepakatan yang sudah dibuat antara mereka dan orangtuanya saja sulit untuk komitmen. Apalagi tunduk patuh pada aturan Allah SWT mungkin akan lebih sulit

dilaksanakan.

Keyakinan bahwa manusia punya hak untuk menentukan aturan hidupnya bisa menyebabkan anak seandainya membuat aturan sesuai dengan selera dan keinginannya. Apalagi jika pemahaman ini diperparah dengan prinsip kapitalisme. Anak akan menetapkan baik-buruk sesuai dengan nilai materi yang akan diperoleh. Dia mau melakukan shalat, misalnya, hanya jika diberi hadiah. Sebaliknya, demi mendapatkan uang jajan, dia berani melakukan maksiat seperti mencuri atau memalak teman sendiri.

Sekularisme menghilangkan peran agama dalam kehidupan. Semua agama dianggap sama dalam interaksi di masyarakat. Sama-sama tidak berhak mengatur. Ujung-ujungnya semua agama dinilai benar. Setiap orang berhak menetapkan kebenaran sesuai versinya. Jika ada orangtua yang menyampaikan kebenaran kepada anaknya sesuai aturan Islam, mereka bisa saja dianggap radikal dan intoleran.

Melindungi Anak dari Paparan Sekularisme

Para orangtua harus bekerja ekstra untuk membersihkan pengaruh sekularisme dari kehidupan anak-anak dan generasi Muslim. Menghadapi perkara ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

Pertama, sekularisme adalah masalah fundamental yang akan mendasari setiap aktivitas cabang berikutnya. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus berawal dari sudut pandang akidah. Artinya, kita harus mengokohkan keimanan anak-anak. Mereka tidak boleh dibiarkan berislam tanpa memiliki keimanan. Keislaman dan keimanan mereka harus diperoleh lewat jalan yang benar; berbasis kesadaran dan pemahaman, bukan keyakinan yang diturunkan orangtuanya atau semata kepercayaan karena ikut-ikutan. Penanaman keimanan kepada anak berarti mengurai simpul besar yang terkait dengan kehidupan manusia. Anak harus dibimbing untuk memiliki jawaban

yang shahih terkait dari mana asalnya manusia. Inilah hakikat penciptaan manusia yang akan menghantarkan pada keimanan akan keberadaan *Al-Khâliq*, yakin bahwa Allahlah yang telah menciptakan kita. Dengan kemahakuasaan-Nya kita tumbuh dan berkembang dalam rahim ibu. Berikutnya kita lahir ke dunia untuk mengemban amanah kehidupan sebagai hamba Allah, yakni semata untuk beribadah serta tunduk patuh pada Syariah-Nya (QS adz-Dzariat [51]: 56).

Pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan ini akan mengarahkan mereka untuk senantiasa menyesuaikan keyakinan yang ada di hati, perkataan yang diucapkan, serta perbuatan yang dilakukan agar selaras dengan tuntunan syariah Islam (QS al-Baqarah [2]: 208).

Berikutnya penting dipahami tentang hakikat kehidupan setelah dunia sirna, yakni keimanan terhadap akhirat dan adanya Hari Penghisaban atas setiap amal manusia yang akan berujung pada menjadi ahli surga atau menjadi penghuni neraka (QS al-Qari'ah [101]: 1-11). Keyakinan yang benar pada akhirat akan menjaga anak tetap berada di jalan syariah.

Kedua, untuk membangun keimanan pada anak harus diperbanyak fakta yang terindra oleh anak terkait topik keimanan yang akan dijelaskan. Setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita harus dimanfaatkan sebagai momen penanaman keimanan pada anak. Tabiatnya, anak baru mampu menjangkau perkara yang berada di sekitarnya saja atau terkait dengan dirinya sendiri. Karena itu kita mesti mencari realitas yang berada di sekitar anak untuk membantu dia menanamkan pemahaman yang kita sampaikan.

Terkait fakta penciptaan, misalnya, anak-anak bisa diajak memperhatikan perkembangan tumbuhan yang ada di halaman hewan peliharaan, atau menengok bayi yang baru lahir. Semuanya terjadi dengan penuh keteraturan, bukan terjadi begitu saja. Allahlah yang menciptakan semua itu. Dia juga yang mengatur keberlangsungan kehidupannya (QS Ali-Imran [3]: 190-191).

Lalu anak dipahamkan bahwa pembuatan suatu barang satu paket dengan aturan penggunaannya. Pembuat baranglah yang paling mengetahui apa saja yang baik untuk barang tersebut dan apa saja yang bisa merusak dan membahayakannya. Jika dibutuhkan, bisa juga dihadirkan kertas petunjuk pemakaian alat, seperti manual kulkas, TV, atau mesin cuci. Segala sesuatu butuh aturan supaya berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Demikian juga manusia, dia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia harus terikat dengan aturan Allah Yang Maha Mengetahui supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupan ini dan semuanya akan menghantarkan dirinya memperoleh nilai ibadah. Jika aturan ini dilanggar maka kerusakanlah yang akan terjadi (QS ar-Rum [30]: 41). Bahkan di dalam Islam tuntutan untuk taat itu bukan hanya pada satu atau dua aturan saja. Manusia diperintahkan untuk tunduk pada aturan menyeluruh, yakni syariah *kâffah* (QS al-Baqarah [2]: 208).

Terkait kesempurnaan aturan Islam, bisa dibahas syariah yang membahas tatacara Rasulullah shalat, makan-minum, tidur, bergaul, bertamu, berdagang, berperang, dll.

Berikutnya ditanamkan fakta bahwa manusia itu lemah dan terbatas. Manusia kadang sakit, lupa, salah atau tertimpa celaka. Jika manusia yang terbatas ini membuat aturan akan bersifat relatif. Ketepatannya sebatas yang dia ketahui saja. Wajar kalau aturan yang dibuat manusia tidak tetap; bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat, atau orangnya. Sesuatu yang dinilai baik dalam suatu waktu akan dianggap buruk pada masa yang berbeda. Di antara fakta yang cukup sederhana adalah tren model baju setiap tahun berganti. Rok mini pernah digandrungi, berganti menjadi gaun panjang, kemudian muncul tren rame-rame memakai jilbab. Boleh jadi model ini pun akan ditinggalkan dan beralih ke gaya lain yang dianggap lebih cocok. Begitulah kebaikan standar manusia akan senantiasa berubah.

Berbeda halnya dengan baik dan buruk

menurut Allah SWT, Pencipta manusia. Dari sejak diturunkan aturan terkait pakaian, maka panduannya jelas. Dikatakan pakaian yang baik adalah yang menutup aurat. Karena itu sampai kapanpun pakaian Muslimah ketika keluar rumah yang sesuai dengan aturan Islam adalah jilbab dan kerudung. Seorang Muslimah tetap harus istiqamah mengenakannya sekalipun mode di masyarakat sudah berubah.

Berikutnya terkait fakta kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia dan awal dari kehidupan berikutnya. Kedatangannya merupakan perkara yang pasti dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Anak harus paham bahwa siapapun akan mati, kembali kepada Ilahi Rabbi (QS Ali Imran [3]: 185 dan al-Jumu'ah: 8). Kesadaraan akan hakikat kematian akan melahirkan sikap kehati-hatian dalam beramal. Waspada jangan sampai maut menjemput dalam keadaan maksiat. Seorang Anshar bertanya pada Rasulullah saw., "Manakah di antara kaum Mukmin yang paling cerdik?" Beliau menjawab, *"Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdik."* (HR Ibnu Majah).

Ketiga, orangtua harus mengajarkan aturan Islam dengan benar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti anak. Demikian juga penerapannya dilakukan dengan makruf, bukan dengan kekerasan dan emosional. Penjelasan yang tidak benar akan menghantarkan pada pemahaman yang salah. Penerapan aturan yang tidak baik akan melahirkan perasaan tidak nyaman pada anak. Jika perasaan ini terus terjadi bisa saja akan muncul kebencian dan keinginan untuk menjauhi aturan Islam. Apalagi jika bertemu dengan pemahaman secular. Jadilah dia mengaku beragama Islam, namun menolak diatur oleh syariah Islam. Bahkan tidak sedikit yang memusuhi Islam dan berada di barisan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. *Na'udzubillâhi min dzâlik.* □

Warisan Islam di Amerika Yang Masih Diabaikan

Sumber: <https://ilmfeed.com/five-islamic-secrets-americas/>

Pertanyaan menarik yang saat ini berkembang di Amerika adalah apakah raja Muslim kulit hitam datang ke Amerika sebelum Columbus?

Saat ini ramai diterima secara luas sebuah teori bahwa Christopher Columbus bukan pengembara 'Dunia Lama' pertama yang menemukan Amerika dan beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin telah didahului oleh umat Islam.

Teori yang paling menarik adalah kisah Abubakari II, Sultan Abad Pertengahan Kekaisaran Mali yang kaya, yang mungkin telah mendarat di Pernambuco – Recife modern di Brasil – sekitar tahun 1312. Kekaisaran kaya emas Abubakari II adalah yang terkaya pada zamannya. Ia dipengaruhi oleh para

cendekiawan Muslim seperti Al-Idrisi, Istakhri, Abu Zaid, Masudi dan Albufeda, yang buku-bukunya menjelaskan bahwa dunia bundar seperti "labu botol".

Menurut teori, pada tahun 1310, Abubakari II mengirim 400 armada ke Atlantik untuk mencari apa yang mungkin ada di seberang jalan. Beberapa bulan berlalu sebelum seorang kapten yang sendirian kembali untuk memberi tahu dia bahwa dia telah kembali setelah melihat kapal-kapal lain terseret ke 'sungai' yang aneh dengan arus kuat yang mengalir di dalam laut – arus khatulistiwa (salah satunya mengalir dari Afrika barat ke ujung Brasil) di mana Recife berada.

Tidak gentar, Abubakari II segera mulai merencanakan ekspedisi berikutnya, dengan armada yang bahkan lebih besar (beberapa memperkirakan sekitar 2.000 kapal). Yang paling mengejutkan, kali ini dia juga akan pergi! Benar saja, pada 1312 ia menyerahkan tahta terkaya di dunia kepada saudaranya Kankan Musa sebelum berangkat melintasi Atlantik dan ke 'sungai' di laut dan tidak pernah terlihat lagi.

Memang tidak ada laporan tentang apa yang terjadi pada Abubakari II yang pernah ditemukan. Namun, beberapa akademisi dan peneliti percaya ia berhasil sampai ke Pernambuco. Satu teori mengklaim bahwa nama itu sendiri adalah penyimpangan dari kata Mande kuno 'Boure Bambouk', yang berarti 'ladang emas yang kaya' – sumber kekayaan kekaisaran Mali. Columbus sendiri dilaporkan menemukan orang Muslim dan pedagang 'kulit hitam' di sepanjang garis pantai Dunia Baru dan yang paling menarik, kembali dengan emas yang memiliki campuran logam campuran tepat dari emas Mali. Mereka yang percaya legenda itu juga menunjuk pada bukti linguistik, arkeologis dan fisik, terutama penemuan patung batu raksasa yang bertebaran di seluruh Amerika Latin yang memiliki ciri khas Afrika Barat.



Sebagian dari Amerika Latin dirancang oleh umat Islam

Istana Alhambra 'jatuh' pada tahun 1492. Setelah itu Alhamra menjadi tempat wisata. Salah satu orang yang menonton adalah penjelajah ambisius Christopher Columbus. Beberapa minggu kemudian, dia berada di Cordoba bertemu raja-raja Katolik untuk mendapatkan persetujuan Kerajaan untuk berlayar melintasi Atlantik.

Ketika Columbus dan krunya tiba di Amerika, seni dan arsitektur Muslim masih sangat populer, dan pengrajin Mudejar (Muslim) masih banyak dicari. Menurut beberapa cendekiawan, Dr. Thomas B Irving (mualaf Kanada dan penerjemah pertama al-Quran di Amerika Utara), beberapa Mudejar dibawa menyeberang ke Dunia Baru untuk membantu membangun kota-kota baru Spanyol:

"Pada abad XVI dan XVII, banyak dari mereka (pekerja Muslim yang terampil) dikontrak untuk pergi ke koloni Spanyol di Hindia, seperti Meksiko, Peru Hulu (Bolivia), Granada Baru (Kolombia), Guatemala dan Kuba. Di negara-negara ini bangunan-bangunan kolonial mengandung bukti yang jelas tentang dekorasi Mudejar dalam pekerjaan, pemanggang, pertukangan, dll..."



Dr. Irving mengutip pengaruh Muslim pada nama kota-kota awal dan kota-kota seperti Recife di Brasil (dari bahasa Arab ar-Rasif berarti 'dermaga' atau 'dermaga') dan Guadalajara di Meksiko (dari 'Wadi al-Hijara' atau 'Sungai Berbatu'). Dia juga menunjuk ke gaya bangunan sipil awal di kota-kota seperti Queretaro (Meksiko), Popayan dan Tunja (Kolombia) dan Quito (Ekuador), di mana teras dan halaman dalam memiliki arkade bergaya Arab dan menyerupai yang ada di Alhambra dan Moor lainnya. Bangunan Biara "La Merced" di Lima, Peru dan Biara Universitas San Carlos di Antigua, Guatemala misalnya. Dr Irving juga menyoroti geometri Moor yang jelas ditemukan di langit-langit yang lebih tua dari abad ke-17 di kota-kota seperti Tzintzuntzan di Mexico dan Tunja di Kolombia.

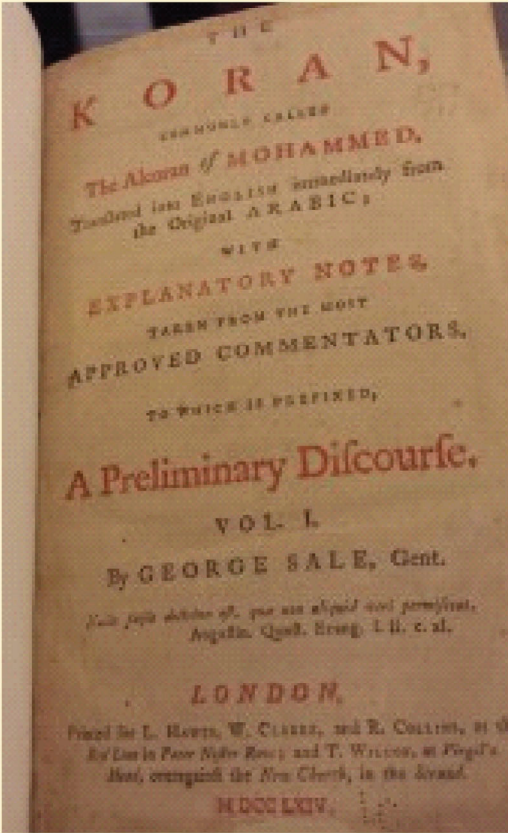


Muslim Eropa membuka masjid 'tertua' Amerika

Ada istilah Muslim Eropa 'Pribumi' yang disematkan untuk Muslim Tatar yang berasal dari wilayah Baltik. Mereka datang ke Eropa sejak 618 tahun yang lalu. Kisah mereka dimulai pada 1398 ketika mereka dibawa dari Krimea oleh Grand Duke of Lithuania, Vytautas the Great, untuk membantu mempertahankan kerajaannya melawan orang-orang Kristen yang tidak toleran – Ksatria Teutonik.

Vytautas menghargai Tatar untuk bantuan ini dengan membiarkan mereka menetap secara permanen di bawah perlindungannya di daerah yang sekarang jatuh di beberapa bagian Lithuania, Polandia dan Belarus.

Beberapa keturunan komunitas Tatar Baltik itu kemudian menempuh perjalanan ke Amerika dan masuk ke Brooklyn, New York City, pada pergantian abad ke-20. Di sana pada tahun 1931 mereka membeli sebuah gereja kecil yang sederhana dan membukanya sebagai masjid. Saat ini, Masjid Muslim Brooklyn adalah masjid tertua yang masih hidup di Amerika Utara dan tetap dalam perawatan Muslim Tatar yang dapat melacak nenek moyang mereka sampai ke komunitas Muslim Eropa kuno.



Bukan sebuah mitos bahwa Ayah pendiri Amerika, Thomas Jefferson, memiliki terjemahan al-Quran pribadinya sendiri.

Terjemahan awal buku tersuci Islam ini – mungkin yang pertama datang ke Amerika – sekarang disimpan di rak Library Perpustakaan Jefferson, di dalam Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di sinilah Jefferson secara pribadi mengirim perpustakaanannya, menawarkan untuk juga "mengatur dan memberi nomor semua buku ketika mereka berdiri di katalog". Alqurannya, dia simpan di bagian hukum.

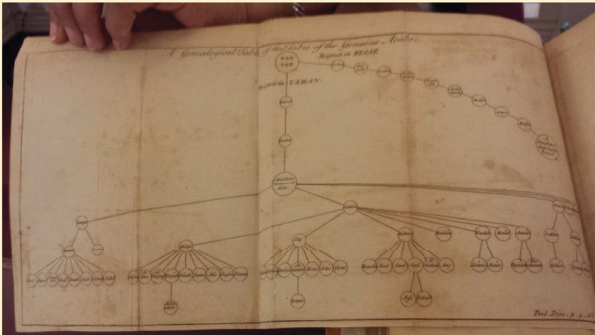
Untuk Presiden ketiga Amerika (juga orang yang merancang Deklarasi Kemerdekaan), posisi hukum Al-Qur'anlah yang paling membuatnya terpesona.

Inilah sebabnya mengapa beberapa analis mengklaim 'Quran' yang dipesan Jefferson dari London sekitar tahun 1764 memengaruhi pandangannya tentang toleransi beragama sebelum merancang RUU untuk Kebebasan Beragama (disahkan 1786).

Jefferson mengenang dalam otobiografinya bahwa ia ingin RUU itu melampaui denominasi Kristen untuk memasukkan "dalam mantel perlindungannya, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, Kristen dan Mahometan [Muslim], orang Hindu, dan orang kafir dari setiap denominasi."

'Jefferson's Alquran' adalah bukti fisik paling awal dan paling jelas yang kita miliki tentang budaya Islam yang berinteraksi dengan Amerika.

Namun, jika Anda berada di Library of Congress, luangkan waktu untuk berhenti dan kagumi kubah gaya Renaisansnya yang luar biasa, jauh di atas ruang baca yang indah. Perhatikan baik-baik dan Anda akan melihat petunjuk lebih lanjut yang mengisyaratkan peran Islam dalam pengembangan Amerika Serikat.





LINTAS DUNIA



Erdogan Mengancam Eropa dengan Gelombang Migrasi Baru

Presiden Turki Erdogan mengatakan negaranya akan membuat daerah yang aman antara Ras al-Ain dan Tall Abyad (Suriah utara). Ini jika tidak menemukan dukungan dari pihak-pihak lain. Erdogan kembali mengangkat kasus imigran dalam menghadapi Eropa, lansir Kantor Berita HT, Ahad (27/10/2019).

Erdogan mengatakan negaranya akan mendirikan tempat berlindung di daerah aman yang akan memenuhi semua kebutuhan para pengungsi Suriah. Tentara Turki telah meluncurkan Operasi “Mata Air Damai” di Suriah utara dan merekrut ribuan pejuang Suriah, yang dipimpin oleh Turki. Saat yang sama, pasukan kriminal Bashar berhasil memasuki banyak daerah yang dikendalikan oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi selama operasi Turki. Sejauh ini tidak terjadi benturan dengan pasukan oposisi Suriah karena Turki tidak menginginkan hal itu.

Ankara menghentikan operasi militer “Mata Air Damai” pekan lalu di bawah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Erdogan kemudian menegosiasikan kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, penjaga perbatasan Suriah dan polisi militer Rusia mulai mengusir Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dari perbatasan Suriah-Turki sekitar 30 kilometer dalam 150 jam.

Erdogan menambahkan, “Apa yang kami harapkan dari masyarakat internasional adalah untuk menghormati ketegasan kami sehubungan dengan keamanan perbatasan kami, dan mendukung proyek-proyek kami setelah warga Suriah kembali di negara kami.”

Erdogan mengancam negara-negara Eropa yang menentang operasi militer Turki. Katanya, Turki tidak akan memiliki pilihan lain selain membuka perbatasannya bagi para pengungsi Suriah untuk pergi ke Eropa. Ini jika tidak ada dukungan terhadap proyek-proyek yang telah dikembangkan untuk mengamankan kembalinya antara satu dan dua juta warga Suriah dari sekitar tiga setengah juta penduduk yang tinggal di Turki.

63 Orang Tewas dan 2.595 Terluka Selama Dua Hari Aksi Protes di Irak

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Irak pada Sabtu malam (26/10/2019) menerbitkan laporan korban baru dari sejumlah orang yang tewas dalam aksi protes sejak sehari sebelumnya. Komisi mengkonfirmasi bahwa jumlah korban telah mencapai 63 orang tewas.

“Ini menegaskan bahwa Pemerintah Irak, atau ‘oasis demokrasi di Timur Tengah’ yang dijanjikan oleh Washington setelah pendudukan, tidak lagi mempertimbangkan darah kaum Muslim,” tulis Kantor Berita HT, Ahad (27/10/2019).

Menurut Komisi HAM Irak, korban tewas berada di Provinsi Baghdad, Maysan, Dhi Qar, Basra, Muthanna, Diwaniya dan Babil. Komisi HAM Irak menekankan bahwa dalam aksi protes itu telah terjadi “pembakaran dan perusakan 83 gedung Pemerintah dan beberapa kantor partai

di provinsi Diwaniya, Maysan, Wasit, Dhi Qar, Basra, Muthanna, Babil dan Karbala”, serta serangan terhadap gedung konsulat Iran di Karbala.

Irak adalah salah satu negara “poros perlawanan” bersama dengan Iran, Suriah dan Partai Iran Lebanon.

Kedutaan Besar AS di Baghdad adalah kedutaan terbesar di dunia dan memiliki 16 ribu karyawan yang menjalankan urusan korupsi dan pengelolaan negara untuk menjaga agar rakyat tetap menderita karena kekurangan kesempatan kerja dan kemiskinan, pada saat para pejabat Pemerintah terjerumus ke dalam korupsi.

“Perlu diketahui, ‘partai-partai perlawanan di Irak’ menentang dan membunuh para pengunjung rasa,” pungkas Kantor Berita HT.

Barat Masih Menyimpan Pakistan dalam Daftar Pendanaan Teroris

Setelah Barat menjajah seluruh dunia, disusul dengan penurunan kolonialisme, tetapi transformasinya menjadi neo-kolonialisme, Barat terus menggunakan undang-undang dan lembaga-lembaga internasional untuk menjaga negara-negara non-Barat tetap di bawah tekanan.

Kantor Berita *Reuters* melaporkan bahwa sebuah lembaga pengawas keuangan global membuat Pakistan masuk dalam daftar pendanaan terorisme pada Jumat (18/10/2019). Lembaga itu memperingatkan Islamabad bahwa mereka hanya memiliki waktu hingga Februari untuk memperbaiki atau menghadapi tindakan internasional.

Gugus Tugas Aksi Keuangan (*The Financial Action Task Force*(FATF) yang berbasis di Paris, yang berurusan dengan pencucian uang mengatakan prihatin bahwa Pakistan telah gagal menyelesaikan rencana aksi pertama pada batas waktu Januari dan kemudian batas waktu Mei-Oktober sekarang ini.

Pakistan yang tengah dilanda krisis neraca pembayaran, yang memaksanya untuk meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), telah

menjanjikan serangkaian langkah untuk membendung pendanaan terorisme.

Menurut Kantor Berita HT, lembaga-lembaga seperti FATF atau IMF sangat mahir menyembunyikan tujuan imperialis Barat di balik bahasa netral dan halus. Melihat dukungan Pakistan yang lemah dan tidak meyakinkan untuk kelompok-kelompok jihad kecil yang dipandang sebagai terorisme. Sebaliknya, mereka sama sekali mengabaikan tren terorisme nyata Barat dalam bentuk pengerahan ratusan ribu tentara yang menciptakan pembunuhan dan kerusakan yang tidak terdeskripsikan di negeri-negeri Muslim.

“Untuk itu, kaum Muslim harus menolak lembaga-lembaga internasional yang didirikan oleh Barat dan undang-undang internasional yang dibuat oleh Barat,” tegas Kantor Berita HT. Sebab dengan semua ini, lanjut kantor berita tersebut, insya Allah, dunia akan segera menyaksikan munculnya Khilafah *‘ala minhajin nubuwwah*. Khilafah inilah yang akan menghadapi dan mengalahkan kolonialisme serta memetakan jalan yang adil dan damai. Tentu tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, seperti halnya yang dilakukan para khalifah sebelum munculnya imperialisme sekular Barat yang jahat, di Barat.

Trump: Arab Saudi akan Membayar Semua Pasukan dan Peralatan yang Kami Kirim

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah sepakat untuk membayar kepada Amerika Serikat sebagai kompensasi atas pengiriman pasukan Amerika ke kawasan itu, menyusul serangan terhadap fasilitas minyak milik perusahaan Aramco. Trump mengatakan kepada para wartawan bahwa pengiriman pasukan ke Timur Tengah harus bergantung pada dapat-tidaknya pembiayaan, lapor Kantor Berita HT, Ahad (13/10/2019).

Trump berkata, “Kami mengirim tentara dan hal-hal lain ke Timur Tengah untuk membantu Arab Saudi, tetapi apakah Anda siap? Permintaan



saya kepada Arab Saudi untuk sepakat membayar kami sebagai kompensasi atas semua yang kami lakukan. Ini pertama yang kami minta...Arab Saudi dan negara-negara lain...Sekarang, Arab Saudi telah sepakat untuk membayar kami, dan kami menilai ini baik.”

Menteri Pertahanan AS Mark Thomas Esper telah mengindikasikan niat negaranya untuk mengirim tiga ribu tentara tambahan ke Arab Saudi atas permintaan Putra Mahkota, Muhammad bin Salman.

Menurut Kantor Berita HT, mereka yang berpikir bahwa Amerika Serikat sedang melaksanakan kontrak keamanan untuk Arab Saudi adalah salah besar. Sebabnya, Amerika yang mendorong Iran untuk meningkatkan ancamannya ke Arab Saudi, seperti serangan Aramco, dengan cepat Amerika Serikat menuduh Iran sebagai pelakunya. Kemudian Amerika meminta Arab Saudi membalas ancaman-ancaman Iran. Amerika juga meminta Arab Saudi untuk memelas bantuan tentara Amerika dan membayar kompensasinya harta yang banyak dan mencukupi, dengan mengosongkan kantong-kantong minyak Saudi dalam permainan terbuka.

“Sungguh, perang ancaman ini dapat berkembang menjadi perang nyata. Amerika Serikat sedang menekan semua pihak, Iran dan sekte-sektenya, serta Arab Saudi dan aliansinya. Ini dilakukan oleh Amerika Serikat dengan harapan dapat menyelesaikan situasi ekonomi yang memburuk di negerinya, serta bertujuan meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dan dunia,” pungkaskantor berita tersebut.

Dokumen Rahasia Ungkap Kejahatan Inggris pada Masa Lalu

BBC Arab pada 6 Oktober 2019 mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia yang mengungkapkan bahwa Inggris mengeksploitasi popularitas dan pengaruh Ikhwanul Muslimin untuk mengobarkan perang psikologis dan propaganda rahasia kepada musuh-musuhnya, seperti terhadap mendiang

pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser dan Sukarno, selama dekade ketujuh abad lalu. Menurut dokumen-dokumen itu, Inggris telah mempublikasikan pamflet yang berisi kebohongan atas nama jamaah Ikhwanul Muslimin, yang isinya menyerang dengan keras perilaku tentara Mesir selama berada di Yaman.

Menurut aktivis Hizbut Tahrir Walid Blaibel, dokumen-dokumen rahasia ini mengungkapkan tentang kejahatan Inggris dan kelicikannya dalam mempermainkan emosi kaum Muslim.

“Sungguh, semua ini tidak lain adalah bukti kebencian kaum Salibis penjahat, dan ketamakan mereka untuk melakukan apa pun demi mencapai kepentingan mereka, serta menancapkan pengaruhnya dan dominasinya atas negeri-negeri kaum Muslim dan kekayaannya,” bebernnya seperti dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Jumat (11/10/2019).

Ia mengatakan, ini juga merupakan tamparan bagi para pengikut kaum kafir penjajah dan mereka yang telah tercuci otaknya, yaitu mereka yang selama ini mengampanyakan tentang “integritas” kaum kafir Barat, dan “ketulusan” niatnya.

Menurut Walid Blaibel, dokumen-dokumen ini harus menjadi alasan bagi kaum Muslim pada umumnya, dan gerakan-gerakan Islam khususnya. Tentu agar mereka mempersenjatai dirinya dengan kesadaran atas berbagai konspirasi yang terjadi di sekitarnya. Juga agar mereka berhati-hati bahwa negara-negara kafir tengah menggunakan mereka sebagai alat untuk melayani setiap agenda mereka. Mereka juga harus mengetahui intrik dan trik yang dijalankan oleh kaum kafir Barat dan antek-anteknya. Terutama pada masa sekarang ketika umat tengah bangkit melakukan perlawanan dan revolusinya terhadap boneka-boneka kaum kafir Barat dan para tokohnya.

“Ingat! Orang beriman itu adalah orang yang cerdas, pintar dan berhati-hati. Begitulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.,” pungkasnya. [Joko Prasetyo *dari berbagai sumber*]



STRATEGI RAND

Setelah *war on terrorism* (WoT), kini kita disibukkan dengan *war on radicalism* (WoR). Apakah perang melawan radikalisme, sebagaimana perang melawan terorisme, benar-benar kebutuhan kita? Ataukah ada pihak lain yang sesungguhnya mengatur semuanya? Ibarat film, ada yang membuat skenario, juga ada yang bertugas mengatur, mengarahkan dan menjalankan cerita.

++++

Jawaban atas pernyataan di atas bisa dirunut ke belakang ketika pada tahun 2003 terbit dokumen RAND Corporation berjudul *Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies*. Dokumen ini berisi kebijakan AS dan sekutunya atas Dunia Islam. Intinya, memetakan kekuatan (*mapping*), sekaligus memecah-belah dan merencanakan konflik internal di kalangan umat Islam melalui berbagai pola untuk mencegah kebangkitan Islam.

Rand Corp adalah Pusat Penelitian dan Kajian Strategis tentang Islam di Timur Tengah yang dibiayai oleh Smith Richardson Foundation. Berpusat di Santa Monica-California dan Arlington-Virginia, Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Rand adalah perusahaan bidang kedirgantaraan dan persenjataan Douglas Aircraft Company. Entah mengapa kemudian beralih menjadi *think tank* (dapur pemikiran) yang dana operasionalnya berasal dari proyek-proyek penelitian pesanan militer.

Tahun 2007, Rand menerbitkan lagi dokumen *Building Moderate Muslim Networks*. Juga didanai oleh Smith Foundation. Dokumen terakhir ini memuat langkah-langkah membangun Jaringan Muslim Moderat pro-Barat di seluruh dunia. Baik Rand maupun Smith Foundation, keduanya berafiliasi ke Zionisme Internasional.

Apa latar belakang, agenda dan strategi pecah-belah yang termaktub dalam kedua dokumen tersebut? *Pertama*: Upaya umat Islam untuk kembali pada kemurnian ajaran, setelah periode keterbelakangan dan ketidakberdayaan Dunia Islam yang panjang, adalah suatu ancaman bagi Barat, yakni terhadap peradaban dunia modern dan bisa mengantarkan pada *Clash of Civilization* (Benturan Peradaban).

Kedua: Agar tidak menjadi ancaman, Dunia Islam harus dibuat ramah terhadap demokrasi dan modernitas serta mematuhi aturan-aturan internasional untuk menciptakan perdamaian global.

Ketiga: Karena itu diperlukan pemetaan kekuatan dan pemilahan kelompok Islam untuk mengetahui siapa kawan dan lawan, mana yang ingin diperkuat, siapa akan dijadikan anak didik; serta pengaturan strategi dengan pengolahan sumberdaya yang ada di Dunia Islam.

Keempat: Untuk tujuan di atas, umat Islam dibagi ke dalam Empat Kelompok, yaitu:

1) *Fundamentalis*: Kelompok masyarakat Islam yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer serta menginginkan formalisasi penerapan

syariah Islam.

- 2) *Tradisionalis*: Kelompok masyarakat Islam Konservatif yang mencurigai modernitas, inovasi dan perubahan. Mereka berpegang pada substansi ajaran Islam tanpa peduli pada formalisasinya.
- 3) *Modernis*: Kelompok masyarakat Islam modern yang ingin reformasi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman sehingga bisa menjadi bagian dari modernitas.
- 4) *Sekularis*: Kelompok masyarakat Islam sekular yang ingin menjadikan Islam sebagai urusan privasi dan dipisah sama sekali dari urusan negara.

Kelima: Terhadap tiap kelompok ditetapkan strategi masing-masing, tetapi sasaran utamanya adalah bagaimana menghadapi kaum fundamentalis, yaitu:

- 1) Menentang kaum fundamentalis dengan cara: a) menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan ketidakakuratannya; b)

mencegah upaya menunjukkan rasa hormat dan pujian atas perbuatan kekerasan kaum fundamentalis, ekstremis dan teroris; c) mengucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan; d) mendorong para wartawan untuk memeriksa isu-isu korupsi, kemunafikan dan tak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris; e) mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.

- 2) Beberapa cara untuk memojokkan kaum fundamentalis, di antaranya dengan mengulang-ulang tayangan aksi-aksi mereka yang mengandung kekerasan di televisi, sedangkan kegiatan konstruktif tidak ditayangkan; “mengeroyok” dan menyerang argumen narasumber dari kaum fundamentalis dengan format dialog 3 lawan 1 dan lainnya; lalu mempidana para aktivis Islam dengan tuduhan teroris atau pelaku kekerasan dan lain-lain.
- 3) Mendorong kaum tradisionalis untuk melawan kaum fundamentalis dengan cara: a) menerbitkan kritik-kritik atas kekerasan dan ekstremisme yang dilakukan kaum fundamentalis; b) memperlebar perbedaan antara kaum tradisionalis dan fundamentalis; c) mencegah aliansi kaum tradisionalis dan fundamentalis; (e) memperuncing khilafiyah, yaitu perbedaan antarmazhab dalam Islam, seperti Sunni–Syiah, Hanafi–Hanbali, Wahabi – Sufi, dll.
- 4) Mendukung secara selektif kaum sekularis, dengan cara: a) mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai musuh bersama; b) mendorong ide bahwa dalam Islam, agama dan negara dapat dipisahkan dan hal ini tidak membahayakan keimanan tetapi malah akan memperkuat.
- 5) AS dan sekutu menyediakan dana bagi individu dan lembaga-lembaga seperti LSM, pusat kajian di beberapa universitas Islam

AS dan sekutu sadar, mereka tengah terlibat dalam suatu peperangan total baik fisik (dengan senjata) maupun ide. Mereka ingin memenangkan perang itu dengan cara: “ketika ideologi kaum ekstremis tercemar di mata penduduk tempat asal ideologi itu dan di mata pendukung”. Tujuan utama, menjauhkan Islam dari umatnya dan membuat orang Islam supaya tak berperilaku lazimnya seorang Muslim.

maupun universitas umum lain, serta membangun jaringan antarkomponen untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dimaksud.

AS dan sekutu sadar, mereka tengah terlibat dalam suatu peperangan total baik fisik (dengan senjata) maupun ide. Mereka ingin memenangkan perang itu dengan cara: “ketika ideologi kaum ekstremis tercemar di mata penduduk tempat asal ideologi itu dan di mata pendukung”. Tujuan utama, menjauhkan Islam dari umatnya dan membuat orang Islam supaya tak berperilaku lazimnya seorang Muslim.

Departemen Luar Negeri AS dan USAID menunjuk pelaksana penyaluran dana dan kontak dengan berbagai LSM dan para individu di negeri-negeri Muslim. Di antaranya yaitu The National Democratic Institute (NDI), The Asia Foundation (TAF), dan The Center for Study of Islam and Democracy (CSID). NDI sangat aktif di awal reformasi dalam turut merancang berbagai langkah, termasuk dalam penyusunan berbagai RUU, yang menentukan arah reformasi.

Adapun kelompok-kelompok yang dijadikan sasaran perekrutan dan anak didik adalah: a) akademisi dan intelektual Muslim liberal dan sekuler; b) cendekiawan muda Muslim yang moderat; c) kalangan aktivis komunitas; d) koalisi dan kelompok perempuan yang mengkampanye kesetaraan gender; e) penulis dan jurnalis moderat.

Para pejabat Kedutaan AS di negeri-negeri Muslim harus memastikan bahwa kelompok ini terlibat dan sesering mungkin melakukan kunjungan ke Paman Sam. Prioritas pembangunan jaringan Muslim moderat diletakkan pada sektor: a) pendidikan demokrasi, dengan mencari pembenaran dalil dan sumber-sumber Islam terhadap demokrasi dan segala sistemnya; b) dukungan media massa dalam melakukan liberalisasi pemikiran, kesetaraan gender dan lainnya — yang merupakan “medan tempur” dalam perang pemikiran melawan

Sejak beberapa puluh tahun terakhir, khususnya sejak era reformasi, muncul banyak tokoh liberal sebagai opinion maker di tengah masyarakat, juga berkembang banyak LSM yang memproduksi materi-materi dakwah atau fatwa namun isinya justru “menjerumuskan” Islam. Ini membuktikan bahwa konspirasi penghancuran Islam itu ada dan nyata. Artinya, hampir semua strategi Rand Corp berjalan.

Islam; c) Advokasi Kebijakan, untuk mencegah agenda politik kelompok Islam.

++++

Sejak beberapa puluh tahun terakhir, khususnya sejak era reformasi, muncul banyak tokoh liberal sebagai opinion maker di tengah masyarakat, juga berkembang banyak LSM yang memproduksi materi-materi dakwah atau fatwa namun isinya justru “menjerumuskan” Islam. Ini membuktikan bahwa konspirasi penghancuran Islam itu ada dan nyata. Artinya, hampir semua strategi Rand Corp berjalan.

Yang paling memprihatinkan adalah strategi itu mulus berjalan, termasuk jurus pecah-belah di antaranya dengan isu radikalisme, justru lantaran menggunakan tangan-tangan (internal) kaum Muslim itu sendiri. Sadarkah mereka telah menjadi penghianat bagi bangsa, negara dan agamanya? Sungguh keterlaluan...! □



Ustadz H. Ismail Yusanto

INDONESIA BUTUH PEMIMPIN DAN SISTEM YANG BAIK

Pengantar:

Rezim baru telah terbentuk. Meski demikian, presidennya tetap Jokowi dan sebagian kabinetnya adalah muka lama. Pertanyaannya: Adakah yang bisa diharapkan dari rezim baru ini lima tahun ke depan? Apakah Indonesia akan semakin baik? Ataukah sebaliknya, makin buruk? Jika makin baik, apa indikasinya? Jika makin buruk, apa pula indikasinya? Apa pula akar penyebabnya? Yang lebih penting, bagaimana solusinya menurut Islam?

Itulah di antara pertanyaan **Redaksi** kepada **Ustadz H. Ismail Yusanto** kali ini. Berikut hasil wawancara **Redaksi** dengan beliau dalam rubrik '*Hiwar*' kali ini.

Menurut Ustadz, masa depan Indonesia lima tahun ke depan makin terang atau makin suram?

Kita tentu berharap, dengan kabinet yang baru ini, masa depan kita ke depan menjadi

lebih baik. Namun, harapan ini agaknya tidak mudah dipenuhi. Mengapa? Lihatlah, belum kerja apa-apa mereka sudah menimbulkan kegaduhan akibat pernyataan dan langkah-langkah yang kontroversial. Di beberapa

kementerian, utamanya di Kementerian Agama, tanpa latar yang jelas tiba-tiba radikalisme dijadikan sebagai isu utama. Seolah inilah persoalan yang mendesak harus segera diatasi. Ketika ini dijadikan isu, lalu diambil tindakan, maka siapa yang kira-kira bakal dihadapi atau bahkan bakal menjadi korban? Tentu umat Islam, *kan*? Kalau begini keadaannya, bagaimana kita bisa berharap 5 tahun kedepan hidup kita makin terang?

Apakah kontroversi susunan kabinet Indonesia Maju yang ada termasuk salah satu faktornya?

Ya. Ada beberapa figur kontroversial di sana. Menteri Agama Fahrur Razi, misalnya, dikritik keras sebagai tidak pas duduk di kursi itu. Katanya ia, yang seorang pensiunan jenderal, tidak cukup memiliki latar pendidikan agama dan pengalaman menangani masalah keagamaan yang bagus. Betul saja, dari lontaran pernyataan-pernyataannya, seperti soal cadar dan celana cingkrang yang dia sebut tidak memiliki dasar dalam al Quran dan hadis, bisa kita ukur seberapa dalam pengetahuan agamanya.

Bila demikian keadannya, apakah kehidupan keberagaman kita akan semakin tumbuh dengan baik atau malah justru sebaliknya?

Kalau cara-cara Menag, juga menteri terkait, bekerja seperti yang dilakukan sejauh ini diteruskan, kacaulah kehidupan agama kita.

Bagaimana penempatan Menteri Pendidikan, apakah sesuai kebutuhan atau justru sebaliknya?

Justru itu yang menjadi pertanyaan. Sebenarnya apa *sih* yang dipandang sebagai persoalan pendidikan oleh Presiden, atau bagaimana sebenarnya Presiden memandang persoalan pendidikan di negeri ini, sehingga

diangkat Nadiem, yang sama sekali tidak punya latar belakang pendidik, sebagai Mendikbud?

Pendidikan adalah salah satu pilar penting dari kemajuan sebuah bangsa. Apa iya kita akan menggantungkan soal pendidikan yang demikian vital ini, menyangkut nasib puluhan juta peserta didik, kepada seorang anak muda yang tak memiliki pandangan dan pengalaman didaktis yang mencukupi?

Hal mendasar apa yang mengindikasikan dunia pendidikan kedepan suram?

Secara normatif, pendidikan semestinya harus bisa membawa peserta didik meningkat kompetensi dan karakternya. Perihal kompetensi, mungkin Nadiem bisa berbicara banyak. Namun, soal karakter, apa yang bisa diharap dari dia yang warna keagamaannya saja tidak jelas? Memang, pendidikan agama bukan jaminan orang akan otomatis memiliki karakter yang baik. Buktinya banyak yang mengerti agama, bahkan bekerja di Kementerian Agama, terjerat korupsi juga. Kita bisa menjawab, bila dengan pendidikan agama saja begitu keadaannya, apalagi tanpa pendidikan agama. Pasti tambah kacau.

Di sisi karakter inilah kita sesungguhnya menghadapi persoalan besar. Korupsi itu soal kompetensi atau karakter? LGBT itu soal kompetensi atau karakter? Semua itu jelas soal karakter. Maraknya pornografi, pornoaksi, juga tawuran dan kriminalitas yang makin menjadi-jadi itu jelas juga soal karakter. Apa resep yang ditawarkan Nadiem untuk menghadapi tantangan itu?

Dari sisi kompetensi, teknologi digital dimana Nadiem punya kepakaran, hanyalah salah satu yang dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Masih banyak lagi kompetensi yang harus dikuasai untuk menjadi bangsa yang unggul. Apa jawaban Nadiem

untuk soal ini. Tidak jelas.

Di tengah keraguan publik yang demikian besar atas kapasitas Mendikbud yang baru ini, tiba-tiba Presiden memerintahkan Nadiem untuk merombak kurikulum secara besar-besaran? *Kebayang gak*, apa yang bakal terjadi?

Tampak juga beberapa menteri yang dipilih tersandung kasus besar, seperti Mendagri (buku merah), Menkumham (e-KTP), MenpanRB dan lainnya. Apa problem mendasar dalam tata kelola pemerintahan dengan adanya pejabat bermasalah ini?

Banyak pengamat mengatakan, Indonesia saat ini berada dalam kuasa oligarki politik. Saya sangat sependapat dengan penilaian ini. Dominasi oligarki partai dan pengusaha dalam kekuasaan saat ini demikian kuatnya sehingga. Akibatnya, misalnya, ketika Presiden menyusun kabinet, dia tidak bisa lepas dari kepentingan mereka. Presiden tinggal menerima saja figur yang diajukan oleh partai, meski sebenarnya figur itu bermasalah secara hukum, seperti beberapa tadi disebut. Apalagi jika benar bahwa masalah ini sesungguhnya sudah diketahui sedari awal oleh Presiden, tapi didiamkan saja. Makin rapuhlah kehendak untuk terciptanya pemerintahan yang bersih. Bagaimana bisa diharap lahir pemerintahan yang bersih jika pemimpin tinggi yang diangkat presiden adalah figur yang tak bersih? Keadaan ini makin melengkapi proses pelemahan KPK, lembaga yang selama ini paling dipercaya dalam pemberantasan korupsi, yang terjadi sejak terbit UU KPK baru itu. Jadi, ke depan yang terjadi sangat mungkin korupsi makin aman dilakukan karena dilindungi oleh oligarki tadi.

Implikasi lanjutannya akan sangat jauh dan serius. Ketika kekuatan koruptif oligarki makin besar, negeri ini makin jauh dikendalikan oleh kuasa jahat. Regulasi dan kebijakan akan makin

cenderung melayani kepentingan oligarki itu, dan menjauh dari keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Rakyat pasti akan makin menderita.

Bagaimana menurut Ustadz gambaran masalah keumatan ke depan? Apakah isu radikalisme akan semakin menguat?

Ya, seperti yang sudah dijelaskan, tampaknya radikalisme ini menjadi semacam program maskot kabinet sekarang ini. Terbukti setidaknya ada 4 atau bahkan 5 kementerian (Kemenag, Kemenag, Kemenpolhukam, KemenPAN/RB) di kesempatan pertama langsung bicara soal radikalisme.

Mengapa begitu?

Aneh memang. Harus ditanyakan serius, apakah persoalan-persoalan besar yang terjadi di negeri ini timbul karena radikalisme? Baru lalu terjadi kerusuhan besar di Wamena, juga di beberapa kota lain di Papua, yang memakan banyak korban dan kerusakan, apakah itu semua disebabkan oleh radikalisme? Kita tahu, salah satu problem akut yang melanda negeri ini adalah korupsi. Ada lebih dari 20 gubernur, 300-an bupati/walikota, ratusan anggota DPR/ DPRD, termasuk sekian ketua umum parpol terjerat kasus korupsi. Apakah itu semua karena radikalisme? Apakah juga maraknya LGBT, pornografi- pornoaksi, kriminalitas, bahkan juga ada gerakan separatisme di beberapa wilayah yang sudah berani membakar bendera merah putih dan mengibarkan bendera mereka, karena radikalisme?

Jadi darimana kita bisa mengatakan bahwa kita saat ini tengah menghadapi apa yang mereka sebut darurat radikalisme? Mestinya harus dikatakan, bahwa kita saat ini tengah berada dalam darurat korupsi, darurat kemiskinan, darurat pornografi – pornoaksi dan LGBT serta darurat separatisme. Ini lebih

faktual.

Ada apa di balik itu semua? Apakah ada maksud terselubung yang ingin dicapai dan ditutupi?

Semua orang tahu, saat ini Islam (politik) sedang dalam proses kebangkitan. Fenomena Aksi 411, 212 dan lainnya adalah tanda nyata kebangkitan itu. Kebangkitan ini akan terus melaju. Tak bisa dibendung. Lalu mereka, para pembenci Islam, berusaha menghambat dan memperlambat, kalau tidak bisa menghentikan sama sekali. Caranya, salah satunya dengan mendiskreditkan Islam melalui aneka julukan atau label, seperti radikalisme, fundamentalisme dan lainnya.

Jadi, sekarang tengah berjalan politik *labelling* (pelabelan), kemudian *monsterizing* atau monsterisasi dengan menggambarkan seolah semua orang atau kelompok yang dilabeli macam-macam itu tadi sebagai membahayakan, mengancam dan merusak negara. Harapannya, dengan semua sebutan dan monsterisasi itu, umat Islam, juga umat selain Islam, menjadi takut dan menjauh dari Islam. Islam yang dimaksud di sini tentu bukan Islam dalam arti umum. Akan tetapi, Islam yang menolak sekularisme, liberalisme, kapitalisme, termasuk komunisme serta dominasi asing dan aseng. Islam yang menginginkan tegaknya kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kaffah*.

Pencitraan negatif tentang syariah *kaffah* dan para pengembannya terjadi selain melalui julukan 'paham radikal', juga melalui label 'anti kebhinnekaan', 'meresahkan masyarakat', 'memecah belah bangsa', bahkan 'menghancurkan negara' yang terus dibombardir oleh kuasa makna kata dan politik kepada publik. Dengan demikian citra syariah *kaffah* sebagai ajaran yang bakal memberikan solusi atas problematika yang ada, juga akan mewujudkan kebaikan bagi bangsa

dan negara ini (rahmatan lil-'alamin), tenggelam. Berganti menjadi ketakutan dan permusuhan terhadapnya serta menumbuhkan Islamophobia dan semangat membatalkan gerakan perjuangannya. Itulah yang mereka inginkan.

Sebenarnya radikal itu apa?

Secara bahasa, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), radikal diartikan sebagai "maju dalam berpikir atau bertindak". Kalau dipasangkan pada kalimat "perubahan yang radikal", maka diartikan sebagai perubahan yang "secara mendasar (sampai pada hal yang prinsip)". Adapun radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik, atau paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Dari definisi ini, terlihat tak semua radikal itu buruk. Bahkan pada saat-saat tertentu radikal justru amat diperlukan. Misalnya, ketika suatu bangsa tengah berjuang merebut kemerdekaan. Bung Karno dalam tulisannya "Mentjapai Indonesia Merdeka" (Maret 1933) menyatakan bahwa untuk menuju Indonesia merdeka maka harus dipimpin oleh sebuah partai pelopor. Partai pelopor seperti apa? "*Di antara obor-obornja pelbagai partai jang masing-masing mengaku mau menjuluhi perdjalan rakjat, massa lantas melihat hanya satu obor jang terbesar njalanja dan terterang sinarnja, satu obor jang terkemuka djalanja, ja'ni obornja kita punja partai, obornja kita punya radikalisme!*"

Jadi, radikalismelah yang mendorong semangat kemerdekaan. Bung Karno selanjutnya menyatakan, "*Konstruktivisme kita bukanlah konstruktivisme kaum reformis yang warung-warungan dan kedai-kedai, tetapi konstruktivismenya radikalisme, yang bersifat radical dynamisch membongkar tiap*

batu-alas gedung stelsel imperialisme-kapitalisme”.

Apa akibat isu radikalisme ini bagi kehidupan umat Islam, termasuk untuk kerukunan antarumat Islam dan antarumat beragama?

Umat Islam akan merasa terancam karena selalu dipojokkan dengan isu itu. Secara politik, isu ini pun sangat mudah dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan, seperti yang terjadi dalam pemilihan Rektor ITB kemarin. Yang terbaik tidak terpilih hanya karena diisukan pro radikalisme. Antarumat Islam bisa saling tuding. Bila umat Islam terbelah, dampaknya bisa sangat buruk terhadap keutuhan bangsa ini. Apalagi bila agama lain ikut memanfaatkan isu ini untuk kepentingan mereka. Bisa tambah runyam keadaan.

Jadi apa sebenarnya persoalan pokok yang membahayakan Indonesia itu ?

Kita menghadapi dua persoalan pokok yang sangat pelik, yakni pemimpin yang lemah dan sistem yang buruk. Oligarki politik yang ditopang oleh pemilik modal telah melahirkan pemimpin yang lemah. Akibat pemimpin yang lemah, maka berkuasalah oligarki politik itu. Ciri sederhana kepemimpinan yang lemah adalah dia tidak bisa mengambil keputusan secara independen. Keputusannya cepat berubah dan tidak bisa memenuhi janji-janjinya. Ketika berjanji, ia bertindak atas nama dirinya. Namun, ketika janji itu mau dipenuhi, kuasa oligarki kemudian menghalangi. Itulah mengapa pemimpin yang lemah sangat mudah ingkar janji. Pemimpin boneka akan selalu memperturut kemauan dalang.

Oligarki politik itu sendiri timbul karena buruknya sistem. Sistem sekular-liberal telah membuka peluang para pemilik modal untuk mencengkeram kekuatan politik yang ada melalui kuasa modalnya. Dengan kekuatan

politik yang dimiliki itu, mereka kemudian mengatur regulasi dan kebijakan demi kepentingan mereka. Di hadapan mereka, negara dengan segenap organ kekuasaannya itu tak lebih sebagai instrumen untuk melancarkan ambisi pembesaran bisnis dan penumpukan kekayaan. Dari kekayaan itu mereka melanggengkan kekuasaan. Begitu seterusnya.

Dua persoalan pokok ini sangat membahayakan masa depan negeri ini. Beban kehidupan rakyat makin berat dengan naiknya berbagai tarif dan pengurangan subsidi. Ketidakadilan hukum, ekonomi dan politik makin menjadi-jadi. Rakyat bakal makin menderita. Kesejahteraan makin jauh dari realita. Bila keadaan buruk ini terus terjadi, bakal menjadi kayu bakar revolusi sosial dan disintegrasi. Ngeri, *kan?*

Jadi, bagaimana sikap umat Islam menapaki 5 tahun ke depan. Apakah ada harapan untuk masa depan yang cerah?

Tidak bisa tidak, kita harus terus berjuang. Kita harus menghadirkan pemimpin yang baik dan sistem yang baik. Melalui kepemimpinan yang baik dan peraturan yang bersumber dari Zat Yang Mahabaik, problematika yang dihadapi negeri ini akan bisa teratasi dengan baik. Tentu karena Allah SWT memang menetapkan Islam dengan aturannya itu sebagai jalan atau cara untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan sebaik-baiknya.

Dijelaskan dalam al Quran surah al-A'raf ayat 96, yang artinya: *Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi.*

Jadi, dengan pemimpin yang baik dan aturan yang baik, insya Allah berkah akan didapat. Saat itulah, gelap akan berlalu, kehidupan yang terang menjelang. Insya Allah. □

AKHLAK SEMPURNA DENGAN TEGAKNYA SYARIAH

Irfan Abu Naveed

A khlik yang mulia ringan diucapkan, namun berat diamalkan. Apalagi di tengah roda kehidupan yang digerakkan oleh ideologi Kapitalisme yang *materialistic oriented*. Persoalan kian pelik tatkala kaum Muslim tak mampu mendudukan hakikat akhlak dalam Islam relevansinya dengan syariah. Akibatnya, sebagian kaum Muslim memfokuskan dakwahnya pada perbaikan akhlak semata. Padahal akhlak adalah karakter, yakni karakter Muslim yang wajib diwujudkan sesuai pemahaman-pemahaman *syar'i*.

Kedudukan Akhlak dalam Islam

Lafal *al-akhlâq* bentuk jamak dari *al-khuluq*. Menurut Al-Azhari (w. 370 H) dalam *Tahdzîb al-Lughah* (VII/18): "*Al-Khuluq: ad-dîn, al-khuluq: kehormatan.*" Hal senada juga ditegaskan oleh Al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H) dalam *Masyâriq al-Anwâr* (I/239), al-Hafizh Ibn al-Atsir (w. 606 H) dalam *Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts* (II/70), dan Ibn Manzhur (w. 711 H) dalam *Lisân al-'Arab* (II/1245).

Makna ini menyiratkan adanya irisan antara akhlak dan *dîn* seseorang. Al-Hafizh Ibn Abdil Barr (w. 463 H) mengetengahkan perkataan Abu al-'Atahiyah dalam *Al-Tamhîd* (XXIV/334):

لَيْسَ دُنْيَا إِلَّا بِدِينٍ وَلَيْسَ الدِّينُ إِلَّا مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

Tidaklah dunia tegak kecuali dengan agama ini dan bukanlah agama ini melainkan akhlak yang mulia.

Akhlik wajib dibangun di atas asas akidah Islam karena bagian dari syariah yang wajib disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah. Dengan demikian setiap Muslim, apalagi pengemban dakwah, wajib berusaha menghiiasi dirinya dengan akhlak mulia. Sifat ini tergambar dalam akhlak sebaik-baiknya teladan, Baginda Rasulullah saw., sebagaimana firman-Nya:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

Sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung (QS al-Qalam [68]: 4).

Menurut para ulama, *khuluq 'azhim* yakni: *Dinul Islam* atau *adab al-Quran*. Menafsirkan ayat yang agung ini, al-Hafizh Abu Ja'far ath-Thabari (w. 310 H) mengatakan: "*Allah berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad saw: Sungguh engkau, wahai Muhammad, memiliki adab yang agung, dan maksudnya itu adalah adab al-Quran yang dengan itulah Allah mengaturnya, yakni Islam dan syariahnya.*"

Ibn Abbas ra. menjelaskan maknanya adalah *dîn 'azhîm* (Dinul Islam yang agung). Dalam riwayat lainnya dari Ibn Abbas ra. dinyatakan:

إِنَّكَ عَلَىٰ دِينٍ عَظِيمٍ وَهُوَ الْإِسْلَامُ

Sungguh engkau (Muhammad saw.) memeluk din yang agung yakni Islam.

Ini pula yang menjadi pendapat al-Dhahhak, Mujahid, Ibn Zaid dan Muqatil. Qatadah sebagaimana dinukil Imam ats-

Tsa'labi (w. 427 H) mengatakan, maknanya yakni apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang.

Ketika menafsirkan ayat ini, Abu Ja'far an-Nahhas dalam kitab *I'râb al-Qur'ân* menuturkan: "Ibn Abu Thalhah, dari Ibn Abbas, berkata: (yakni) dalam *din*. Abu Ja'far mengatakan: Hal ini seperti sabda Rasulullah saw., "*Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlakunya.*" Artinya, orang yang paling baik agamanya, jalannya, mazhab dan ketaatannya. Diperjelas oleh *atsar* dari Ali bin Abi Thalib ra.:

[حُسْنُ الْخُلُقِ فِي ثَلَاثٍ خِصَالٍ: اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، وَ طَلَبُ الْحَلَالِ، وَ التَّوَسُّعُ عَلَى الْعِيَالِ]

Baiknya akhlak tergambar dalam tiga bentuk: menjauhi berbagai keharaman, menunaikan yang halal dan bersikap lapang pada keluarganya (Husain al-Mahdi, Shaid al-Afkar, hlm. 687).

Penafsiran ini dikuatkan dengan pesan agung dalam Hadis Rasulullah saw., yang menggambarkan hubungan keimanan dengan akhlak terpuji:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Penggambaran kemuliaan akhlak sebagai buah dari kesempurnaan iman menunjukkan keutamaan berakhlak mulia sebagai konsekuensi keimanan. Dengan demikian bisa disimpulkan pula bahwa baiknya *khuluq* seseorang erat kaitannya dengan Dinul Islam, yakni keterikatannya dengan syariah Islam. Al-'Allamah Taqiuddin al-Nabhani (w. 1396 H) pun menegaskan bahwa akhlak merupakan bagian dari syariah Islam. Ia terikat dengan

perintah dan larangan Allah.

Akhlak Mulia, Sempurna dengan Tegaknya Dinul Islam

Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan keshalihan akhlak (HR al-Baihaqi dan al-Bazzar).

Dalam redaksi hadis lainnya dalam riwayat al-Bukhari, Ahmad, al-Baihaqi diistilahkan dengan *shâlih al-akhlâq*. Dalam hadis ini, Baginda Rasulullah saw. menekankan besarnya kedudukan akhlak dalam Islam. Lafal *shâlih* dan *makârim* yang ditautkan (*al-idhâfah*) pada lafal *al-akhlâq* jelas menunjukkan kekhususan dari akhlak itu sendiri, yakni kebaikan yang tak terpisahkan darinya.

Menariknya, Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 321 H) dalam *Syarh Musykil al-Âtsâr* (XI/262) menjelaskan, hadis ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah menyempurnakan *Din* itu sendiri:

Makna hadits ini menurut kami—*wallâhu a'lam*—bahwa Allah 'Azza wa Jalla mengutus beliau untuk menyempurnakan bagi manusia *din* mereka dan Allah menurunkan kepada beliau dari apa yang masuk dalam pemaknaan ini, yakni firman-Nya:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»

Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Din-mu (QS al-Maidah [5]: 3).

Dengan demikian pengutusan Nabi Muhammad saw. oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah untuk menyempurnakan bagi manusia syariah beragama mereka. Artinya, telah ada syariah beribadah para nabi sebelum Rasulullah saw., kemudian Allah 'Azza wa Jalla

menyempurnakannya. Ini berdasarkan informasi firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu Din-mu (QS al-Maidah [5]: 3).

Kata *al-ikmâl* semakna dengan *al-itmâm*. Ini menjadi makna dari sabda Rasulullah saw.:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»

Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.

Frasa (*shâlih al-akhlâq*) yakni *shâlih al-adyân*, yakni Dinul Islam.

Imam al-Baji, sebagaimana dinukil oleh Imam al-Zurqani (w. 1122 H) dalam *Syarh al-Zurqani 'Alâ Muwaththa'* (IV/404), menuturkan: Dulu orang Arab dikenal sebagai sebaik-baiknya manusia dari aspek akhlaknya karena apa yang tersisa di sisi mereka dari syariah ajaran Nabi Ibrahim as. Mereka lalu tersesat dari sebagian besar di antaranya. Karena itu diutuslah Rasulullah saw. untuk menyempurnakan *mahâsin al-akhlâq* dengan menjelaskan kesesatannya dan dengan pengkhususan dalam syariahnya.

Al-Hafizh Ibn Abdil Barr al-Andalusi sebagaimana dinukil oleh al-Zurqani (*ibid*, (IV/404) menjelaskan bahwa masuk di dalamnya keshalihan, dan kebaikan seluruhnya, *Din* ini, keutamaan, kehormatan, kebajikan (*al-ihsân*) dan keadilan. Oleh karena itulah diutus Rasulullah saw. untuk menyempurnakannya.

Uraian di atas mengandung pelajaran penting. *Pertama*: Hadis ini menggambarkan visi utama pengutusan Rasulullah saw. adalah untuk menyempurnakan tegaknya *Din* dalam kehidupan, yang diungkapkan secara majazi (kiasan), diwakili kata *akhlak*. Dalam ilmu balaghah, ini merupakan bentuk *dzikr al-juz'i wa irâdat al-kulli* (menyebutkan sebagian

Hadis ini menggambarkan visi utama pengutusan Rasulullah saw. adalah untuk menyempurnakan tegaknya *Din* dalam kehidupan, yang diungkapkan secara majazi (kiasan), diwakili kata *akhlak*. Dalam ilmu balaghah, ini merupakan bentuk *dzikr al-juz'i wa irâdat al-kulli* (menyebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan).
Pasalnya, akhlak bagian dari Dinul Islam itu sendiri.

namun yang dimaksud adalah keseluruhan).
Pasalnya, akhlak bagian dari Dinul Islam itu sendiri.

Kedua: Hadis ini bukanlah dalil untuk fokus pada pembahasan perbaikan akhlak semata, dengan mengabaikan upaya penegakkan syariah Islam dalam kehidupan. Ini diperjelas dengan keberadaan huruf *lam* dalam frasa *li utamimma* yang menunjukkan tujuan dari pengutusan Baginda Rasulullah saw. *Ketiga*: Upaya menyempurnakan akhlak yang mulia terealisasi dengan menegakkan Dinul Islam dalam kehidupan, yang bisa tegak totalitas dalam naungan Khilafah. Tidak bisa fokus pada perbaikan akhlak semata, dengan mengabaikan dakwah penegakkan syariah Islam itu sendiri secara *kaffah*. Hal ini diperjelas dengan Sunnah Rasulullah saw. dalam dakwahnya yang mendakwahkan akidah dan syariah Islam seluruhnya.

Wallâhu a'lam. □



CINTA NABI SAW.

Cinta (*al-hubb, al-mahabbah*) kata Imam Syafii, menggiring orang untuk mengikuti apa pun titah yang dicinta. “*Inna al-muhibbi lima yuhibbuhu muthi’*.”

Cinta itu akan lebih berharga dan berarti bila ditujukan kepada Rasulullah saw. Sebabnya, mencintai beliau—tentu dibuktikan dengan menaanti beliau—adalah bukti kita mencintai Allah SWT. Allah SWT berfirman: *Katakanlah (Muhammad), “Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku...”* (QS Ali Imran [3]: 31).

Selain sebagai bukti cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Nabi saw. juga karena satu hal lain: karena besarnya cinta beliau kepada kita. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa oleh dia penderitaan kalian. Dia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian. Dia amat belas kasihan lagi penyayang kepada kaum Mukmin* (TQS at-

Taubah [9]: 128).

Dalam ayat di atas, frasa ‘*aziz[un]* ‘*alayhi ma ‘anittum* (*Berat terasa oleh dia penderitaan kalian*) menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat bersedih ketika melihat umatnya dalam keadaan susah. Juga saat umatnya bergelimang dosa (Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir*, 3/247).

Perlu dipahami, kata “*umat Rasulullah saw.*” tak hanya meliputi kaum Muslim saja, tetapi semua orang yang hidup setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul hingga Hari Kiamat. Di antaranya kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Beliau sakit karena sedih memikirkan umatnya yang tidak masuk Islam (Lihat: QS asy-Syu’ara [26]: 3). Beliau sedih jika ada umatnya masuk neraka karena kekafiran dan kefasikan mereka.

Lalu frasa *haris[un]* ‘*alaykum* (*Dia sangat menginginkan [keimanan dan keselamatan] bagi kalian*) menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat menghendaki semua umat beliau beriman dan senantiasa ada dalam kebaikan (Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, 7/410).

Keinginan inilah yang membuat beliau berjuang sedemikian rupa. Tentu agar umat beliau mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Beliau rela dihina, dikucilkan, disiksa dan diancam dibunuh agar umatnya mendapatkan kebaikan. Bayangkan, beliau tulus mendakwahi mereka demi kebaikan mereka. Sebaliknya, mereka malah bertindak buruk kepada beliau. Walaupun begitu, beliau tetap mendakwahi mereka dengan penuh rasa sayang.

Inilah makna dari frasa *bi al-mu’minin ra’uf[un]* *rahim[un]* (*Dia amat belas kasihan lagi penyayang kepada kaum Mukmin*). Maknanya, Rasulullah saw. sangat menyayangi umatnya (Al-Jaza’iri, *Aysar at-Tafasir*, 1/115).

Beliau banyak memberikan kebaikan kepada mereka dan khawatir mereka mendapatkan keburukan. Bagaimanapun penderitaan yang beliau rasakan yang ditimpakan oleh umatnya,

beliau tetap bersikap baik kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan: *Beliau dipukuli kaumnya hingga berdarah. Namun demikian, sambil menghapus darah dari wajahnya, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak paham."* (HR al-Bukhari).

Beliau tidak mau umatnya dibinasakan karena menolak dakwah beliau. Padahal umat-umat terdahulu semuanya dibinasakan ketika mereka menolak dakwah para nabi. Misalnya kaum Nabi Nuh as. dibinasakan dengan sebab ditelan banjir besar, kaum Nabi Luth as. dibinasakan dengan sebab hujan batu, dan sebagainya. Hal seperti itu tidak berlaku untuk umat Islam.

Pada suatu ketika, Rasulullah saw., seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr bin al-Ash, tengah membaca kisah Nabi Ibrahim juga Nabi Isa. Setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. *"Ya Allah, umatku, umatku."* Setelah itu beliau menangis. Kemudian Allah befirman, *"Jibril, temuilah Muhammad—Tuhanmu Mahatahu apa yang terjadi. Lalu tanyakan kepada dirinya mengapa ia menangis."* Jibril lalu mendatangi beliau. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi—Dia Mahatahu tentang hal itu. Lalu Allah berfirman, *"Jibril, temuilah Muhammad. Lalu katakan: Kami membuatmu ridha mengenai nasib umatmu dan itu tidak akan mengecewakanmu."* (HR Muslim).

Karena itu cinta Nabi saw. kepada umatnya tak perlu dipertanyakan lagi. Cukuplah kita mendengar Baginda Nabi saw. di penghujung hayatnya sangat mengkhawatirkan umatnya. Saat detik-detik kewafatan beliau, yang beliau pedulikan adalah umat beliau. Bukan keluarga beliau. Beliau bertanya kepada Malaikat Jibril, *"Bagaimana nasib umatku kelak?"* Jibril menjawab, *"Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: Ku Haramkan surga bagi*

siapa pun, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." (HR ath-Thabarani, *Mu'jam al-Kabir*, 3/106).

Demikianlah. Betapa besar cinta Rasulullah saw. kepada kita. Lalu seberapa besar cinta kita kepada beliau?

Terkait itu, suatu saat, Umar bin al-Khatthab ra. pernah mendatangi Rasulullah saw. dan menyatakan cintanya kepada beliau. Umar mengatakan, ia mencintai Rasul saw. dari segala sesuatu, kecuali satu, yakni dirinya sendiri. Rasul pun menegur Umar. Beliau menegaskan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai Rasul mereka melebihi apa pun. Umar pun bergegas mengevaluasi dan mengoreksi pernyataannya. Ia mengatakan, kini sepenuhnya cintanya ditujukan untuk Rasulullah saw. *"(Buktikan) sekarang, wahai Umar!"* titah Rasulullah (HR al-Bukhari).

Para Sahabat mencontohkan kepada kita bagaimana mencintai Rasulullah saw. Abu Bakar ra., misalnya, rela dipukuli kafir Qurays demi melindungi Rasulullah saw. Beliau pingsan. Saat sadar, yang segera ditanyakan adalah Rasulullah saw. Ada juga seorang wanita Anshar. Ia kehilangan anak, suami, ayah dan saudaranya dalam sebuah peperangan. Namun, ketika pasukan kaum Muslim pulang, yang ditanyakan adalah Rasulullah saw.

Sudahkah cinta kita kepada Rasul saw. sebesar cinta para sahabat kepada beliau? Yang pasti, jangan sampai cinta kita kepada Rasul saw. dikalahkan oleh kecintaan kita pada yang lain. Jika itu terjadi, sungguh kita sedang mengundang azab Allah SWT (Lihat: QS Ali Imran [3]: 31).

Jadi, sekali lagi pertanyaannya: Sudahkah cinta kita kepada Rasul saw. sebesar cinta para sahabat kepada beliau? Tentu kita berharap demikian. Amin.

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

'KABINET BARU' DALAM SISTEM KHILAFAH

Dr. Muhammad K. Sadik

Kelak saat Khilafah Rasyidah tegak kembali akan terjadi perubahan besar di dunia. Khalifah bersama seluruh struktur (*jihaz*) dan 'kabinetnya' akan memberlakukan kepada kaum Muslim di dunia konstitusi yang penuh rahmat. Sebuah konstitusi yang digali dari sumber yang agung dan mulia, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Sejak dari benih pertumbuhannya itu Khilafah merupakan negara global. Khilafah akan menghimpun 1.8 miliar orang Muslim di seluruh dunia menjadi umat yang satu dalam pemikiran, perasaan dan system; juga satu kesatuan teritorial dengan segala sumberdaya alamnya yang melimpah. Dengan itu nanti Khilafah dapat menjadi negara terkaya dan terkuat yang akan memegang kendali kepemimpinan dunia pada masa depan.

Kebijakan Berbasis Syariah

Khilafah adalah kunci kegemilangan peradaban Islam. Belum ada peradaban gemilang yang bertahan lebih dari 1300 tahun

kecuali Khilafah. Sejak Rasulullah saw. membangun Negara Islam pertama di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, Islam diterapkan di tengah masyarakat secara nyata.

Hasilnya berupa kemajuan luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat berhasil mencapai titik gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi. Hal tersebut merupakan buah dari penerapan syariah Islam dalam segala lini kehidupan rakyat di dalam institusi Khilafah. Tentu karena Allah SWT telah menjamin akan menurunkan rahmat-Nya ketika syariah diterapkan secara *kâffah*.

Dalam Islam, hubungan pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Khilafah bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Berikut ini beberapa gambaran kebijakan Khilafah yang berbasiskan syariah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan teknologi, serta politik. Ketiga bidang itu merupakan hal penting yang umumnya dijadikan sebagai indikator kemajuan (*development indicator*) suatu negara.

(1). Bidang Ekonomi.

Kebijakan utama Negara Khilafah dalam bidang ekonomi adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat (sandang, pangan dan papan). Negara akan mendorong setiap orang yang memiliki tanggung jawab nafkah untuk bekerja keras. Kalau tidak mencukupi, keluarga terdekatnya wajib membantu. Kalau belum juga, negara harus turun tangan. Negara juga wajib memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya murah atau bahkan gratis.

Negara Khilafah akan mengelola kekayaan alam yang merupakan milik rakyat samata-mata untuk kepentingan rakyat. Kekayaan alam seperti barang tambang yang melimpah merupakan harta milik rakyat atau milik umum. Negara wajib mengelola semua kekayaan itu dengan baik dan amanah untuk kepentingan rakyat. Haram hukumnya kekayaan tersebut diberikan kepada individu, swasta, apalagi negara-negara kapitalis liberal. Kebijakan syariah ini sekaligus akan menghentikan seluruh penjajahan ekonomi negara-negara imperialis yang masuk untuk menguasai kekayaan alam negeri-negeri Islam.

Berdasarkan syariah, negara akan menggerakkan ekonomi riil dan melarang seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung riba. Faktanya, selama ini hutang negara

berbasis riba telah menjadi jalan bagi negara penjajah untuk menguasai negeri-negeri Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem Islam adalah pertumbuhan yang nyata dan stabil karena memang benar-benar berasal dari sektor kegiatan ekonomi riil masyarakat. Negara juga akan mengatur sistem distribusi kekayaan. Sebab buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Hal ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang lebih fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi makro semata tanpa memperhatikan distribusinya. Tidak diperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi itu hasil dari sektor ekonomi riil seperti produksi serta jual-beli barang dan jasa. Ataukah justru berasal dari sektor non-riil seperti perbankan dan pasar modal yang cenderung menghasilkan pertumbuhan semu. Paul Krugman, pemenang Hadiah Nobel tahun 2000, menyebut pertumbuhan semacam itu sebagai ekonomi balon (*bubble economy*) yang secara faktual tidak stabil dan setiap saat dapat meletus menjadi resesi.

Saat ini di Indonesia, seperti yang dilaporkan ADB, terdapat 22 juta rakyat menderita kelaparan (www.republika.co.id/07/11/2019). Dalam konteks global, di semua negara yang menganut sistem kapitalisme telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pada tahun 2018 tercatat bahwa 82 persen kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 61 orang terkaya di dunia. Sebaliknya, sebanyak 3.5 miliar orang miskin di dunia hanya memiliki aset kurang dari US\$ 10 ribu. *Oxfam International* (www.oxfam.org, 22/01/2018) menyebut fenomena ini sebagai gejala sistem ekonomi yang gagal.

Bandingkan dengan masa Khilafah yang sejarah telah mencatat berbagai kejayaan ekonomi saat itu. Bahkan kejayaan tersebut telah muncul pada awal-awal Kekhilafahan

Islam. Misalnya, di era pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khatthab, di berbagai wilayah (provinsi) telah menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, saat itu tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Dulu Muadz adalah staf Rasulullah saw. yang diutus untuk memungut zakat di Yaman.

Muadz pernah mengirimkan hasil zakat yang dia pungut di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah. Itu dilakukan karena Muadz tidak lagi menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Hal yang sama juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semua rakyat pada waktu itu berkecukupan hingga tidak ada lagi orang miskin yang berhak menerima zakat.

Dua hal penting dalam kebijakan pendidikan adalah terkait kurikulum dan pembiayaan. Kurikulum pendidikan dalam Negara Khilafah secara garis besar memiliki tiga komponen pokok yaitu: (i) pembentukan kepribadian Islam; (ii) penguasaan *tsaqâfah* Islam; (iii) penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan). Hal tersebut untuk mencetak generasi unggul yang mahir dalam iptek juga kokoh kepribadian dan keimanannya.

Kemakmuran itu merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, termasuk wilayah Afrika.

(2). Bidang Pendidikan dan Teknologi.

Dua hal penting dalam kebijakan pendidikan adalah terkait kurikulum dan pembiayaan. Kurikulum pendidikan dalam Negara Khilafah secara garis besar memiliki tiga komponen pokok yaitu: (i) pembentukan kepribadian Islam; (ii) penguasaan *tsaqâfah* Islam; (iii) penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan). Hal tersebut untuk mencetak generasi unggul yang mahir dalam iptek juga kokoh kepribadian dan keimanannya.

Khilafah akan menyediakan pendidikan bermutu untuk semua rakyat sebagai kebutuhan dasar secara gratis. Sumber dananya berasal dari pemasukan harta milik negara dan hasil pengelolaan harta milik umum, seperti tambang mineral, migas, hutan, laut, dan sebagainya. Pendidikan yang bermutu tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan rakyat. Syariah telah menetapkan hal itu sebagai hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Selama masa Kekhalifahan Islam dulu, tercatat berbagai universitas terkemuka yang bertaraf internasional. Di antaranya adalah an-Nizhamiyah (1067 - 1401 M) di Baghdad, al-Azhar (975 M - sekarang) di Mesir, al-Qarawiyyin (859 M-sekarang) di Fez Maroko dan Sankore (989 M - sekarang) di Timbuktu Mali Afrika, dan al-Mustanshiriyah yang didirikan oleh Khalifah al-Mustanshir (1226 – 1242 M) di Baghdad.

Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Beberapa lembaga itu berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, al-Firdausi, dan sebagainya.

Tidak hanya menerima murid kalangan warga negara sendiri, lembaga pendidikan Islam ini pun menerima para siswa dari Barat. Pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Sylvester II, turut merasakan keunggulan Universitas Al-Qarawiyyin. Sebelum menjadi Paus, ia sempat menimba ilmu di salah satu universitas terkemuka tersebut.

Kemajuan pendidikan Islam itu juga terbukti menjadi rujukan peradaban lain. Tim Wallace-Murphy menerbitkan buku berjudul *What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization* (London: Watkins Publishing, 2006). Buku tersebut memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari Dunia Islam ke Barat pada Abad Pertengahan. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang kepada Islam dalam hal pendidikan dan sains. Utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapan pun.

Di bidang teknologi dan industri, Khilafah saat itu telah mencapai kemajuan yang sangat tinggi. Donald R. Hill dalam bukunya *Islamic Technology: an Illustrated History* (University of Cambridge, 1986), membuat sebuah daftar panjang berbagai industri yang pernah ada dalam sejarah Islam. Mulai dari industri mesin, bahan bangunan, persenjataan, perkapalan, kimia, tekstil, kertas, kulit, pangan hingga pertambangan dan metalurgi.

(3). Bidang Politik

Kebijakan politik dalam Negara Khilafah adalah mengurus kepentingan rakyat berdasarkan syariah. Khalifah bersama struktur dan 'kabinetnya' akan menjadi pelayan rakyat dan membebaskan mereka dari berbagai bentuk penjajahan politik dan ekonomi. Misal, penjajahan melalui utang luar negeri dan penjajahan atas nama investasi yang berujung pada penguasaan sumber kekayaan alam oleh perusahaan asing. Tentu saja ini jauh berbeda

dengan politik dalam sistem demokrasi yang justru melahirkan banyak kekacauan. Faktanya, DPR sebagai lembaga wakil rakyat justru banyak memproduksi undang-undang yang menindas rakyat dan lebih memihak para pemilik modal.

Negara Khilafah, dalam arah politik luar negerinya, akan menjadi sebuah negara yang memimpin dunia dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Sebuah negara yang layak menjadi harapan seluruh umat manusia, termasuk bangsa-bangsa di kawasan Afrika dan Asia serta Amerika Latin yang saat ini ditindas oleh negara-negara penjajah. Di samping melindungi Muslim di luar negeri, Khilafah juga melindungi *ahlul dzimmah* (non-Muslim), termasuk pula mereka yang meminta perlindungan (*al-musta'min*) atau yang ada perjanjian (*al-mu'ahad*) dengan Khilafah.

Di Museum Hagia Sofia Turki dipamerkan jejak Khilafah Utsmaniyah dalam menjamin perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing, tanpa memandang agama mereka. Di antaranya adalah sertifikat tanah yang diberikan tahun 925 H (1519 M) kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman Inquisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia.

Ada pula surat terima kasih Presiden Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kelaparan (pasca perang dengan Inggris) abad 18. Ada surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir oleh tentara Rusia dan meminta suaka kepada Khalifah, 30 Jumadil Awal 1121 H (7 Agustus 1709). Juga peraturan bebas cukai barang bawaan orang-orang Rusia yang masuk ke wilayah Utsmani pasca revolusi komunis, tertanggal 25 Desember 1920.

Khilafah: Harapan Masa Depan

Saat ini ideologi Kapitalisme sedang berada di tepi jurang keruntuhannya. Ideologi ini

sedang berjuang sekadar untuk memperpanjang masa eksistensinya. Berbagai gejolak politik global terakhir ini akan menjadi rangkaian fase kejatuhan ideologi Kapitalisme. Pada saat yang sama, umat Islam sedang merangkai fase kembalinya ideologi Islam ke pentas kehidupan melalui berdirinya kembali negara Khilafah Rasyidah.

Prediksi keruntuhan peradaban Barat tersebut juga dinyatakan oleh para pemikir mereka. Di antaranya adalah Jean Ziegler, seorang ilmuwan di bidang sosial dan politik Eropa. Ziegler dalam bukunya *The Black Book of Capitalism* menggambarkan Kapitalisme ekonomi global sebagai komunitas pembunuh yang akan dilawan dan diruntuhkan oleh masyarakat dunia. Oswald Spengler, ilmuwan

Jerman, telah menerbitkan buku berjudul *The Decline of the West*. Di antaranya Oswald meramalkan mengenai dekatnya kematian peradaban Barat setelah larut dalam berbagai peperangan global.

Patrick J. Buchanan, anggota tim penasihat utama pemerintahan Amerika, menyatakan hal yang sama dalam bukunya *The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Culture and Civilization*. Dia berpendapat bahwa peradaban Barat saat ini sedang sekarat dan akan segera runtuh. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai kemerosotan ekonomi, sosial dan politik di Eropa dan Amerika.

IMF sendiri juga mengakui kegagalan neo-liberalisme, anak kandung Kapitalisme, dalam mensejahterakan dunia. Benyamin Dangl dalam situs www.commondreams.org (31/5/2016), mengutip laporan Departemen Penelitian IMF yang menyatakan bahwa neo-liberalisme telah gagal. Laporan yang berjudul "*Neoliberalism: Oversold?*" itu telah menunjukkan tanda-tanda kematian ideologi Kapitalisme. Disebutkan bahwa neo-liberalisme telah menyebabkan munculnya 1% orang kaya yang memiskinkan jutaan orang di dunia.

Jadi satu-satunya harapan masa depan adalah tegaknya negara Khilafah Rasyidah yang akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah. Sebuah sistem hukum yang akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi dunia. Kesejahteraan yang tidak hanya berupa hasil dari sistem ekonomi semata; namun juga hasil dari sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Karena itu perjuangan untuk menegakkan syariah secara *kâffah* dalam naungan Khilafah Rasyidah harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □

satu-satunya harapan masa depan adalah tegaknya negara Khilafah Rasyidah yang akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah. Sebuah sistem hukum yang akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi dunia. Kesejahteraan yang tidak hanya berupa hasil dari sistem ekonomi semata; namun juga hasil dari sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Karena itu perjuangan untuk menegakkan syariah secara *kâffah* dalam naungan Khilafah Rasyidah harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia.

ILUSI KESETARAAN GENDER

Arum Harjanti

Kesetaraan gender menjadi isu utama dunia dengan penetapan tahun 2030 sebagai tahun perwujudan *Planet 50x50* dan *SDGs*. Tahun 2020 yang akan datang menjadi tahun yang sangat penting. Pasalnya, pada tahun 2020 itu genap 25 tahun usia Deklarasi Beijing dan Landasan Aksinya.¹ Apalagi sepanjang tahun 2020, banyak momen penting lainnya dalam gerakan hak-hak perempuan abad ke-21. Termasuk Peringatan 10 tahun pendirian *UN Women*.²

Namun kenyataannya, kesetaraan gender belum juga terwujud sebagaimana pernyataan Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka pada pertemuan G7 tahun 2019. *"No country in the world has achieved gender equality. No country. And this is nearly 25 years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action."* Do you remember that in Beijing we thought that we were going to achieve gender equality in the year 2000?³

Keprihatinan sangat besar tersirat dalam pernyataan tersebut. Itu menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah proyek ambisius

dunia demi meningkatkan perekonomian dunia, sebagaimana laporan *McKinsey Global Institute (MGI)*. Laporan tahun 2015 itu menyampaikan, jika menerapkan skenario potensi penuh perempuan, yaitu perempuan memainkan peran identik dengan laki-laki dalam pasar tenaga kerja, maka PDB tahunan global pada tahun 2025 dapat bertambah \$ 28 triliun.⁴

Sejarah Panjang Kesetaraan Gender

Dunia mengalami sejarah panjang untuk sekadar menyetarakan hak perempuan. Bersamaan dengan pendirian PBB, dibentuklah *Commission on the Status of Women (CSW)*. Berderet konferensi diadakan untuk menentukan langkah efektif mewujudkan kesetaraan gender. Kerja strategis PBB di antaranya mengadopsi *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan *The International Conference on Population and Development (ICPD)* di Kairo (1994).

Cetak biru progresif untuk pemberdayaan perempuan makin nyata pada *the United*

Nations Fourth World Conference on Women di Beijing pada tahun 1995. Konferensi ini melahirkan *Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)*. Kerangka Aksi ini dilengkapi 12 bidang yang menentukan langkah strategis dengan fokus pada isu sosial ekonomi yaitu: Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan, Perempuan dan Kesehatan, Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Konflik Bersenjata, Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan, Hak Azasi Perempuan, Perempuan & Media, Perempuan & Lingkungan Hidup dan Anak Perempuan.

Berganti abad, pada *The Milenium Summit September 2000*, diadopsi *the UN Millennium Declaration*, dengan delapan tujuan pembangunan (MDGs) yang akan dicapai pada tahun 2015. Setiap tujuan yang ditetapkan terkait erat dengan memajukan hak-hak perempuan. Promosi kesetaraan gender sendiri dikhususkan dalam Tujuan ke-3.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak perempuan, tahun 2010 Majelis Umum PBB mendirikan *the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)*, bertepatan dengan dengan evaluasi 15 tahun BPfA. Pada tahun 2014 dibuat kampanye solidaritas global *HeForShe* untuk melibatkan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender. Ketika pada tahun 2015 MDGs belum tercapai, UN Women mencanangkan kampanye *Planet 50-50 by 2030* dan *Step It Up* untuk mempercepat perwujudan kesetaraan gender.⁵

Dalam *the World Economic Forum 2015* yang berlangsung di Davos, UN Women mengkampanyekan *HeForShe Impact 10x10x10*, yang melibatkan tokoh pemerintah, perusahaan dan universitas sebagai agen

perubahan.⁶

Ketika MDGs tidak tercapai pada tahun 2015, PBB mengadopsi *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, yang akan dicapai pada tahun 2030. Pada SDGs, kesetaraan gender menjadi tujuan ke lima dari 17 tujuan yang ditetapkan. Lynnette Cooke, CEO Global untuk Divisi Kesehatan Kantar, mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah akselerator untuk semua tujuan yang ada dalam SDGs dan perempuan adalah katalis untuk menciptakan perubahan berkelanjutan di dunia. Oleh karena itu, UN Women kemudian membuat strategi baru, dengan melibatkan keluarga sebagai agen kesetaraan gender.⁷

Dalam laporan UN Women *“Progress of the World’s Women 2019-2020: Family In A Changing World”* digambarkan bahwa pencapaian SDGs bergantung pada promosi kesetaraan gender dalam keluarga.⁸ Kepala Riset dan Data UN Women, Shahra Razavi, mengatakan bahwa keluarga yang dibutuhkan saat ini adalah keluarga yang dapat memenuhi hak-hak perempuan, yang disebut *family that works for women*.⁹

Sementara itu, pada pertemuan G7 di Kanada (2018), PM Kanada Justin Trudeau menginisiasi *Gender Equality Advisory Council of the G7*, yang merekomendasikan tindakan khusus untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang pekerjaan.¹⁰ Setahun kemudian, pada perhelatan yang sama diluncurkanlah *the Biarritz Partnership*, yang menegaskan komitmen untuk mengadopsi undang-undang baru untuk kemajuan kesetaraan gender.¹¹

Sepanjang tahun 2019-2020 akan digelar berbagai agenda untuk memperingati 25 tahun Deklarasi Beijing dan Kerangka Aksinya. Kampanye baru disebut *“Generation Equality—Realizing women’s rights and an equal future”*.¹² Kampanye yang diikuti forum “Beijing + 25 Youth Task Force” ini untuk

melibatkan kaum muda dalam mewujudkan kesetaraan gender.¹³

Ilusi Kesetaraan Gender

Berbagai inisiatif dan kampanye dengan beragam sasaran sudah diluncurkan untuk mempercepat perwujudan kesetaraan gender, namun ternyata belum juga terwujud. Apalagi kesetaraan dalam dua belas bidang sebagaimana yang telah digariskan dalam *BPFA*.

Sebagai sebuah ide, sejatinya kesetaraan gender hanyalah ilusi. Kesetaraan gender, apalagi dalam model *UN Women*, yang mencita-citakan *Planet 50x50*, mustahil dapat diwujudkan karena bertentangan dengan kodrat manusia. Secara fitrah, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT tidak sama. Masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan kodratnya. Memaksakan perempuan menjalani tugas laki-laki—seperti mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam hierarki pemerintahan—akan memberikan beban ganda kepada perempuan.

Selain memperberat hidup perempuan, beban ganda ini akan memberikan dampak buruk bagi anak-anaknya. Peran perempuan sebagai ibu generasi akan terabaikan. Akibatnya, anak-anak akan tumbuh tanpa bimbingan dan sangat potensial melakukan berbagai kenakalan remaja, sebagaimana yang ditunjukkan dalam berbagai penelitian dan mudah terindra dalam realita kekinian. Rentetan dampak buruk hingga membahayakan kehidupan sosial masyarakat bila kesetaraan gender diterapkan menjadi bukti utama bahwa ide ini hanyalah ilusi. Tidak mungkin diterapkan untuk mewujudkan harapan semu para pegiat gender. Ilusi itu makin kentara jika diaplikasikan pada dua belas bidang kritis yang ditargetkan untuk setara, lebih-lebih untuk mewujudkan *Planet 50x50*.

Dalam sistem kapitalis yang sedang berlaku

Sebagai sebuah ide, sejatinya kesetaraan gender hanyalah ilusi. Kesetaraan gender, apalagi dalam model *UN Women*, yang mencita-citakan *Planet 50x50*, mustahil dapat diwujudkan karena bertentangan dengan kodrat manusia. Secara fitrah, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT tidak sama. Masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan kodratnya. Memaksakan perempuan menjalani tugas laki-laki—seperti mencari nafkah dan menjadi pemimpin dalam hierarki pemerintahan—akan memberikan beban ganda kepada perempuan.

saat ini, kesetaraan itu ibarat mantra yang dikaitkan dengan semua target pencapaian. Tentu target pencapaiannya haruslah materialistik. Karena itu tidak soal bagi setiap negara untuk memperdaya perempuan demi pencapaian target kapitalistik yang diukur melalui capaian angka-angka materialistik.

Padahal, jika mau jujur, kesejahteraan perempuan tidak akan pernah terwujud dalam sistem kapitalistik. Pasalnya, dalam praktiknya perempuan dieksploitasi dan mendapat upah yang jauh lebih rendah. Para pemilik modal juga tidak akan rela memberi upah yang tinggi karena berpegang pada prinsip ekonomi kapitalis, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari modal yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, kesetaraan upah laki-laki dan perempuan tidak akan terwujud. Bahkan upah yang layak untuk laki-laki pun hanya mimpi.

Dengan demikian ide setara, apalagi dalam

dua belas bidang kritis, tidak akan mungkin terwujud dalam bingkai Kapitalisme. Apalagi Kapitalisme menjadikan manfaat sebagai asas segala sesuatu dan mekanisme pasar menjadi tempat pijakannya. Lebih dari itu, Kapitalisme hanya berpihak kepada para kapital pemilik modal. Karena itu kesetaraan gender justru bertentangan dengan prinsip ideologi kapitalis itu sendiri, yang memang diskriminatif pada pangkalnya. Inilah yang menjadi sebab hingga kapan pun, kesetaraan hanya sekadar wacana dan bukan realita. Apalagi landasannya adalah akal manusia yang lemah.

Kesejahteraan Riil dalam Islam

Satu-satunya harapan adalah Islam, sistem hidup sempurna yang diturunkan Allah SWT. Islam telah menetapkan berbagai hukum untuk manusia dalam sifatnya sebagai manusia. Islam juga menetapkan hukum-hukum khusus sesuai dengan jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hukum ini bukanlah menjadikan perempuan lebih rendah, karena dalam Islam kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Perbedaan hukum ini, misalnya kewajiban mencari nafkah ada pada laki-laki, warisan laki-laki dua kali bagian perempuan, dan sebagainya, justru menjamin perwujudan peran masing-masing sesuai dengan kodratnya.

Islam juga menetapkan negara sebagai pengatur urusan umat, yang wajib memenuhi kebutuhan umat, laki-laki maupun perempuan. Islam memiliki mekanisme sempurna yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat, dan justru melarang negara menggunakan mekanisme pasar dalam melayani rakyatnya. Dalam Islamlah keadilan akan didapatkan setiap individu rakyat, karena semua aturan dilandaskan kepada aturan Allah, Zat Yang Mahaadil.

Wallâhu a'lam bish shawâb. ☐

Satu-satunya harapan adalah Islam, sistem hidup sempurna yang diturunkan Allah SWT. Islam telah menetapkan berbagai hukum untuk manusia dalam sifatnya sebagai manusia. Islam juga menetapkan hukum-hukum khusus sesuai dengan jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Perbedaan hukum ini bukanlah menjadikan perempuan lebih rendah, karena dalam Islam kemuliaan manusia terletak pada ketakwaannya kepada Allah.

Catatan kaki:

- ¹<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/9/speech-ed-phumzile-from-biarritz-partnership-to-generation-equality-forum>
- ² <https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about>
- ³ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/speech-ed-phumzile-g7-ministerial-meeting>
- ⁴<https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth>
- ⁵ <https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/9/timeline-un-at-70-gender-equality>
- ⁶ <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/01/emma-watson-launches-10-by-10-by-10>
- ⁷ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/6/take-five-lynette-cooke>
- ⁸ <http://www.unwomen.org/en/digital-library/progress-of-the-worlds-women>
- ⁹ <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/5/take-five-shahra-razavi-families>
- ¹⁰<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/6/news-gender-equality-advisory-council-to-g7-calls-for-bold-actions-and-investments>
- ¹¹<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/news-ed-urges-g7-leaders-to-commit-to-gender-equality-and-join-biarritz-partnership>
- ¹² <https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about>
- ¹³ <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/announcer-beijing25-youth-task-force>

PROBLEM ASASI EKONOMI (Pasal 124 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûn*)

Di dalam pasal ini ditetapkan bahwa problem ekonomi bertumpu pada distribusi harta dan jasa bagi seluruh individu rakyat serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya. Redaksi Pasal 124 adalah sebagai berikut:

اَلْمُسْكِلَةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ هِيَ تَوَزُّعُ الْاَمْوَالِ وَ الْمَنَافِعِ
عَلَى جَمِيعِ اَفْرَادِ الرِّعْيَةِ وَ تَمْكِينُهُمْ مِنَ الْاِثْتِفَاعِ بِهَا
بِتَمْكِينِهِمْ مِنْ حَيَاتِهَا وَ مِنَ السَّعْيِ لَهَا

Problem ekonomi bertumpu pada distribusi harta dan jasa atas seluruh individu rakyat dan bagaimana memampukan mereka dalam memanfaatkan harta dan jasa tersebut dengan (cara) memberikan kesanggupan mereka dalam memperoleh dan mengusahakannya.

Pasal ini menjelaskan bahwa problem ekonomi memiliki dua persoalan krusial yang harus dipecahkan dengan solusi yang benar: *Pertama*, kemiskinan individu. *Kedua*, kesanggupan setiap individu rakyat untuk mendapatkan kekayaan dan memanfaatkannya.

Pertama, kemiskinan individu. Ia ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Quran dan Sunnah

yang menuturkan kedudukan orang fakir, miskin dan Ibnu Sabil (orang yang kehabisan perbekalan dalam suatu perjalanan). Nash-nash yang membicarakan persoalan ini sangat banyak dan beragam. Ini agar persoalan ini benar-benar diperhatikan dan ditempatkan sebagai persoalan ekonomi yang sangat penting. Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

﴿وَأَصْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

(Sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir (QS al-Hajj [22]: 28).

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ﴾ ۞ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan, niscaya kalian akan diberi pahala dengan cukup dan sedikit pun kalian tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah (QS al-Baqarah [2]: 272-273).

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

Sungguh zakat-zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, miskin, pengurus-pengurus



zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (QS at-Taubah [9]: 60).

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan (QS al-Hasyr [59]: 7).

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾

(Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) (QS al-Hasyr [59]: 8).

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

Jika kamu menampakkan sedekah (kalian) maka itu adalah baik sekali. Jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu (QS al-Baqarah [2]: 271).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin (QS al-Baqarah [2]: 184).

﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾

Siapa saja yang tidak kuasa (wajiblah atas

dirinya) memberi makan enam puluh orang miskin (QS al-Mujadilah [58]: 4).

Ayat ini berkaitan dengan kasus suami yang men-*zhihar* istrinya.

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

Mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan (QS al-Insan [76]: 8).

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

...atau memberi makan pada hari kelaparan; (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat; atau orang miskin yang sangat fakir (QS al-Balad [90]: 14-16).

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾

...dan memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta (QS al-Baqarah [2]: 177).

Demikian pula ayat-ayat lain yang semakna.

Di dalam hadis dituturkan bahwa Rasulullah saw. Pun bersabda:

«مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَرَّئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرَّئْتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى»
Siapa saja yang menyimpan makanan selama 40 malam, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah SWT pun berlepas diri dari



dirinya. Siapa saja penduduk suatu 'arashah (tanah lapang yang tidak ada bangunan di atasnya), yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka (HR Ahmad).

Di dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

«مَا آمَنَ بِي مِنْ بَاتٍ شَبَعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهِ»

Tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sisinya dan ia tahu (HR al-Bazzar).

Masih banyak lagi riwayat-riwayat yang memiliki arti yang sama.

Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas berbicara tentang infaq, hukum sedekah, hukum zakat serta dorongan untuk memberi makan kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan orang-orang fakir. Seluruhnya menunjukkan bahwa persoalan ekonomi adalah kefakiran individu, yakni buruknya distribusi kekayaan kepada setiap individu rakyat. Problem tersebut harus diselesaikan hingga harta kekayaan sampai di tangan setiap individu rakyat.

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa distribusi harta kekayaan harus menyentuh setiap individu masyarakat. Agar distribusi tersebut mampu menyentuh setiap individu rakyat, maka orang-orang yang terhalang dalam mendapatkan harta dan jasa haruslah diberi solusi. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin dan ibnu sabil. Inilah dalil yang mendasari bagian pertama dari pasal di atas.

Adapun bagian kedua dari pasal di atas, yakni (kesanggupan setiap individu rakyat untuk memperoleh dan mengusahakan harta dan jasa), dalilnya adalah Allah SWT membolehkan kepemilikan secara umum pada

Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas berbicara tentang infaq, hukum sedekah, hukum zakat serta dorongan untuk memberi makan kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan orang-orang fakir. Seluruhnya menunjukkan bahwa persoalan ekonomi adalah kefakiran individu, yakni buruknya distribusi kekayaan kepada setiap individu rakyat. Problem tersebut harus diselesaikan hingga harta kekayaan sampai di tangan setiap individu rakyat.

semua sebab (kepemilikan) yang dibolehkan. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah maka tanah itu menjadi miliknya (HR Abu Dawud).

Allah SWT berfirman:

﴿أَحَلَّ لَكُم مِّنْهُنَّ مَا كُنْتُمْ يَسْتَفْتُونَ﴾

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut (QS al-Maidah [5]: 96).

Keumuman dalil yang membolehkan kepemilikan dan sebab-sebabnya, baik untuk Muslim maupun kafir *dzimmi*, menunjukkan “kesanggupan mereka dalam mendapatkan dan mengusahakan harta”. Begitu juga dalil yang membolehkan pemanfaatan harta dengan cara dikonsumsi, dipakai, ditinggali atau dinikmati, datang dalam bentuk umum. Allah SWT



berfirman:

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾

Makanlah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian (QS al-An'am [6]: 142).

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik? (QS al-A'raf [7]: 32).

Masih banyak ayat lain yang memiliki pengertian sama.

Ayat-ayat di atas datang dalam bentuk umum, mencakup pemanfaatan harta oleh setiap individu rakyat, baik Muslim maupun kafir *dzimmi*.

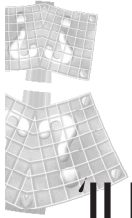
Dengan ungkapan lain, problem ekonomi bertumpu pada distribusi kekayaan, bukan produksi kekayaan. Sebabnya, persoalan asasi ekonomi adalah kefakiran individu dan ketidakmampuan mereka memperoleh dan memanfaatkan kekayaan, bukan kefakiran negara dan kebutuhan negara terhadap kekayaan. Alhasil, problem asasi ekonomi adalah distribusi, bukan produksi.

Berdasarkan keumuman ayat-ayat yang menjelaskan kebolehan memiliki harta, sebab-sebab untuk mendapatkan harta, serta pemanfaatannya, dapat disimpulkan bahwa syariah telah menempatkan setiap individu rakyat dalam keadaan melakukan kegiatan "memperoleh dan memanfaatkan harta".

Berdasarkan dalil-dalil syariah di atas dapat disarikan bahwa syariah Islam telah menjelaskan problem asasi ekonomi sekaligus solusinya, yakni kefakiran individu dan ketidakmampuan setiap individu rakyat memperoleh dan memanfaatkan harta. Pada saat problem ini terjadi, syariah memberikan solusi dengan jalan membolehkan setiap individu memiliki dan memanfaatkan harta dengan pembolehan yang sifatnya umum. Pembolehan individu memiliki dan memanfaatkan harta akan mendorong dirinya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti bekerja, berburu, membuat pabrik, dan sebagainya. Dengan mekanisme seperti ini, setiap individu terdorong secara maksimal memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri, sekaligus memanfaatkan harta yang ia miliki untuk kepentingannya sendiri maupun orang lain. Dengan itu problem kefakiran diri bisa diselesaikan dengan cara alami. Kebolehan memiliki harta dan memanfaatkan yang sifatnya umum merupakan prinsip dasar dalam mengatur urusan-urusan perekonomian.

Ini adalah problem asasi ekonomi. Dengan ungkapan lain, problem ekonomi bertumpu pada distribusi kekayaan, bukan produksi kekayaan. Sebabnya, persoalan asasi ekonomi adalah kefakiran individu dan ketidakmampuan mereka memperoleh dan memanfaatkan kekayaan, bukan kefakiran negara dan kebutuhan negara terhadap kekayaan.

Alhasil, problem asasi ekonomi adalah distribusi, bukan produksi. [Bersambung] [Gus Syams]



'ILLAT QIYASIYAH

أَنْوَاعُ الْعِلَّةِ – الْعِلَّةُ الْقِيَاسِيَّةُ

Satu dari empat jenis *'illat* adalah *al-'illat al-qiyâsiyah*, yakni *'illat* yang diambil melalui *qiyas*. *'Illat qiyâsiyah* ini tidak dinyatakan langsung oleh dalil *syar'î*. Akan tetapi, nas syariah menyatakan *'illat* semisalnya dari jenis dan substansinya. *'Illat* yang tidak dinyatakan oleh dalil syariah itu di-*qiyas*-kan pada *'illat* yang dinyatakan oleh nas syariah sebab aspek *at-ta'lîl* (penjelasan alasan) di dalamnya telah dinyatakan oleh nas syariah.

'Illat yang padanya *'illat qiyâsiyah* itu di-*qiyas*-kan harus diambil dari nas yang memberikan konotasi *at-ta'lîl* (penjelasan alasan) dan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas, hubungan sebab-akibat). Artinya, *wajhu al-'illiyah* yang menjadi dasar peng-*qiyas*-an di situ telah dinyatakan oleh nas syariah. Dengan begitu *'illat* tersebut bisa dinilai sebagai bagian dari wahyu. Jadi wahyu menyatakan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) itu.

Inilah kondisi yang membolehkan *qiyas 'illat* terhadap *'illat* yang lain. Selain kondisi seperti itu tidak boleh. Sebabnya, peng-*qiyas*-an *'illat* terhadap *'illat* lainnya itu seperti peng-*qiyas*-an hukum yang tidak dinyatakan oleh dalil syariah terhadap hukum yang dinyatakan oleh dalil syariah. Peng-*qiyas*-an hukum terhadap hukum yang lain hanya boleh jika hukum pokok yang menjadi sandaran peng-*qiyas*-an itu disertai *'illat syar'iyah* yang ditunjukkan oleh nas syariah. Tidak boleh meng-*qiyas*-kan hukum terhadap hukum lain hanya karena adanya kemiripan di antara keduanya.

Demikian juga peng-*qiyas*-an *'illat* terhadap *'illat* yang lain. Ia hanya boleh jika *'illat* pokok yang menjadi sandaran peng-*qiyas*-an itu disertai penjelasan sebab keberadaannya sebagai *'illat* dan penjelasan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas)-nya oleh syariah. Oleh karena itu, tidak boleh meng-*qiyas*-kan *'illat*



terhadap 'illat lain hanya karena adanya kemiripan di antara kedua 'illat itu.

Jadi tidak boleh peng-*qiyas*-an 'illat kecuali pada sifat yang mengandung konotasi *at-ta'îl* (penjelasan alasan) dan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) di dalamnya. Hal itu karena peng-*qiyas*-an 'illat terhadap 'illat lainnya harus mengandung penjelasan *wajhu al-'illiyah* dalam 'illat pokok itu yang berasal dari *Asy-Syâri* atau dari *madlûl* secara bahasa dari nas syariah. Jika ada penjelasan itu maka di dalam 'illat itu ada sesuatu yang membolehkan peng-*qiyas*-an terhadapnya, yaitu *wajhu at-ta'îl* (aspek penjelasan alasan). Hal itu sama persis dengan adanya 'illat pada hukum pokok yang terjadi peng-*qiyas*-an padanya. Jika di dalam 'illat pokok itu ada penjelasan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) oleh syariah, yakni nas yang menjadi dalil 'illat itu menjelaskan *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) di dalamnya, maka boleh dilakukan peng-*qiyas*-an 'illat terhadap 'illat tersebut. Jika tidak ada penjelasan maka tidak boleh dilakukan peng-*qiyas*-an 'illat terhadap 'illat itu.

Jadi agar bisa dilakukan peng-*qiyas*-an suatu 'illat cabang ('illat *qiyâsiyah*) pada 'illat pokok, di dalam 'illat pokok itu harus ada penjelasan dari nas Syariah—baik secara gamblang atau dipahami dari *madlûl* nas syariah itu—sebab 'illat pokok itu ditetapkan menjadi 'illat. Jika sebab itu juga ada pada 'illat cabang maka 'illat cabang itu secara *syar'i* bisa dinilai sebagai 'illat sebagaimana 'illat pokok. 'Illat cabang itulah yang disebut 'illat *qiyâsiyah*.

'Illat *qiyâsiyah* ditetapkan sebagai 'illat dengan di-*qiyas*-kan pada 'illat yang oleh nas syariah ditetapkan sebagai 'illat dan pada keduanya ada penghimpun *syar'i*, yakni sebab 'illat pokok itu menjadi 'illat *syar'i*. Dengan begitu 'illat *qiyâsiyah* itu merupakan 'illat *syar'i* dan hukum yang beredar bersama 'illat *qiyâsiyah* itu juga merupakan hukum syariah.

Dari hasil pengelaborasi, tidak ada

penjelasan hal itu kecuali pada satu kondisi, yaitu 'illat pokok itu diambil dari sifat yang mengandung konotasi untuk penjelasan alasan (*washf[un] muhfim[un] li at-ta'îl*) dan mengandung konotasi aspek kausalitas di dalamnya (*muhfim[un] wajha al-'illiyah fih*). Selain hal demikian tidak boleh dilakukan peng-*qiyas*-an dalam 'illat sama sekali. Jadi tidak boleh dilakukan peng-*qiyas*-an terhadap 'illat *mustanbathah*. Juga tidak boleh dilakukan peng-*qiyas*-an terhadap 'illat yang diambil dari sifat yang tidak mengandung konotasi. Tidak boleh juga dilakukan peng-*qiyas*-an terhadap *isim jamid* karena itu bukan sifat dan tidak mengandung makna *al-'illiyah* (kausalitas).

Jadi untuk bisa dilakukan peng-*qiyas*-an 'illat terhadap 'illat lain ('illat pokok), maka 'illat pokok itu harus dinyatakan dalam bentuk: 1. *Washfun muhfimun li at-ta'îl* (sifat yang mengandung konotasi untuk penjelasan alasan/sebab). 2. *Muhfimun wajha al-'illiyah* (mengandung konotasi aspek kausalitas). 3. Lafalnya merupakan isim *musytâqq[un]*, yaitu kata derivatif yang dibentuk dari kata dasarnya menurut pola (*wazan*) tertentu. Lafalnya tidak boleh berupa *isim jâmid* (isim non derivatif).

Contoh sifat yang disebutkan oleh nas syariah bersamaan dengan hukum dan lafalnya yang mengandung konotasi *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) menurut bahasa adalah sabda Rasul saw.:

«لَا يَفْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ»

Janganlah seorang qâdhi memutuskan perkara di antara dua orang, sementara dia sedang marah (HR Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasai, asy-Syafii, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Sabda Rasul saw. ini menyatakan bahwa marah itu menjadi sebab ketidakbolehan *qâdhi* menetapkan keputusan. Jadi marah itu menjadi 'illat yang menghalangi penetapan keputusan.



Lafal *ghadhbânu* merupakan isim *musytâqq* dari kata dasar *ghadhiba* menurut *wazan* (pola) *fa' lân*. Dari sifat *al-ghadhab* itu bisa dipahami keberadaannya sebagai '*illat* atau *wajhu at-ta' l'il* (aspek penjelasan alasan) untuk larangan menetapkan keputusan. Dapat dipahami pula, *wajhu al-'illiyah* (aspek kausalitas) yang membuat kata itu menjadi '*illat* adalah adanya kerancuan pikiran dan kekacauan keadaan. Karena itu apa saja yang bisa menimbulkan kerancuan pikiran dan kekacauan keadaan seperti kelaparan, sakit kepala, pusing, demam tinggi, menggigil kedinginan atau lainnya, bisa di-*qiyas*-kan terhadap '*illat*, yakni *al-ghadhab* (marah) ini. Dengan demikian seorang *qâdhi* dilarang menjatuhkan keputusan dalam keadaan kelaparan, demam tinggi, menggigil kedinginan dan keadaan lainnya yang menyebabkan kerancuan pikiran dan kekacauan keadaannya. Semua itu merupakan '*illat qiyâsiyah*.

Contoh sifat yang disebutkan oleh *Asy-Syâri'* bersama dengan hukum dan ada nas syariah yang menjelaskan aspek peng- '*illat*-an di dalamnya adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ أَنْ يُتْلَى الْجَلْبُ،
فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَأَبْتَاغَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا
بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقُ»

Nabi saw. melarang barang yang datang dicegat (di tengah jalan). Jika seseorang mencegat barang yang datang, lalu dia beli, maka pemilik barang memiliki pilihan jika ia telah masuk (sampai) ke pasar (HR at-Tirmidzi, Abu Ya'la, Abu 'Awanah dan al-Baghawi).

Talaqqiy al-jalbi (mencegat orang yang mendatangkan barang) itu menjadi '*illat* ketidakbolehan jual-belinya. Aspek keberadaannya sebagai '*illat* adalah ketidaktauan pemilik barang atas harga pasar,

sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas itu sendiri, "*idzâ warada as-sûqa*" yakni jika dia mengetahui harga pasar. Jadi yang menyebabkan pencegatan orang yang mendatangkan barang itu menjadi '*illat* adalah tidak adanya pengetahuan atas harga pasar. Karena itu kondisi lainnya yang di situ ada ketidaktauan atas harga pasar bisa di-*qiyas*-kan pada *talaqqiy al-jalbi* dan membuat orang yang ada dalam kondisi itu tidak boleh menjual-beli. Misalnya, orang yang baru keluar dari penjara atau pulang dari bepergian dalam waktu lama, meski dia tinggal di kota itu. Begitu pula orang yang datang dari kampung meski tidak membawa barang, dia dilarang menjual-beli. Orang-orang seperti ini, jika terlanjur melakukan jual-beli, maka ketika dia mengetahui harga pasar, dia memiliki *khiyâr* antara membatalkan jual-belinya atau menerima dan melanjutkannya.

Adapun ketentuan pertukaran enam jenis harta: *adz-dzahab* (emas), *al-fidhdhah* (perak), *at-tamru* (kurma), *asy-sya'îru* (jewawut), *al-khinthah* (gandum), *al-milhu* (garam), jika sama jenisnya harus sama, dan jika saling berlebih maka riba, hal itu hanya berlaku pada enam jenis itu. Sebabnya, keenamnya merupakan isim *jâmid*, bukan sifat, tidak mengandung konotasi makna kausalitas, dan tidak menyatakan *at-ta' l'il* secara bahasa maupun *syar'i*.

Demikian juga ketentuan kewajiban zakat pada *adz-dzahab* (emas), *al-fidhdhah* (perak), *at-tamru* (kurma), *al-khinthah* (gandum), *asy-sya'îr* (jewawut), *az-zabîb* (kismis), *al-ibil* (unta), *al-baqaru* (sapi) dan *al-ghanam* (domba/kambing), hanya berlaku pada jenis itu saja. Jenis yang lain tidak bisa di-*qiyas*-kan padanya. Sebabnya, semuanya merupakan isim *jâmid*, tidak mengandung konotasi *at-ta' l'il* maupun penjelasan kausalitas (*al-'illiyah*).

WalLâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

RIKAZ

(Di Antara Sebab Kepemilikan Harta)

«... وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

Di dalam rikaz ada (kewajiban) khumus (seperlima)” (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Timridzi, an-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, asy-Syafii, Malik, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah ra. Hadis senada juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Amru bin al-'Ash, Jabir, Ibnu Abbas, Amru bin 'Awf al-Muzani *radhiyallâh 'anhum* dan lainnya. Hadis Anas ra. diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazar. Hadis Amru bin 'Auf al-Muzani diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis Jabir ra. diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazar.

Diriwayatkan dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ،
فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقِ مَائِيَّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ
فَعَرَفْتُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ
يَكُنْ فِي طَرِيقِ مَائِيَّ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ»

Rasulullah saw. pernah ditanya tentang luqathah, beliau bersabda, “Apa yang ada di jalan yang dilalui orang atau di kampung yang hidup maka umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka serahkan kepada dia) dan jika tidak maka untukmu. Apa yang tidak di jalan yang biasa dilalui dan tidak di kampung yang hidup (yang ditinggali) maka di dalamnya dan di dalam rikaz ada khumus (seperlima).” (HR an-Nasa’i, Abu Dawud dan al-Baihaqi. Redaksi menurut an-Nasa’i).

Ibnu Abbas ra. menuturkan:

«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ»

Rasulullah saw. telah memutuskan bahwa di dalam rikaz ada khumus (seperlima) (HR Ibnu Abi Syaibah dan al-Bazzar).

Ar-Rikâz adalah bentuk isim dari *rakaza*. Secara bahasa maknanya *atsbata* (menetapkan/ menancapkan). *Rakaza al-watada*, maknanya *atsbatahu fi al-ardhi* (dia menancapkannya di tanah).

Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari al-Harawi (w. 370 H) di dalam *Az-Zâhir fi Gharîb Alfâzh asy-Syâfi’i* menyatakan, *ar-rikâz* menurut dua aspek. *Pertama*, harta yang ada tertimbun di bumi merupakan *rikâz* sebab penimbunnya menetapkan (membenamkan)-nya di dalam tanah seperti patok ditancapkan di tanah. *Kedua*, urat emas dan perak yang ditumbuhkan Allah SWT di dalam tanah lalu dikeluarkan dengan penanganan seolah Allah membenamkannya di dalam tanah.

Abu ‘Ubaid al-Qasim di dalam bukunya, *Gharîb al-Hadîts*, menyatakan: Terkait sabda Nabi saw., “dan di dalam rikâz ada khumus”, *ahlu* Irak berbeda pendapat dengan *ahlu* Hijaz. *Ahlu* Irak berkata, *rikâz* adalah semua mineral tambang. Karena itu mineral tambang apa saja yang dikeluarkan, bagi yang mengeluarkannya empat perlima dari apa yang dia peroleh dan untuk Baitul Mal seperlima. Mereka mengatakan, demikian

juga harta orang dulu yang tertimbun di dalam tanah; itu semisal mineral tambang. Asal *rikâz* adalah *al-ma'din* (mineral tambang) sedangkan harta orang dulu yang dulu dimiliki manusia diserupakan dengan *ma'din*. Sebaliknya, *ahlu Hijaz* berkata, *rikâz* tidak lain harta yang tertimbun khususnya dari simpanan Bani Adam sebelum Islam. Adapun *al-ma'din* bukan *rikâz*.”

Ibnu al-Atsir (w. 606 H) di dalam *An-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Âtsar* dan Ibnu Manzhur (w. 711 H) di dalam *Lisân al-‘Arab* menyatakan, dua pendapat ini dimungkinkan oleh bahasa. Sebab keduanya dikubur di dalam tanah, yakni *tsâbit* (terbenam ada di dalam tanah). Dikatakan, *rakazahu yarkuzuhu rakzan*, yakni *dafanahu* (menguburnya).

Harta umat dulu yang tertimbun di dalam tanah merupakan *rikâz* dinyatakan oleh hadis di atas.

Al-Ma'din juga merupakan *rikâz*. Selain karena makna secara bahasa mencakup, juga didukung oleh beberapa riwayat. Ibnu Abi ‘Ashim di dalam *Al-Âtsâr wa al-Matsâniya* dan ath-Thabarani di dalam *Mu’jam al-Kabîr* meriwayatkan Nabi saw. bersabda (penggalannya):

«... وَفِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ»

...dan pada as-suyub wajib (dipungut) khumus (seperlima).

As-Suyûb adalah jamak dari *as-sayb*, yakni urat emas dan perak yang terbenam di dalam tanah. Ini termasuk *ma'din*.

Humaid bin Zanjawaih an-Nasai di dalam *Al-Amwâl li Ibnî Zanjawaih* menyebutkan bahwa Ali bin Abiy Thalib ra. menjadikan *al-ma'din* sebagai *rikâz* dan mewajibkan *khumus* di dalamnya. Riwayat semisalnya juga diriwayatkan dari az-Zuhri. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Makhul bahwa Umar bin al-Khathab ra. menjadikan *al-ma'din* pada posisi *rikâz*. Di dalamnya ada kewajiban khumus.

Jadi *rikâz* mencakup harta dan mineral

tambang yang ada di dalam tanah. Hanya saja, terkait dengan mineral tambang (*al-ma'din*), menurut hadis Abyadh bin Hamal, ada yang termasuk milik umum. Begitu pula yang tertimbun di dalam tanah selain berupa mineral tambang, juga ada dalam asli seperti pasir dan batu. Lalu apakah semua termasuk *rikâz*, atau sebagiannya bukan *rikâz*?

Al-‘Allamah Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm* menyatakan: “Patokannya, apa yang tersimpan di dalam tanah karena perbuatan manusia atau jumlahnya terbatas tidak sampai kadar di mana jamaah atau komunitas memiliki keperluan di dalamnya, maka itu adalah *rikâz*. Apa yang bersifat asli (bukan buatan manusia) dan jamaah atau komunitas memiliki keperluan di dalamnya tidak merupakan *rikâz*. Itu merupakan milik umum. Adapun apa yang sifatnya asli (bukan buatan manusia) tetapi jamaah atau komunitas tidak memiliki keperluan di dalamnya, seperti tempat penambangan batu yang darinya dikeluarkan batu untuk bangunan dan lainnya maka bukan merupakan *rikâz* dan bukan pula milik umum. Itu masuk dalam kepemilikan individu. Kepemilikan *rikâz* dan pengeluaran seperlimanya hal itu telah ditetapkan di dalam hadis.”

Hadis-hadis di atas jelas menyatakan bahwa pengeluaran *rikâz* menjadikan *rikâz* yang dikeluarkan itu menjadi milik orang yang mengeluarkannya setelah seperlimanya dibayarkan ke Baitul Mal. Dengan begitu, mengeluarkan kandungan bumi atau *rikâz* menjadi salah satu sebab kepemilikan harta. Al-‘Allamah an-Nabhani *rahimahullâh* menyatakan, “Dengan jenis aktivitas mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi dengannya juga dikaitkan aktivitas mengeluarkan apa yang ada di udara, seperti mengekstrak oksigen dan ozon. Demikian pula mengeluarkan apa saja yang diciptakan oleh Allah yang dibolehkan oleh syariah dan dibolehkan untuk dimanfaatkan.”

Wallâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

NASIB TRAGIS MASJID BABRI DI INDIA

Mahkamah Agung India pada tanggal 9 November 2019 akhirnya memberikan putusan akhir tentang Kasus Masjid Babri atau Kasus Ayodhya. Gugatan berjalan selama beberapa dekade terkait kepemilikan atas tanah 2,77 hektar di mana masjid yang berusia 450 tahun itu berdiri. Pertikaian muncul dari klaim umat Hindu bahwa di lokasi tempat Masjid Babri dibangun, di Ayodhya (yang dikenal sebagai Oudh dalam sejarah), adalah tempat Dewa Hindu Ram lahir (sekitar 900.000 tahun yang lalu). Lima anggota Mahkamah Agung India memutuskan dengan suara bulat menyerahkan secara penuh kepada umat Hindu kepemilikan atas tanah 2,77 hektar untuk dibangun Kuil Ram. Umat Islam diberikan kompensasi tanah kosong seluas 5 hektar di dekatnya untuk pembangunan sebuah masjid.

Masjid Babri diketahui dibangun oleh Komandan Mir Baqi pada tahun 1528 M di bawah perintah Sultan Mahmud Babur. Hampir 350 tahun kemudian, Mahant Raghib Das meminta legalitas Pengadilan Faizabad pada tahun 1885 untuk membangun sebuah kuil di sekitar Masjid Babri, namun ditolak. Ini adalah langkah hukum pertama yang diketahui dalam perselisihan ini yang berlangsung lebih dari seabad. Banyak gugatan hukum dan gerakan politik, yang secara bertahap mengamankan kepentingan untuk Ram Mandir (Hindu).

Ditambah lagi kerusuhan komunal yang digerakkan politisi Hindu untuk semakin menguatkan posisi kelompok Hindu atas Masjid Babri (Muslim).

Kaum Muslim diusir dari tanah masjid seluas 1500 meter persegi itu lewat tindakan kerusakan selama kerusuhan komunal pada tahun 1934, juga penodaan kesucian masjid pada malam tanggal 22 dan 23 Desember. Puncaknya adalah pembongkaran masjid itu pada tanggal 6 Desember 1992 oleh tangan-tangan militan hindu 'Kar Sevaks' yang memicu kerusuhan komunal nasional selama beberapa tahun. Kerusuhan ini menyebabkan kematian lebih dari dua ribu orang.

Diketahui bahwa umat Islam tidak (atau tidak dapat) menolak keberadaan para penyembah berhala Ram di halaman masjid yang disebut Ram Chabutra sekitar tahun tahun 1949. Namun, pada malam menjelang Desember 1949, berhala-berhala itu dipindahkan oleh para penjahat ke dalam masjid bagian dalam sehingga memicu konflik. Pemerintah negara bagian Uttar Pradesh (UP) melakukan intervensi untuk menahan kedua belah pihak dan diikuti oleh perintah Pengadilan pada tahun 1950 yang tidak membolehkan berhala itu dihilangkan. Keadaan ditetapkan dalam status-quo. Ini berarti tidak ada pihak yang diizinkan memasuki masjid. Pada tahun

1959, sebuah gugatan diajukan oleh Nirmohi Akhara (penjaga asketis para penyembah Ram) yang mengklaim hak atas bangunan yang dipersengketakan.

Pada bulan Desember 1961, UP Central Sunni Wakaf Board mengajukan gugatan untuk menguasai masjid itu dan memindahkan berhala-berhala itu. Pada bulan Februari 1986, Pengadilan Faizabad memerintahkan kunci-kunci masjid dibuka sehingga memungkinkan umat Hindu untuk berdoa di belakang pagar yang jauh dari masjid bagian dalam. Pada bulan Juli 1989, gugatan lain yang diajukan untuk mengklaim tempat yang disengketakan itu adalah Ram Lalla Virajman (Dewa Bayi Ram), Ram Janmasthan (Tempat Suci) yang diwakili oleh "teman berikutnya" Triloki Nath Pandey (yang mewakili umat Hindu).

Komitmen untuk membangun Kuil Ram di Ayodhya dan mengubah India menjadi negara Hindu Rashtra menjadi kampanye sektarian Partai Bharatiya Janata (BJP). Partai hindu radikal India menjadi penguasa India saat ini dengan mayoritas mutlak lebih dari dari 270 kursi Parlemen. Padahal pada tahun 1980-an mereka hanya mendapat 2 kursi parlemen. Pada bulan September 1990, Rath Yatra (Chariot Ride) ke Ayodhya dipimpin oleh Pemimpin BJP L.K.Advani. Tindakan ini meradikalisasi massa Hindu. Bahkan Undang-Undang Khusus Tempat Ibadah yang disahkan pada tahun 1991 membuat pengecualian untuk Masjid Babri di Ayodhya.

Putusan Mahkamah Agung bulan November 2019 akhirnya memberikan seluruh dari 67,73 hektar termasuk 2,77 hektar kepada pihak ke-3 Hindu (kasus ini diajukan pada tahun 1989). Putusan Mahkamah Agung bergantung pada beberapa poin penting - tercantum di bawah ini.

1. Anekdote verbal dan sastra umat Hindu tentang referensi keberadaan Kuil Ram di Ayodhya tempat sebagian menyebutkannya

sebagai lokasi yang persis dengan Masjid Babri.

2. Klaim yang terus-menerus dari umat Hindu sejak tahun 1885 untuk menyembah Ram, dewa mereka di atas tanah seluas 2,77 hektar yang disengketakan.
3. Ketidakmampuan umat Islam untuk menunjukkan kepemilikan situs yang disengketakan terus tidak terbantahkan dan bersifat eksklusif.
4. Survei Survei Arkeologi India (ASI) yang melaporkan bahwa terdapat struktur di bawah fondasi Masjid Babri meskipun tidak bisa dipastikan apakah itu adalah kuil.

Apa yang terjadi pada kasus masjid Babri membuktikan kepada kita kegagalan sistem sekular demokrasi untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Berbeda dengan sistem Peradilan Islam yang memastikan hak-hak orang, terlepas dari kelompok mayoritas atau minoritas, ditegakkan berdasarkan hukum syariah. Hukum Islam tidak mengenal mayoritas atau minoritas yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum. Dalam kasus Masjid Babri, tampak jelas bahwa Kongres dan BJP bermain-main dengan Hukum dan Undang-Undang untuk keuntungan politik pada berbagai waktu dalam beberapa dekade terakhir.

Sistem hukum Khilafah berusaha untuk menerapkan keadilan dalam batas-batas syariah Allah dan tidak memerlukan suara mayoritas dari para pendukungnya. Sistem Hukum Khilafah Islam tidak membutuhkan dukungan partai politik seperti di negara-negara demokrasi untuk mendukung suara mereka dalam kasus hukum. Kita dapat melihat hari ini dari mulai Amerika hingga Eropa sampai Asia, para pemimpin politik bermain dengan emosi rakyat untuk memenangkan suara mereka yang digunakan sebagai senjata dalam pengadilan. Di negara-negara Barat, emosi rakyat dimainkan oleh kelompok ultra nasionalisme, yang melahirkan

kebijakan anti-imigran. Hal yang sama terjadi di India saat ini, partai politik Hindu merupakan bentuk lain dari semangat Nasionalisme Ultra-Agama.

Status Masjid dalam Islam sebagai kepemilikan umum, milik kaum Muslim, tidak boleh berubah statusnya. Diamnya para penguasa Dunia Muslim adalah hal yang mencengangkan dan sungguh keterlaluan.

Bersandar pada pengadilan sekular tidak akan bisa memenuhi harapan umat Islam dan tidak akan pernah sesuai dengan syariah Islam. Di sinilah pentingnya umat Islam untuk membangun kembali sistem pemerintahan Khilafah yang akan menerapkan sistem peradilan Islam yang sesuai dengan syariah Islam. [AF]

Kegagalan Negara Sekular India

Setelah lebih dari seperempat abad, Mahkamah Agung India akhirnya memutuskan terkait kontroversi situs Masjid Babri. Sebelum putusan hari Sabtu, pihak berwenang memperketat keamanan di seluruh negeri. Di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, sekolah ditutup karena kemungkinan kerusuhan. Laporan berita lokal mengatakan bahwa pembatasan pertemuan publik diberlakukan di Delhi dan Mumbai, dua kota terbesar di India. Modi meminta agar tenang di malam sebelum putusan. Dia menulis di *Twitter*: “Kita harus menjaga keharmonisan bersama”; “Ingat, bahwa apa pun keputusan yang diambil terkait Ayodhya oleh Mahkamah Agung, maka itu tidak akan menjadi kekalahan atau kemenangan bagi siapa pun.”

Di luar Mahkamah Agung pada hari Sabtu, pecah teriakan “Jay Shri Ram!” Juga berbagai seruan dukungan atas Dewa Rama. Kami akan membangun kuil di sana setelah pengumuman putusan. Beberapa peluru ditembakkan, tanda kemenangan bagi kaum tradisional Hindu.

Para politisi India telah lama menganggap sekularisme sebagai kunci untuk memungkinkan umat Islam dan Hindu hidup bersama secara damai. Namun, tindakan Pemerintah Modi mengungkapkan wajah sebenarnya, bukan hanya rezim India, tetapi juga bagi sekularisme itu sendiri. Konsep sekularisme modern terkait erat dengan filsafat liberalisme, yang mengklaim memberikan kebebasan bagi semua orang. Memang, individu yang hidup secara kolektif dalam masyarakat tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memperhatikan orang lain. Artinya, setiap filsafat politik yang realistis harus mewakili keseimbangan antara individu dan masyarakat. Inilah yang gagal dilakukan oleh liberalisme. Hasilnya, individu dengan kekuatan atau pengaruh yang lebih besar pasti mendominasi dengan mengorbankan seluruh masyarakat. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa rezim Hindu saat ini mampu menginjak-injak hak-hak kaum Muslim dengan nyaman dan aman. Sungguh, semua ini bertentangan dengan pandangan Islam yang menjamin perlindungan bagi agama lain.

Allah SWT (yang artinya): *(Itulah) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah.” Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa* (TQS al-Hajj [22]: 40). [Kantor Berita HT, 14/11/2019].

KAIDAH ISLAM DALAM MEMILIH PEJABAT PUBLIK Bagian Ketiga-Habis

Kaidah kesembilan: Seseorang harus diuji sebelum diangkat sebagai pegawai. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar, yang menunjukkan akan kehati-hatian beliau dalam memilih pembantunya. Tujuannya adalah agar benar-benar terpilih pejabat yang kompeten dalam bidangnya dan tampak terlihat nyata motivasi untuk menjadi pelayan masyarakat. Bukan untuk mengejar jabatan dan menumpuk kekayaan. Apalagi disalahgunakan oleh Khalifah untuk bagi-bagi jabatan sebagai balas jasa kepada koalisi politiknya ketika hasrat politiknya menjadi pimpinan menjadi kenyataan.

Pada masa Khalifah Umar, orang-orang sebelum diangkat sebagai pegawai, menurut Ahmad bin Qais, melalui proses uji. Kadang-kadang pengujian tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam istilah sekarang melakukan pemagangan dulu. Ahmad berkata: *Saya datang menghadap Umar ra. Dia kemudian memintaku untuk bersamanya selama satu tahun. Setelah satu tahun saya bersamanya, Umar al-Faruq berkata kepadaku, "Saya telah mengujimu. Saya melihat kamu mengerjakan kebaikan ketika di hadapan orang.*

Saya mengharap kamu melakukan hal sama ketika tidak ada orang. Kami pernah membahas bahwa penyebab hancurnya umat ini karena orang munafik di antara mereka."

Umar bin al-Khatthab bertanya kepada dia, "*Tahukah kamu, mengapa saya menahanmu untuk selalu bersamaku?*" Umar menjelaskan bahwa dia ingin mengujinya untuk dijadikan gubernur. Setelah menguji, Umar mengangkatnya sebagai gubernur.¹

Apa yang dilakukan dan diucapkan Khalifah Umar adalah realitas dan hal yang sering terjadi pada pejabat, yakni mempunyai sifat munafik. Di hadapan orang, apalagi di hadapan rakyat banyak, ia bermanis muka. Seolah-olah mendengarkan dan perhatian terhadap apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh rakyat. Namun, itu semua hanyalah sandiwara. Dicitrakan dekat dengan masyarakat, namun sejatinya jauh dan tidak menghiraukan rakyatnya. Kebijakan dan tindakannya tidak untuk kepentingan rakyatnya, tetapi untuk kepentingan partainya dan atau kepentingan para konglomerat yang menjadi bohirnya. Seperti kenaikan iuran BPJS, naiknya harga-harga pada layanan publik, penguasaan atas tambang-tambang yang diserahkan ke asing, dll. Tampak seperti dekat dengan rakyat, namun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru menyengsarakan rakyat. Hal inilah yang dikatakan oleh Khalifah Umar sebagai pejabat munafik. Inilah yang sejak awal mau diberantas dengan proses pengujian yang cermat, cepat dan tepat.

Di antara nasihat Khalifah Umar kepada Ahnaf, "*Ahnaf, siapa yang sering tertawa, kewibawaannya berkurang. Siapa yang sering bercanda, dia akan diremehkan. Siapa yang sering melakukan sesuatu, dia akan paham. Siapa yang banyak bicara, dia banyak kesalahannya. Siapa yang banyak melakukan kesalahan, rasa malunya berkurang. Siapa yang mempunyai sedikit rasa malu, ia sangat jarang*

berlaku wira'i. Siapa yang jarang berlaku wira'i, hatinya akan mati."²

Ini adalah pesan mendalam dari Khalifah Umar untuk para pegawainya, tanpa kecuali. Semuanya diminta untuk fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang mubah, namun tidak penting, agar sekuat tenaga dihindari karena memang akan berpotensi untuk menimbulkan hal-hal yang kurang baik, seperti sering tertawa, sering bercanda, banyak bicara dll. Apalagi ketika pejabat banyak bicara, namun tidak dalam kapasitasnya, justru malah membuat gaduh dan tuduhan tidak tepat. Seperti opini radikal yang lebih menyudutkan umat Islam, rencana membuat kebijakan larangan berpakaian celana cingkrang, pakai cadar, menghapus kurikulum syariat Islam karena di tuduh sudah basi, dll. Semua itu menunjukkan banyak bicara, membuat gaduh yang itu jauh dan menyelisihi dari fakta dan dalil syariah. Setelah dikritik oleh banyak pihak baru menyatakan bahwa itu baru rencana dan akan ditinjau ulang. Ini adalah salah satu contoh pejabat yang terlalu banyak bicara, namun tidak berdasarkan dalil. Akhirnya justru membuat kegaduhan dan menantang syariat Islam.

Kaidah kesepuluh: Mengangkat gubernur dari kaumnya. Khalifah Umar sering mengangkat gubernur dari kaumnya (putra daerah, *per.*). Namun, putra daerah juga bukan semata-mata akhirnya menjadi syarat utama pejabat diangkat di daerah tertentu. Khalifah Umar melakukan hal ini jika ada kemaslahatannya dan orang-orang yang pantas untuk diangkat gubernur dari kasus tersebut. Artinya, Khalifah Umar akan mengangkat pejabat di suatu daerah dari putra daerah jika ada kemaslahatan yang lebih besar didapat. Alasannya, bisa jadi putra daerah lebih memahami situasi dan kondisi serta karakter masyarakat dan potensi daerahnya dibandingkan dengan yang lain. Namun, jika memang ada pejabat dari daerah lain yang

mempunyai kriteria lebih dibandingkan dengan putra daerah, maka pejabat yang lebih *kafa'ah* dan amanahlah yang akan dipilih.

Khalifah Umar, misalnya, pernah mengangkat Jabir bin Abdullah al-Bajalli sebagai komandan pasukan Bajlah³ yang dikirim ke Irak. Umar juga mengangkat Salman al-Farisi sebagai gubernur Madain, Nafi' bin Harist sebagai gubernur Makkah dan Utsman bin Abu al-Ash sebagai gubernur Thaif. Khalifah Umar berpikiran bahwa para gubernur yang diangkat dari kaumnya lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah tertentu.⁴

Dari paparan awal hingga akhir tampak jelas bahwa syariah Islam memberi tuntunan yang jelas lagi rinci bagaimana memilih dan menyeleksi calon pejabat publik yang nantinya akan sepenuhnya melayani rakyatnya. Bukan pejabat yang justru mementingkan kepentingan pribadi, keluarga dan partainya semata. Kepentingan rakyat hanya sebagai jargon, kampanye dan bualan semata. Jauh dari apa yang diucapkan dengan realita yang terjadi.

Inilah yang menjadikan syariah Islam sebagai sistem yang sempurna dan paripurna. Salah satunya memberikan syariah yang jelas tentang bagaimana pejabat publik. Ini sekaligus juga menjadi jawaban, bahwa Islam juga mengatur tentang pemerintahan dan sistem bernegara. Bukan sekadar agama ritual semata. Jadi sangatlah aneh jika ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur masalah pemerintahan. Justru fakta di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan kaidah detail tentang bagaimana memilih pejabat publik.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Al-Wilayah 'ala Al-Buldan*, jilid 1, halaman 142 dan *Manaqib Amirul Mukminin*, halaman 117

² *Sifatu Ash-Shafwa*, jilid 1 halaman 278

³ *Al-Wilayah 'ala al-Buldan*, jilid 1 halaman 142

⁴ Ibid

AGENDA UMAT



Gresik. Sabtu [16/11] ratusan jamaah Majelis Taklim As-Salam Gresik hadir dalam Haffah Maulid Nabi saw. dengan mengusung tema mencintai warisan Baginda Rasulullah saw.. Dalam tausiyahnya Kyai Abdul Aziz [Pengasuh Majelis Taklim As-Salam] menyampaikan, "Bukti mencintai nabi yakni hanya menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai uswah (tauladan) dalam kehidupan."



Bangka. Jumat [15/11] di Masjid di Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka Tengah dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. tahun 1441 H. Acara tersebut berlangsung semarak dan khidmat. Acara menghadirkan dua orang penceramah: Ustadz Fakhrun Uce dan Ustadz Ahmad Najib.



Martapura. Saat Multaqa Ulama di kawasan Sekumpul, Martapura, Ahad [10/11], Pimpinan Majelis Taklim Muslimin dan Muslimat Handayani dari Kota Banjarmasin, Ustadz Hidayatul Akbar menegaskan, bahwa Khilafah Islamiyah adalah sunnah dari Rasulullah saw., yang sayangnya saat ini dijauhkan dari umat oleh propaganda buruk para musuh-musuh Islam.



Tanjung. Suasana hangat penuh kekeluargaan sangat terasa dalam acara Multaqa Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Kalimantan Selatan Kamis [14/11]. Berkumpul Ulama Banua Enam di Tanjung dengan kepedulian akan nasib Islam dan umatnya sebagaimana yang disampaikan oleh KH Abdul Wahab, M.Ag, Ulama asal Kandangan.



Makassar. Ahad [17/11] di Masjid Baiturrahman Makassar diadakan acara Tabligh Akbar Rabiul Awwal 1441 mengambil tema "Cinta Nabi, Cinta Syariah, Cinta Khilafah". Acara ini dipadati sekitar enam ratus peserta dari berbagai kalangan baik ulama, asatidz (ah), maupun masyarakat umum dan mahasiswa.



Sorong. Ahad [17/11], masyarakat Kota Sorong mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H bertajuk "Cinta Nabi Cinta Syariah". Bertempat di Masjid Al Hidayah, km. 12, Kota Sorong, kegiatan tersebut berlangsung semarak dihadiri oleh berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, remaja dan ibu – ibu rumah tangga. Hadir sebagai pembicara, Drs. H. Mungawan.

Ratusan Ulama Aswaja yang
 Hadir Pada Peringatan Maulid
 Nabi saw. di PP Al-Muntoha
 Bangkalan, "Satu Visi Untuk
 Melanjutkan Sistem Khilafah".



Madura. Ahad [17/11] bertepatan dengan
 20 Rabiul Awal 1441 H, di Ponpes
 Al-Muntoha, Bangkalan Madura, yang
 diasuh oleh KH Muhammad Toha Cholili,
 diadakan Haflah/Peringatan Maulid Rasul
 saw. Lebih dari 700 peserta yang terdiri
 dari para ulama, kiai pengasuh pondok
 pesantren perwakilan se-Indonesia,
 habaib, serta ustad, hadir dalam acara
 tersebut.

